



# LAPORAN KINERJA

## BPMP PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PAUD DIKDASMEN**

 0852-4270-0045

 [bpmppgorontalo.kemdikbud.go.id](http://bpmppgorontalo.kemdikbud.go.id)

 [bpmppgorontalo@kemdikbud.go.id](mailto:bpmppgorontalo@kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

### “MAJU MEMBANGUN MUTU PENDIDIKAN”

**P**uji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja ini tepat waktu.



Laporan Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (BPMP) Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

**” Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ”**

Diharapkan penyajian laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BPMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BPMP Provinsi Gorontalo pada tahun 2023.

Gorontalo, 26 Januari 2024  
Kepala BPMP Provinsi Gorontalo



Rudi Syaifullah, S.Si, M.M  
NIP. 19750627 200312 1 002

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF



**BAB**  
**1**

### PENDAHULUAN

- GAMBARAN UMUM
- DASAR HUKUM
- TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
- ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

1

**BAB**  
**2**

### PERENCANAAN KINERJA

- RINGKASAN RENSTRA
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

19

**BAB**  
**3**

### AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA
- REALISASI ANGGARAN

25

**BAB**  
**4**

### PENUTUP

72

**LAMPIRAN**

### LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA
- PENGUKURAN KINERJA
- SURAT PERNYATAAN LAKIN TELAH DI REVIEW

75

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

## DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2023



## CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023





### Sasaran Kegiatan (SK) 1

“Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen”

**IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**

**TARGET 2023**

PAUD DIKMAS yang meningkat mutu pembelajarannya

1.96%

**REALISASI 2023**

Persentase kenaikan mutu pembelajaran PAUD DIKMAS

0.96%

**CAPAIAN TARGET**

Persentase Capaian Target PAUD DIKMAS yang meningkat mutu pembelajarannya

49%

**IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**

**TARGET 2023**

DIKDAS DIKMEN yang meningkat Rapor Pendidikan

30%

**REALISASI 2023**

Persentase kenaikan Rapor Pendidikan Provinsi, Kab/Kota

100%

**CAPAIAN TARGET**  
Persentase Dikdas Dikmen yang meningkat mutu pendidikannya

333%



# IKHTISAR EKSEKUTIF



## Sasaran Kegiatan (SK) 2 'Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Gorontalo'

IKK21 Predikat  
SAKIP BPMP Prov.  
Gorontalo

REALISASI			TARGET	REALISASI	TARGET
2020	2021	2022	2023		2024
74,92	77,68	82,8	A	83,95	A
BB	BB	A		A	



# IKHTISAR

## EKSEKUTIF

IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Gorontalo



REALISASI			TARGET	REALISASI	TARGET
2020	2021	2022	2023		2024
98,5	99,08	99,91	84	98,56	98,57

**NILAI KERJA ANGGARAN**  
**98,56**



PERINGKAT SATU NKA DI LINGKUNGAN  
PAUD DIKDASMEN TAHUN 2023



# IKHTISAR EKSEKUTIF PENGHARGAAN



# IKHTISAR EKSEKUTIF



**Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :**

1. Belum terbitnya hasil Sulingjar tahun 2023 yang menjadi dasar pengukuran persentase kenaikan mutu pembelajaran satuan pendidikan PAUD Dikmas, sehingga perlu memikirkan alternative lainnya terkait pengukuran capaian kinerja yaitu data Akreditasi berdasarkan cutoff Dapodik Semester Ganjil (Desember) tahun 2023 ;
2. Satuan Pendidikan jenjang PAUD Dikmas belum melakukan updating data hasil akreditasi tahun 2023 pada aplikasi Dapodik ;
3. Belum terbitnya Rapor Pendidikan tahun 2023 yang menjadi dasar pengukuran persentase peningkatan rapor pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen, sehingga masih menggunakan data sebaran indeks standar pelayanan minimal (SPM) dari Rapor Pendidikan Provinsi Gorontalo tahun 2022 ;
4. Rapor Pendidikan belum sepenuhnya dijadikan basis data perencanaan daerah dan satuan pendidikan ;
5. Komitmen pemerintah daerah dalam mengawal program peningkatan mutu pendidikan di daerah belum optimal.



# IKHTISAR EKSEKUTIF



**Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :**

- 1. Memaksimalkan sinergitas dengan unit utama dalam menentukan pengukuran target capaian IKK berdasarkan nilai akreditasi dan Rapor Pendidikan ;**
- 2. Melakukan koordinasi dengan BAN PAUD Provinsi Gorontalo terkait data hasil akreditasi sekolah tahun 2023 sebagai dasar perhitungan pencapaian target IKK 1.1 yang disajikan sebagai sandingan data sebelumnya ;**
- 3. Melakukan Advokasi, koordinasi, fasilitasi, pendampingan secara intensif kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo melalui pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan kebijakan pendidikan di daerah dan satuan pendidikan ;**
- 4. Meningkatkan peran dan komitmen Pokja Manajemen Operasional (PMO) daerah dalam mengawal program peningkatan mutu pendidikan daerah.**





# BAB 1

# PENDAHULUAN

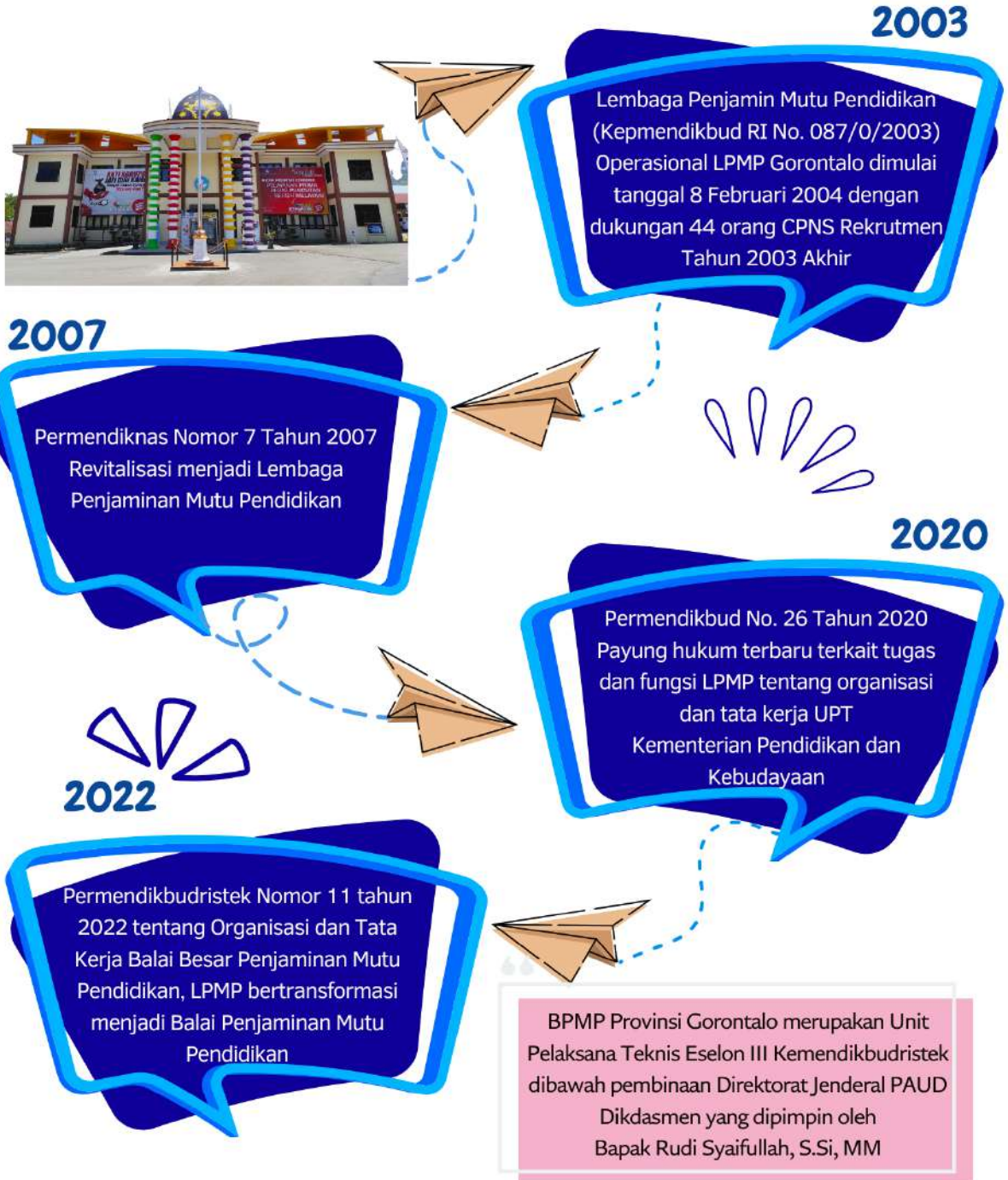
---





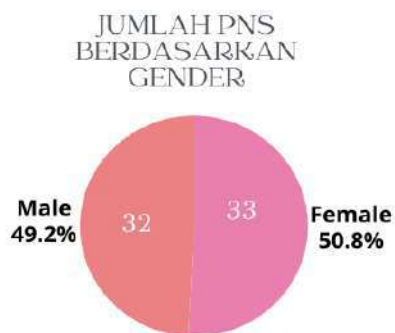
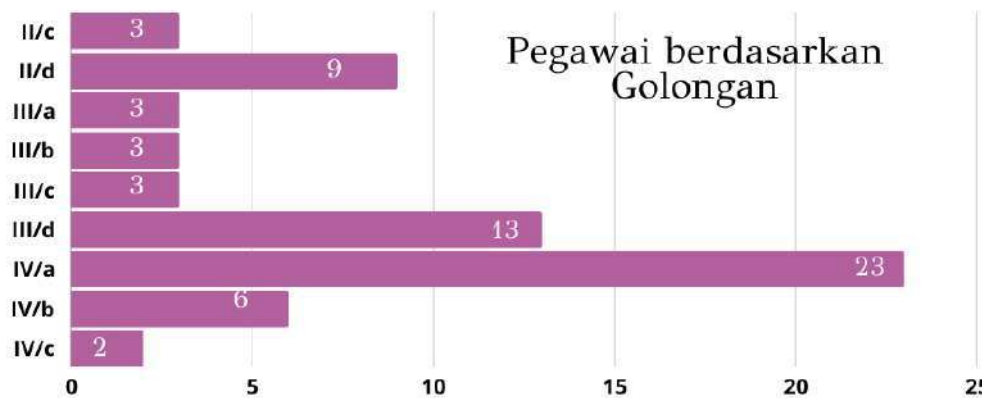
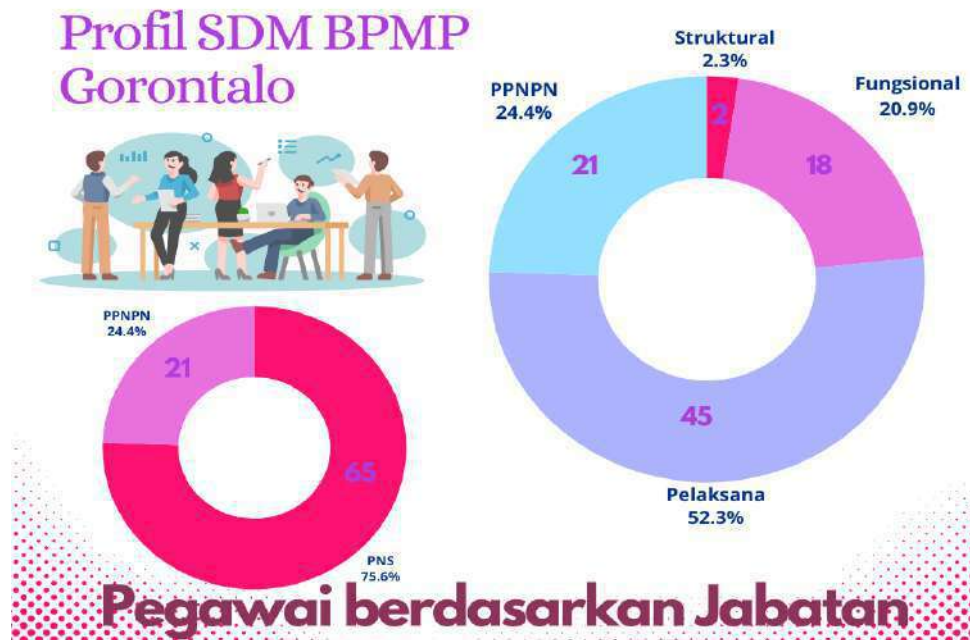
# GAMBARAN UMUM

## SEJARAH BPMP PROVINSI GORONTALO

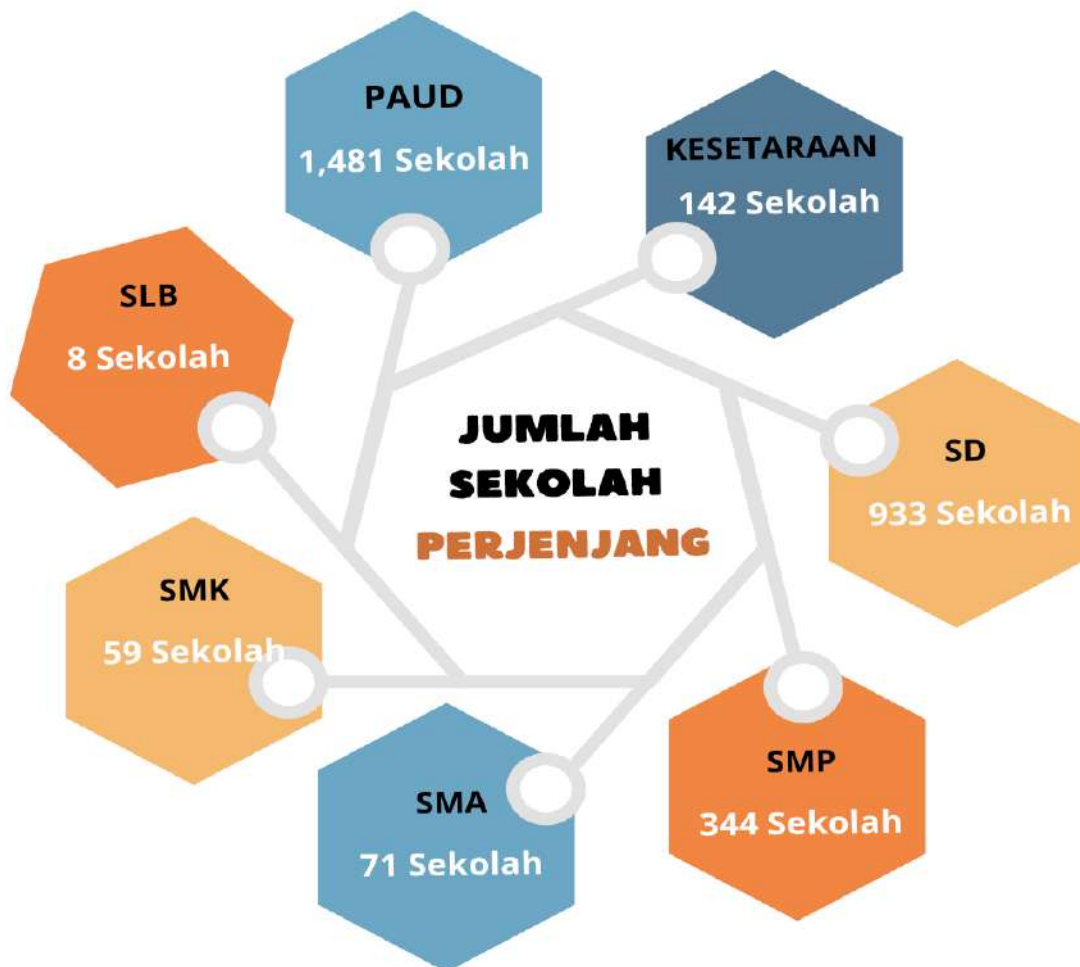


## POTENSI SDM DI BPMP PROVINSI GORONTALO

Sumber daya manusia yang ada di BPMP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan melalui diagram di bawah ini :

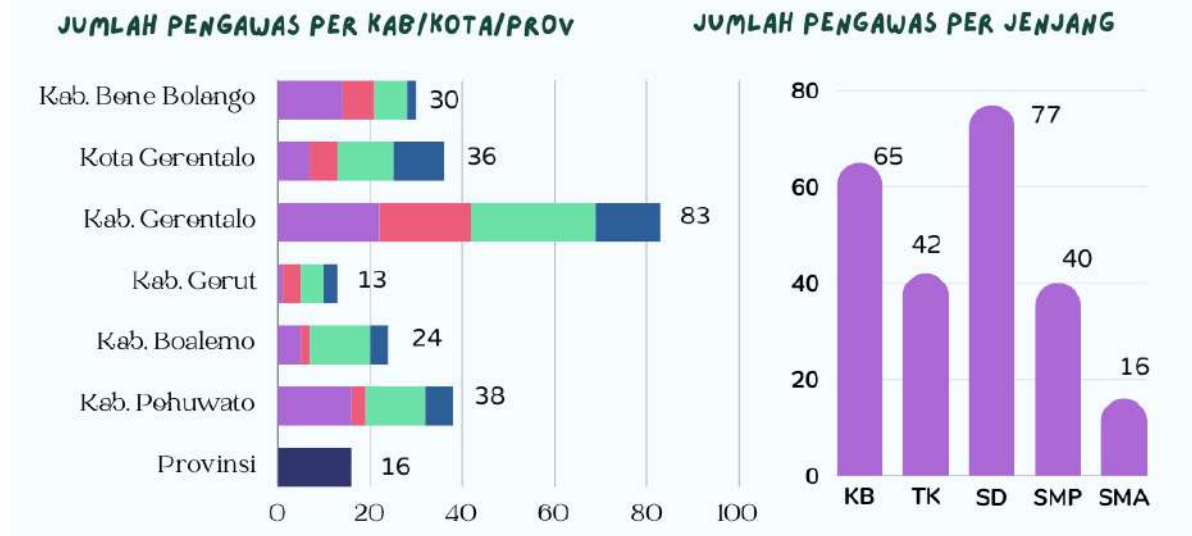


## DATA JUMLAH WILAYAH KERJA DAN SASARAN





**Ketersediaan Pengawas  
Kab/Kota/Provinsi** **240**



## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain penyusunan laporan kinerja adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;



7. Permendikbudristek Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

## C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas dan fungsi , yaitu :

### TUGAS

Melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi

### FUNGSI

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dan;
7. Pelaksanaan urusan administrasi.



BPMP Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu satu pejabat struktural eselon IV, kelompok jabatan fungsional, dan pelaksana.



## D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

### 1. Isu Strategis

Isu – isu strategis terkait dengan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo saat ini dan dua tahun kedepan adalah :

#### 1) **Belum meratanya akses pendidikan di Provinsi Gorontalo.**

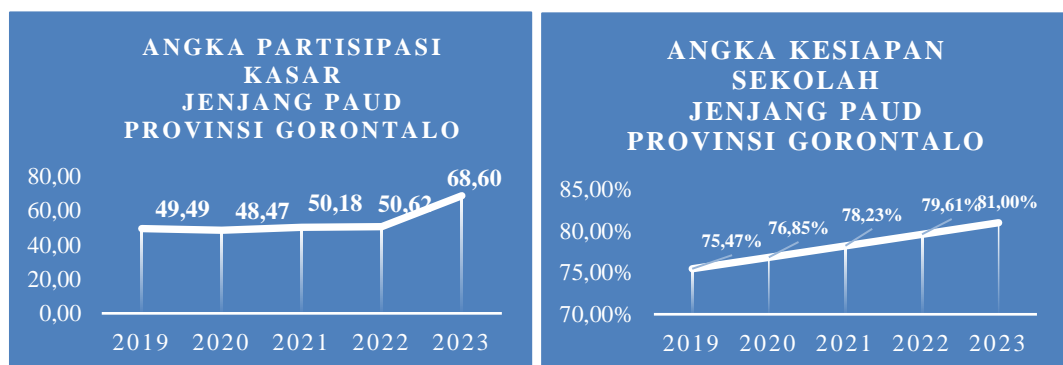
Tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 dimana diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga ini menjadi salah satu penyebab bagi anak berusia 5-6 tahun yang menjadi calon peserta didik PAUD tidak dimasukkan ke sekolah oleh orangtuanya. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ada di Provinsi Gorontalo.



Sejak tahun 2019 -2023 Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ada di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2019 grafik menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) yang ada di Provinsi Gorontalo baru sebesar 49,49%, sedangkan pada tahun 2023 angkanya sudah mencapai 68,60%. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat aksesibilitas satuan pendidikan PAUD semakin meningkat. Sehingga banyak orangtua yang lebih mudah dalam mengakses pendidikan PAUD bagi anaknya. Selain itu kesadaran orangtua semakin besar untuk menyekolahkan anaknya di PAUD, sehingga diharapkan harapannya anak-anak mampu untuk mengenal dirinya sendiri, mengeksplorasi lingkungan, bermain dengan sebayanya, dan dapat membangun rasa percaya diri.

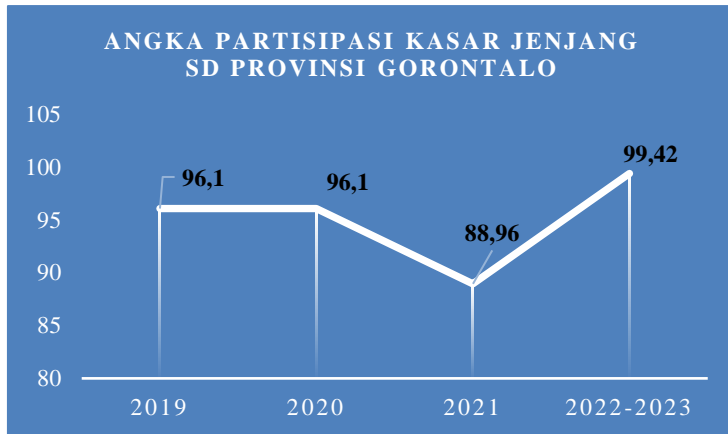
Dilihat dari Angka Kesiapan Sekolah (AKS) sejak tahun 2019-2023 datanya terus meningkat. Pada grafik digambarkan bahwa APK lebih rendah dibandingkan dengan AKS, sehingga dapat diartikan bahwa, masih banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya di PAUD dan langsung memasukkan anaknya ke jenjang Sekolah Dasar (SD).

Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membangun kesadaran orangtua untuk menyiapkan anaknya sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Cara yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi/kampanye terkait dengan pentingnya anak usia 5-6 tahun untuk bisa bersekolah di PAUD. AKS merupakan angka indeks persentase proporsi anak kelas satu SD pada tahun berjalan yang sudah pernah mengikuti pendidikan prasekolah. Tren APK dan AKS jenjang PAUD di Provinsi Gorontalo terlihat pada grafik berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2019 - 2023





Sumber: *Kemdikbudristek, Pusdatin, 2022*

Selanjutnya capaian APK jenjang SD mengalami penurunan pada periode tahun 2021, dimana salah satu penyebab penurunan APK ini adalah berkurangnya siswa baru kelas satu SD yang berusia dibawah tujuh tahun akibat berkembangnya layanan PAUD

Peningkatan APK SD terjadi pada 2022/2023 dari 88,96 menjadi 99,42 yang antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah satuan pendidikan SD serta peningkatan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui dana transfer. Tahun 2019-2021 masih dipengaruhi oleh masa pandemi covid-19 dimana diberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sehingga banyak orangtua cenderung tidak mendaftarkan anaknya yang berusia dibawah tujuh tahun ke jenjang SD yang menyebabkan terjadinya penurunan APK SD. Pada tahun 2022/2023, pembelajaran cenderung normal sehingga terjadi peningkatan APK sebesar 10,46. Alternatif indikator akses SD adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun.



Sumber : *Susenas 2020-2022*

Pada tabel terlihat bahwa APS untuk usia 7-12 tahun di Provinsi Gorontalo tahun 2022 telah mencapai 98,93%. Hal ini memberikan gambaran bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun telah mengenyam Pendidikan atau

berada di bangku sekolah. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan APS agar mendekati 100 persen, perlu diperkuat dukungan terhadap pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak



jalanan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu faktor aksesibilitas pendidikan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas pendidikan baik dari segi geografis maupun ekonomi. Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo untuk mendorong percepatan target nasional 100% untuk APS 7-12 tahun.

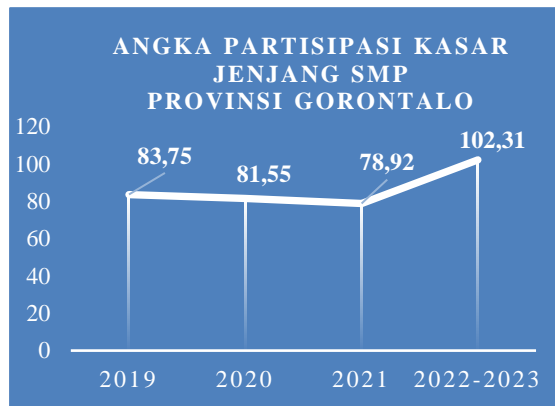
Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo, seperti:

- Memberikan akses pendidikan yang memadai sampai ke daerah terpencil
- Meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan yang merata.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dan kampanye pendidikan.
- Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin maupun menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut agar semua anak di Provinsi Gorontalo mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Sama halnya dengan APK SD, tahun 2021 terjadi penurunan juga pada APK SMP. Namun pada periode tahun 2022-2023, data APK mengalami kenaikan signifikan dari 78,92 menjadi 102,31. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah anak yang mengenyam pendidikan dibangku sekolah jenjang SMP. Namun data APS menggambarkan bahwa masih terdapat 8,17% anak usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan, maka perlu dipertimbangkan daerah yang belum terjangkau layanan pendidikan pada jenjang usia tersebut. Perlu perhatian khusus seperti dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin, dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus bagi anak-anak dalam kondisi khusus seperti anak jalanan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Capaian APK dan APS jenjang SMP di Provinsi Gorontalo, terlihat pada grafik berikut :





**Sumber : Kemdikbudristek, 2023**



**Sumber : Susenas 2020-2022**

Untuk jenjang SMA. dilihat pada data APS 16-18 tahun 2023 di Provinsi Gorontalo Masih berada di bawah 75%. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan lanjutan di Provinsi Gorontalo masih belum merata. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu terus meningkatkan akses pendidikan lanjutan di wilayahnya agar lebih banyak anak-anak di provinsi tersebut yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti:

- Meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah lanjutan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan lanjutan
- Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga anak usia sekolah tetap memiliki keinginan untuk terus melanjutkan sekolah hingga selesai

Dengan kerja keras dan komitmen dari semua pihak, APS 16-18 tahun di Provinsi Gorontalo dapat terus ditingkatkan sehingga semua anak di provinsi tersebut dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. BPMP Provinsi Gorontalo perlu memprioritaskan dukungan pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau atau terbatas layanannya. Layanan SMA/ sederajat dapat dipertimbangkan untuk melayani daerah dengan jumlah anak usia pendidikan menengah yang terbatas. Penetapan target Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang lebih baik juga menjadi salah satu fokus guna memastikan anak-anak dari kelompok ekonomi termiskin dapat tetap bersekolah. APS usia 16-18 Provinsi Gorontalo, terlihat pada grafik berikut :





Sumber : Susenas 2020-2022

**2) Kualitas hasil belajar peserta didik masih rendah dan perlu ditingkatkan.**

Akreditasi mengukur bagaimana satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Nilai akreditasi jenjang PAUD Dikmas tahun 2023, terlihat pada diagram berikut :



Sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember) tahun 2023



Sejak tahun 2021 dilaksanakan program Asesmen Nasional (AN) sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. AN terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Karakter (SK), dan Survey Lingkungan Belajar (SULINJAR).

AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi berbagai macam teks. Numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol-simbol matematika dalam kehidupan sehari-hari. SK dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila merupakan profil lulusan yang diharapkan dimiliki oleh setiap peserta didik Indonesia. Sulinjar dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survey lingkungan belajar dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner dengan respondennya adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik.

Berikut ini merupakan indikator capaian terbaik, capaian terendah, dan peningkatan skor tertinggi di Provinsi Gorontalo tahun 2023 :

No	Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas
1	<b>SDLB</b>	Peningkatan Tertinggi	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terbaik	D.4 Iklim keamanan sekolah
		Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi
2	<b>SMPLB</b>	Peningkatan Tertinggi	D.8 Iklim Kebinekaan
		Capaian Terbaik	D.4 Iklim keamanan sekolah
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
3	<b>SMA Umum</b>	Peningkatan Tertinggi	D.8 Iklim Kebinekaan
		Capaian Terbaik	D.4 Iklim keamanan sekolah
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi



4	<b>SMALB</b>	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	D.10 Iklim Inklusivitas
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
5	<b>SMK</b>	Peningkatan Tertinggi	D.8 Iklim Kebinekaan
		Capaian Terbaik	A.6.2 Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan
		Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi

Sumber : Rapor Pendidikan Kemdikbud, 2023

### 3) Manajemen dan tata Kelola satuan pendidikan belum berkembang dengan baik.

Untuk membangun program perencanaan pendidikan yang tepat, terukur, dan berkesinambungan diperlukan data-data pendukung yang lengkap, valid, akuntabel dan terbaru (*up to date*). Hasil Asesmen Nasional merupakan salah satu sumber data pada Rapor Pendidikan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi pendidikan juga sebagai sumber informasi tentang mutu pendidikan di suatu wilayah. Rapor Pendidikan yang dihasilkan dari data Asesmen Nasional dapat digunakan untuk perencanaan sekolah melalui Arkas mulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan operasional. Pada tahap perencanaan strategis, Kepala Sekolah dapat menggunakan Arkas dalam menyusun rencana anggaran sekolah yang lebih tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, selain itu kepala sekolah dapat melaksanakan fungsi kontrol dalam pemanfaatan arkas disekolah.

Pada tahap perencanaan keuangan, Bendahara Sekolah dapat menggunakan Arkas untuk menyusun anggaran sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah juga dapat digunakan sebagai penyusunan laporan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, Arkas dapat membantu sekolah dalam menyusun perencanaan sekolah yang lebih efektif dan efisien.



## 2. Peran Strategis

Berdasarkan isu-isu strategis BPMP Provinsi Gorontalo mempunyai peran strategis dalam bidang pendidikan dan tata kelola kelembagaan di daerah, diantaranya :

- 1) Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Provinsi Gorontalo, BPMP Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, DPRD, BKAD serta pihak terkait lainnya dalam merumuskan perencanaan kebijakan pendidikan di daerah, dalam bentuk kegiatan :
  - a) Pendampingan Perencanaan Daerah
  - b) Pelaksanaan FGD bersama Pemda dan DPRD
- 2) Dalam meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, BPMP Provinsi Gorontalo melakukan advokasi, pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong pemda mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar melalui intervensi program prioritas, yaitu :

### a. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka merupakan upaya peningkatan kualitas siswa yang kompeten dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid melalui pembelajaran kontekstual yang digerakkan oleh guru penggerak (*instructional leader*) dan sekolah penggerak yang mampu mengelola kurikulum pembelajaran dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pemberian umpan balik rapor pendidikan berdasarkan hasil AN. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program prioritas ini adalah :

- 1) Kampus Mengajar Angkatan 5 dan 6
- 2) Workshop 6 strategi IKM bagi Pengawas sekolah
- 3) Monitoring dan Evaluasi Buku Bacaan Bermutu
- 4) Workshop Evaluasi UPT
- 5) Advokasi stakeholder PAUD



**b. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional**

Asesmen Nasional (AN) dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai AN menunjukkan semakin baik pula kondisi pendidikan di daerah tersebut, maka untuk mencapai nilai AN yang baik dilakukan pembinaan asesmen nasional oleh UPT Daerah yang menjadi binaannya, selanjutnya dapat membantu peningkatan pencapaian AN secara nasional. Kegiatan yang mendukung program prioritas ini adalah :

- 1) Rakortek Asesmen Nasional dan pembekalan pemanfaatan rapor pendidikan untuk peningkatan delta AN tahun 2023
- 2) Pemantauan persiapan dan pelaksanaan AN di daerah

**c. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak**

Program Sekolah Penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1 – 2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Pelaksanaan pembinaan dilakukan agar Program Sekolah Penggerak dapat berlangsung dengan baik sehingga menghasilkan percepatan pencapaian kualitas pelajar yang meningkat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program prioritas ini adalah :

- 1) Rapat awal pembahasan bersama BGP Analisis delta nilai rapor PSP tahun 2021 – 2022
- 2) Rapat PMO daerah 12 bulan
- 3) Leadership Manajemen Program Sekolah Penggerak
- 4) Sinkronisasi dan Kolaborasi Kebijakan Merdeka Belajar bersama Pemda
- 5) Dokumentasi/wawancara/publikasi terkait isu dan resiko di daerah
- 6) Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak Tahun 2023
- 7) Koordinasi Satuan Pendidikan Pelaksana PSP Angkatan 1 dan 2
- 8) Advokasi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah



- 9) Konsultan BB/BPMP
- 10) Monitoring pelaksanaan pengimbasan
- 11) Workshop Dashboard UPT

**d. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data**

Melakukan pembinaan dan pendampingan oleh UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen ke pemda kab/kota/provinsi terkait pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data (PBD) agar penggunaan anggaran pendidikan dapat efisien, efektif dan tepat guna. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program prioritas ini adalah :

- 1) ToT Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran
- 2) Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi
- 3) Pendampingan komunitas belajar
- 4) Refleksi intervensi penguatan literasi UPT
- 5) Monitoring dan Observasi Satuan Pendidikan Binaan Gerakan Sekolah Sehat

**e. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan**

Merupakan kegiatan koordinasi antara Kemdikbudristek yang diwakili UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan pemerintah daerah kab/kota/provinsi dalam mengawal kegiatan-kegiatan bidang pendidikan dalam wilayah binaannya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program prioritas ini adalah :

- 1) Workshop perencanaan program transisi PAUD-SD, Gerakan Sekolah Sehat dan Transformasi Pendidikan Khusus
- 2) Workshop Penyusunan Rencana Aksi Transformasi Pendidikan Khusus dan Iklim Inklusivitas
- 3) Pembinaan Kemitraan PDM UPT
- 4) Fasilitasi Kemitraan
- 5) Pendampingan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI) di Sekolah Binaan Program Gerakan Sekolah Sehat
- 6) Pendampingan pembentukan ULD, TPPKS satgas TPPK daerah



- 7) Advokasi Regulasi Merdeka Belajar
- 8) Penggalangan Mitra Pembangunan di daerah
- 9) Pendampingan Sekolah Piloting Program Transisi PAUD-SD yang menyenangkan
- 10) Pendampingan Sekolah Binaan Gerakan Sekolah Sehat

**f. Pelaksanaan Pembinaan Digitalisasi Sekolah**

Melakukan pembinaan dan pendampingan oleh UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen ke pemda kab/kota/provinsi terkait pelaksanaan Digitalisasi sekolah agar proses belajar mengajar di satuan pendidikan dapat lebih baik dengan memanfaatkan teknologi penunjang. Dilaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung program prioritas ini, yaitu :

- 1) Workshop penyusunan strategi optimalisasi chromebook, belajar.id dan rapor pendidikan bersama pemda tahun 2023
  - 2) Fasilitasi pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK
  - 3) Monev DAK TIK
  - 4) Festival Belajar.id
- 3) BPMP Provinsi Gorontalo berperan dalam mewujudkan manajemen dan tata kelola satuan pendidikan yang baik, melalui program prioritas Pembinaan Perencanaan Berbasis Data Pembinaan Transfer Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendukung, yaitu :
- a. Pendampingan PBD Rapor Pendidikan di Satuan pendidikan
  - b. Coaching Clinic akses rapor pendidikan dan pemanfaatan akun belajar.id
  - c. Pendampingan PBD Rapor Pendidikan di Satuan pendidikan
  - d. Pendampingan penggunaan dan pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan SIPLah
  - e. Pendampingan pengelolaan dan penatausahaan BOSP melalui ARKAS
  - f. Pendampingan PBD Rapor Pendidikan di Satuan Pendidikan





# BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

---



## PERENCANAAN KINERJA

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengemban amanat dalam memajukan pembangunan SDM khususnya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, melalui usaha bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan, memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi BPMP Provinsi Gorontalo mengacu pada Visi Kemdikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun Visi Kemdikbudristek 2020-2024 adalah:

***“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.***

Berdasarkan Visi tersebut BPMP Provinsi Gorontalo sebagai UPT Kemdikbudristek berkomitmen mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP Provinsi Gorontalo dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, BPMP Provinsi Gorontalo sesuai tugas dan kewenangannya melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan



Presiden, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi BPMP Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- 2) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sesuai dengan (Permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Baseline			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SK 1</b>	<b>Meningkatnya Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>						
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	-	0.98	1.96	3.92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	-	25.00	30.00	35.00
<b>SK 2</b>	<b>Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo</b>						
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	Predikat	BB	BB	BB	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Gorontalo	Nilai	80	81	83	84	85



## Tujuan Strategis :

- 1) Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Gorontalo.
- 2) Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

## Perjanjian Kinerja (Awal)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	(SK.1) Meningkatnya Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	(IKK 1.1) Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		(IKK 1.2) Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30.00
2	(SK.2) Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	(IKK 2.1) Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	A
		(IKK 2.2) Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 12.231.867.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.594.261.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 19.826.128.000</b>



Pada bulan Oktober terdapat perubahan besaran anggaran pada Rincian Output (RO) yaitu pengurangan anggaran Dukungan Manajemen serta penambahan anggaran program dalam rangka mendukung program prioritas Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data dalam bentuk kegiatan Pemulihan Pembelajaran dengan total anggaran tambahan sebesar Rp. 271.085.000 hal tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Akhir, sebagai berikut :

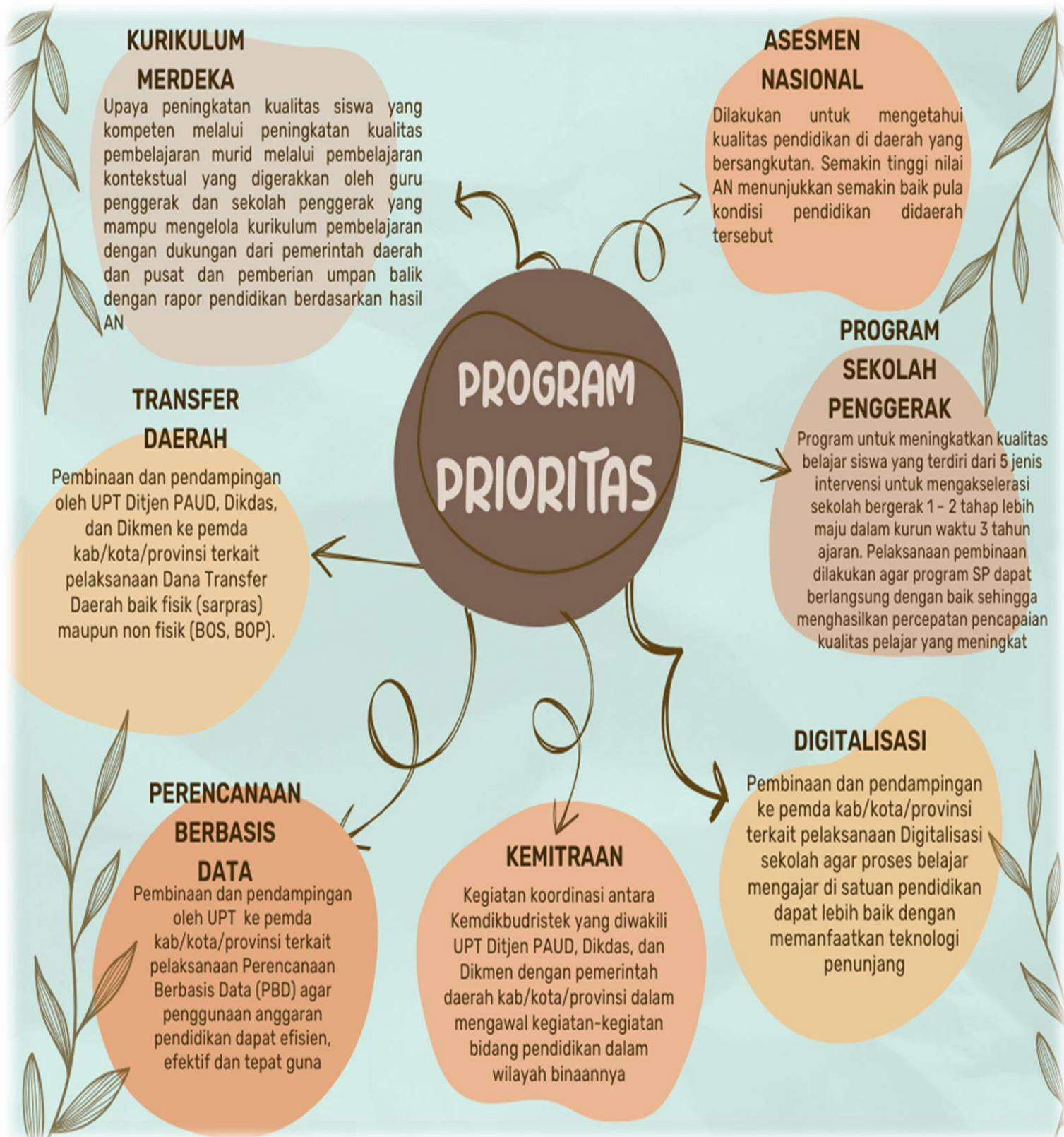
## Perjanjian Kinerja (Akhir)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1.	(SK 1.0) Meningkatnya Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	(IKK 1.1) Presentase satuan pendidikan (PAUD DIKMAS yang meningkat mutu pembelajarannya (IKK 1.2) Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (dikdas dan Dikmen)	1.96  30.00
2.	(SK 2.0) Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	(IKK 2.1) Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo (IKK 2.2) Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	A  84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 11.619.724.000
2.	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Rp. 7.865.346.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 19.485.070.000</b>



Dalam rangka mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, BPMP Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung program prioritas nasional, yaitu :





# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

---



## A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
<b>Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>	1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	0,96	49%
	1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	100	333%
<b>Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo</b>	2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	A	A	100%
	2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	84	98,56	118%



### Sasaran Kegiatan 1

**“Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen”**



Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	0,96	49,08%
1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	100	333%

Peningkatan mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikmas, Dikdas dan Dikmen terlihat dari hasil pengukuran 2 (dua) indikator kinerja (IKK 1.1 dan IKK 1.2) yaitu satuan pendidikan PAUD Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya dan satuan pendidikan Dikdas dan Dikmen di Provinsi, Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya.

Persentase IKK 1.1 diukur berdasarkan nilai akreditasi tahun 2022 dan 2023, seperti terlihat pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa rata-rata kinerja satuan PAUD Dikmas Provinsi Gorontalo meningkat mutu pembelajarannya sebanyak 0,96% atau naik sebesar 49,08% pada tahun 2023. Sedangkan untuk IKK 1.2 diukur berdasarkan sebaran Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan capaian yang melebihi target yaitu sebesar 100% dengan persentase kenaikan sebesar 333%.



## IKK 1.1

### Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

#### 1. Definisi Operasional :

Peningkatan mutu pembelajaran merupakan suatu proses yang terus menerus meningkatkan kualitas belajar mengajar dan faktor - faktor yang berkaitan dengannya dengan tujuan agar target satuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP/BPMP menyatakan bahwa BPMP mempunyai tugas untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Masyarakat di Provinsi Gorontalo.

#### 2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Cara perhitungan capaian target IKK 1.1 masih menggunakan perbandingan nilai akreditasi PAUD Dikmas tahun 2022 dan 2023 berdasarkan *cut off* Dapodik semester Ganjil bulan Desember tahun 2023 karena hasil pengolahan rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar PAUD Dikmas sebagai dasar perhitungan capaian target tahun 2023 sedang dalam proses pengolahan hasil oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Formula rumusan perhitungan sebagaimana berikut:

$$\text{Minimal B Bobot} = \frac{(0,5 \times An) + (0,35 \times (Bn + Tn)) + (0,15 \times Cn)}{\text{total sekolah tahun } n} \times 100$$

Keterangan :

An : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun n

Bn : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun n

Cn : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun n

Tn : Jumlah sekolah terakreditasi di Tahun n

$$\text{IKK 1.1} = \text{Minimal B Bobot Tahun 2023} - \text{Minimal B Bobot Tahun 2022}$$



### 3. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	0,96	49%

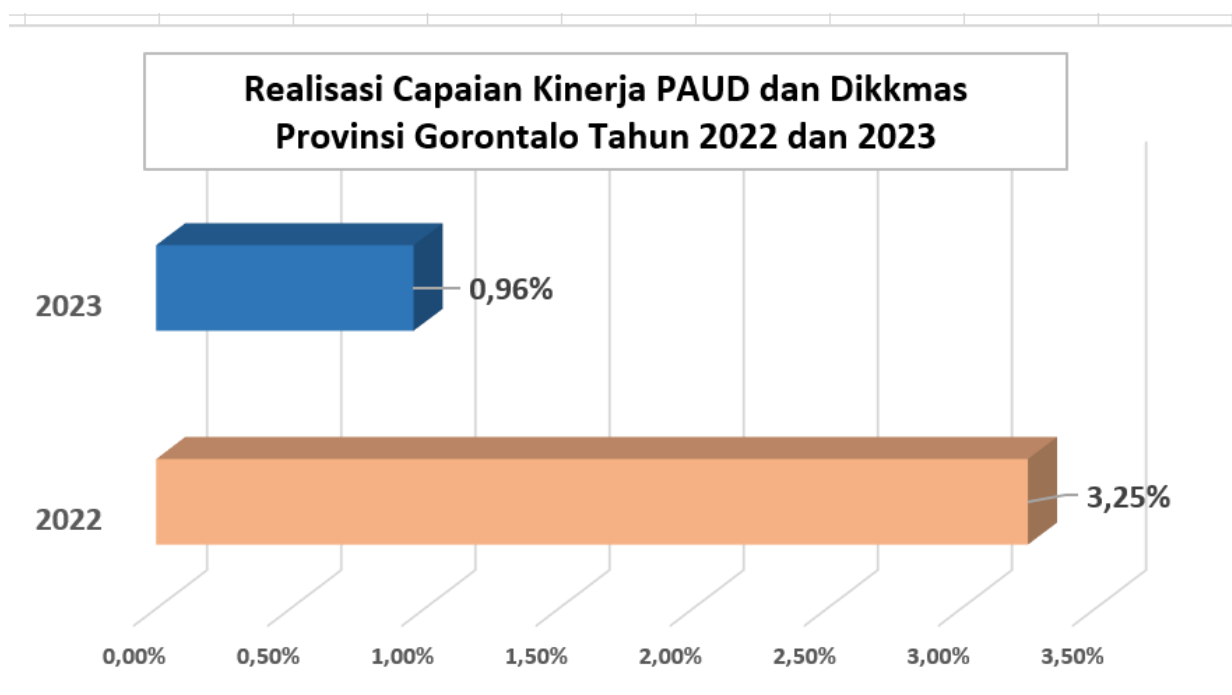
### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Status	Data Akreditasi Sekolah PAUD Dikmas 2023	Data Akreditasi Sekolah PAUD Dikmas 2022
Akreditasi A	95	78
Akreditasi B	899	864
Belum Terakreditasi	0	0
Akreditasi C	472	515
Tidak di isi	69	78
Tidak Terakreditasi	5	8
<b>Total</b>	<b>1540</b>	<b>1543</b>

Berdasarkan tabel diatas, jumlah satuan PAUD Dikmas yang terakreditasi A di tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 95 satuan PAUD dibandingkan dengan satuan PAUD yang terakreditasi A di tahun 2022 yang berjumlah hanya 78. Sama halnya dengan satuan PAUD yang terakreditasi B yang juga mengalami peningkatan yakni sebanyak 899 dibandingkan dengan satuan PAUD Dikmas yang terakreditasi B di tahun 2022 yang hanya berjumlah 864 sekolah. Di tabel juga terlihat bahwa satuan PAUD Dikmas yang



terakreditasi C di tahun 2023 lebih sedikit yakni sejumlah 472 dibandingkan dengan jumlah satuan PAUD Dikmas yang terakreditasi C di tahun 2022 yang masih berjumlah 515. Untuk data satuan PAUD Dikmas yang tidak mengisi data di tahun 2023 juga menjadi lebih sedikit yakni sebanyak 69 dibandingkan dengan satuan PAUD Dikmas yang tidak mengisi pada tahun 2022 yang berjumlah 78. Jumlah satuan PAUD Dikmas yang tidak terakreditasi di tahun 2023 juga menjadi lebih sedikit yakni sebanyak 5 satuan PAUD Dikmas dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 8 satuan PAUD DIKMAS. Dengan demikian 94% sekolah jenjang PAUD Dikmas di Provinsi Gorontalo masih membutuhkan intervensi untuk ditingkatkan mutunya ke status selanjutnya.



Berdasarkan grafik terlihat bahwa Realisasi capaian target IKK 1.1 di Provinsi Gorontalo berdasarkan perbandingan nilai akreditasi tahun 2022 ke tahun 2023 mencapai 0,96% dari target 2023 sebesar 1,96% dengan persentase capaian sebesar 49,08%. Sedangkan perbandingan Nilai Akreditasi tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 3,25% dari target 2022 sebesar 0,98% dengan persentase capaian sebesar 332%. Mengacu dari hasil capaian tahun 2023 perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan pendidikan PAUD Dikmas sesuai target capaian akhir renstra sebesar 3,92% atau membutuhkan kenaikan capaian mutu sebesar 2,96% dari nilai capaian target saat ini.



## 5. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Persentase capaian target akhir Renstra dengan realisasi tahun 2023 sebesar 24,49%, seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target Akhir Renstra	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96%	0,96%	49%	3,92%	24,49%

## 6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Pencapaian IKK 1.1 tersebut didukung beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan BPMP Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

- 1) Advokasi Stakeholder PAUD
- 2) Pemantauan Persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional
- 3) Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan BOSP melalui Arkas
- 4) Pendampingan PBD Rapor Pendidikan di satuan pendidikan
- 5) Monitoring dan Observasi Satuan Pendidikan Binaan Gerakan Sekolah Sehat
- 6) Penggalangan Mitra Pembangunan Daerah
- 7) Pendampingan Sekolah Piloting Program Transisi PAUD-SD yang menyenangkan
- 8) Pendampingan Sekolah Binaan Sekolah Sehat
- 9) Festival Belajar.id



## 7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Dalam pencapaian IKK 1.1. terdapat beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target indikator Kinerja, diantaranya :

1. Satuan PAUD Dikmas belum melakukan update penginputan akreditasi di aplikasi dapodik yang dipakai sebagai salah satu unsur perhitungan pencapaian target IKK 1.1. Data awal akreditasi dan data berdasarkan hasil penetapan akreditasi 2023 Provinsi Gorontalo, terlihat pada tabel di bawah ini :

Status	Data Akreditasi Sekolah PAUD Dikmas 2023 berdasarkan Data PAUD Dasmem	Data Akreditasi Sekolah PAUD Dikmas 2023 berdasarkan Hasil Penetapan Akreditasi 2023	Keterangan
Akreditasi A	95	95	
Akreditasi B	899	987	$899 + 88^{*)} = 987$
Belum Terakreditasi	0	0	
Akreditasi C	472	384	$472 - 88^{*)} = 384$
Tidak di isi	69	69	
Tidak Terakreditasi	5	5	
<b>Total</b>	<b>1540</b>	<b>1540</b>	

\*) 88 Jumlah Satuan PAUD Dasmem yg mengalami peningkatan Nilai Akreditasi dari Nilai C ke Nilai B pada tahun 2023, namun belum terupdate di Dapodik.

Data Kenaikan Akreditasi ke Minimal B berdasarkan Hasil Akreditasi Tahap I dan tahap II Tahun 2023, terlihat pada tabel berikut :

Akreditasi Tahun 2023	Naik Akreditasi ke Nilai Minimal B	Total Akreditasi Minimal B
Tahap 1	37	<b>88</b>
Tahap 2	51	



Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan satuan PAUD Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya menjadi 88 satuan PAUD Dikmas, berdasarkan data tabel di atas maka persentase ketercapaian sebesar 108,72% dan realisasi capaian IKK 1.1 sebesar 2,13% dari target 2023 1,96%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Target IKK 1.1 BPMP Provinsi Gorontalo tahun 2023 dapat dicapai bahkan melebihi target, terlihat pada tabel berikut :

Indikator	Target Renstra dan PK 2023	Realisasi 2023	% Realisasi	Target Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96%	2,13%	108,72%	3,92%	54,34%

2. Hasil akreditasi sekolah yang dipakai sebagai dasar perhitungan akreditasi pencapaian IKK 1.1. kurang tepat karena penilaian akreditasi sekolah dilaksanakan 5 tahun sekali, sehingga ada sekolah yang telah naik mutu pembelajarannya namun belum terukur karena tidak masuk dalam sasaran akreditasi di tahun 2023.

**8. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah kinerja tersebut adalah:**

- 1) Pengisian Sulingjar belum dilakukan secara maksimal oleh satuan PAUD Dasmen;
- 2) Hasil Penetapan Akreditasi tahap 1 dan 2 oleh BAN PAUD PNF, belum terupdate di Data Dapodik tahun 2023;
- 3) Satuan PAUD Dikmas belum memahami pentingnya akreditasi.
- 4) Hasil akreditasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh satuan pendidikan maupun pemangku kebijakan;



## **9. Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja**

- 1) Melakukan pendampingan satuan PAUD Dasmen untuk optimalisasi pengisian Sulingjar;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Tim Dapodik Diknas Kab/Kota agar segera melakukan updating data Dapodik;
- 3) Memberikan advokasi dan sosialisasi terkait pentingnya Akreditasi;
- 4) Melakukan advokasi terkait pemanfaatan hasil akreditasi.

## **10. Strategi ke depan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja tersebut adalah :**

- 1) Pemantauan pelaksanaan pengisian Sulingjar yang akan di jadikan salah satu indikator pengukuran capaian kinerja;
- 2) Pendampingan pengukuran ketercapaian, kurasi dan kualitas data Dapodik secara optimal;
- 3) Advokasi Satuan PAUD Dasmen terkait kesiapan akreditasi;
- 4) Evaluasi pemanfaatan hasil Akreditasi.

# **IKK 1.2**

## **Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**

### **1. Definisi Operasional**

Sesuai Permendikbudristek no. 13 Tahun 2022 bahwa salah satu indikator kinerja kegiatan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan adalah Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Rapor Pendidikan digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan



kualitas pendidikan. Data yang disajikan objektif dan andal karena laporan tersaji secara otomatis dan terintegrasi. Rapor pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik evaluasi internal maupun eksternal yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (*output*).

## 2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Metode perhitungan capaian target adalah persentase jumlah satuan Dikdas dan Dikmen yang meningkat rapor pendidikannya dibandingkan dengan jumlah satuan Dikdas dan Dikmen pada Provinsi/Kabupaten.

Realisasi Persentase Provinsi yang meningkat rapor pendidikannya didapatkan dengan rumus sbb

$$\frac{\text{jumlah kab kota dengan predikat tuntas muda}}{\text{jumlah kab kota se prov gorontalo}} + \frac{\text{jumlah kab kota dengan predikat belum tuntas}}{\text{jumlah kab kota se prov gorontalo}} \times 100$$

## 3. Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	100	333%



#### 4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja

Wilayah	Indeks SPM 2021	Label SPM 2021	Indeks SPM 2022	Label SPM 2022
Kab. Gorontalo	55,49	Belum Tuntas	59,60	Tuntas Muda
Kab. Boalemo	54	Belum Tuntas	61,28	Tuntas Muda
Kab. Bone Bolango	53,07	Belum Tuntas	63,07	Tuntas Muda
Kota Gorontalo	55,65	Belum Tuntas	61,10	Tuntas Muda
Kab. Pohuwato	53,12	Belum Tuntas	57,76	Belum Tuntas
Kab. Gorontalo Utara	52	Belum Tuntas	52,59	Belum Tuntas
Provinsi Gorontalo	46,47	Belum Tuntas	47,88	Belum Tuntas

Berdasarkan perbandingan capaian indeks SPM tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian target IKK 1.2 di Provinsi Gorontalo telah melebihi dari target yang ditetapkan. sebaran indeks standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 dan tahun 2022, realisasi capaian target IKK 1.2 di Provinsi Gorontalo telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dengan persentase capaian sebesar 333%, dimana kategori capaian SPM 2022 yang mencakup pelayanan dasar telah dicapai oleh 4 (empat) Kabupaten Kota dari tujuh wilayah di Provinsi Gorontalo dengan Label indeks SPM Tuntas Muda, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Sedangkan 3 (tiga) wilayah lainnya yaitu Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato masih dengan Label indeks SPM Belum Tuntas.

Dari target capaian 30%, terealisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 333%. Namun demikian, meskipun telah mencapai target renstra tahun 2024 yaitu sebesar 35%, kedepan tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan Dikdas dan Dikmen sesuai target yang telah dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 100% Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya berdasarkan capaian indeks SPM Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024.



5. Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra beserta penjelasan Indikator Kinerja

Indikator	Target Renstra dan PK 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30%	100%	333%	35%	286%

6. Analisis Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target IKK 1.2, BPMP Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan yang dibagi menjadi 7 (tujuh) program prioritas :



**Sosialisasi Pendaftaran IKM**

**Hasil :**

Tersosialisasinya pendaftaran IKM ke seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten /Kota dapat mendorong satuan pendidikan didaerahnya masing-masing untuk mendaftar IKM



**Workshop 6 strategi IKM bagi Pengawas**

**Hasil :**

Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan Kurikulum Merdeka; Menguatnya pelaksanaan optimalisasi dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka; Kesamaan persepsi Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila; Meningkatnya pemanfaatan PMM oleh satuan pendidikan ; Dokumen Rencana Aksi.



**Monitoring dan Evaluasi Buku Bacaan Bermutu**

**Hasil :**

Adanya data sekolah terkait keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan program Buku Bacaan Bermutu oleh Kemendikbudristek; Adanya aspek yang disasar pada monitoring satuan pendidikan dapat terpantau secara maksimal; Terdapat peningkatan minat baca siswa. setelah pendistribusian buku bacaan Bermutu; Level 1 dan 2 Literasi siswa meningkat minimal ke level 3 pada asesmen nasional tahun 2023.

## RAPAT PMO DAERAH

### HASIL :

Tertindakannya rapat rutin PMO Bulan setiap bulan. Rapat ini menghasilkan beberapa informasi penting yang tersampaikan kepada dinas terkait, khususnya dalam hal penggantian Kepala Sekolah Penggerak, Serta komitmen Dinas dalam melaksanakan program merdeka belajar semakin meningkat.

## RAPAT AWAL PEMBAHASAN BERSAMA BGP ANALISIS DELTA NILAI RAPOR PSP TAHUN 2021 - 2022

### HASIL :

- Terwujudnya penyamaan persepsi terkait pengolahan dan analisis rapor pendidikan
- Tersampainya program kerja BPMP Provinsi Gorontalo
- Tersampainya poin-poin yang diharapkan dapat menjadi perhatian BGP dalam pelaksanaan program kerja bersama

## AUDIENSI BERSAMA BGP, DINAS KOTA GORONTALO KE PEMERINTAH DAERAH

### HASIL

- Progres capaian Sekolah Penggerak angkatan 1 telah tersampaikan
- Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan hasil evaluasi sekolah penggerak angkatan 1
- Kepala BGP, Kepala BPMP telah menyampaikan program handover PSP angkatan 1 yang akan memasuki tahun ke 4
- Walikota menyambut baik progres psp di Kota Gorontalo dan proses handover

## SINKRONISASI DAN KOLABORASI KEBIJAKAN MB BERSAMA PEMDA

### HASIL

- Terciptanya sinergitas dan keselarasan Kebijakan Program Merdeka Belajar
- 2. Terjaringnya aspirasi dan permasalahan yang terjadi pada implementasi Program Merdeka Belajar di daerah;
- 3. Terhimpunnya Rencana Tindak Lanjut Program Merdeka Belajar di Daerah.

# PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

## FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK TAHUN 2023

### HASIL

- Tersedianya Video Praktik Baik terbaik yang dipilih dari masing-masing kelas
- Terwujudnya Komitmen bersama dari unsur pemangku kepentingan dan seluruh sekolah penggerak dalam rangka terus melaksanakan program sekolah penggerak secara berkesinambungan

## KOORDINASI SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PSP ANGGARAN 1 DAN 2

### HASIL :

- Semua sekolah penggerak telah melaksanakan program PSP
- Beberapa satuan pendidikan psp telah melakukan pengimbasan disekolah sekitar
- Dinas Pendidikan Kota Gorontalo telah menerbitkan SK pengimbasan
- Rapor pendidikan sekolah penggerak Kab. Pohuwato, Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo pelaksana PSP angkatan 1 dan 2 memperlihatkan progres yang baik, tetapi ada beberapa psp yang menurun nilai rapornya
- Sekolah penggerak telah menyiapkan praktek baik yang dapat diimbaskan pada sekolah lainnya

## PENGUMPULAN DATA TRAINING NEED ASESMEN (TNA) YANG DILAKSANAKAN DI SELURUH SEKOLAH PENGGERAK ANGGARAN 1

### HASIL

- Kepala sekolah telah melakukan refleksi berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh para guru.
- Pada pelaksanaan project, kepala sekolah telah melakukan refleksi terhadap tingkat partisipasi siswa berdasarkan masukan-masukan yang dilakukan bersama para guru.
- Akar masalah dilakukan dengan melihat hasil dari asesmen yang termuat dalam rapor pendidikan.
- Dalam merumuskan solusi berdasarkan hasil analisis akar masalah Kepala sekolah mengumpulkan seluruh guru di Komite Pembelajaran, Pengawas sekolah dan perwakilan siswa untuk membahas masalah yang dihadapi dan menjawab permasalahan yang muncul. Sehingga solusi yang didapatkan adalah solusi yang sudah disepakati bersama untuk dijalankan.
- Sekolah memiliki komunitas belajar yaitu komunitas belajar SMP 1, Komunitas belajar berlian (khusus bagi guru GTT), komunitas belajar khusus bagi guru penggerak

## MONITORING PELAKSANAAN PENGIMBASAN

### HASIL

- Pemerataan pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka dapat terlaksana bagi sekolah-sekolah pelaksana IKM mandiri.
- Proses pengimbasan Sekolah Penggerak sebagai katalis bagi sekolah-sekolah sekitar dapat terlaksana di wilayah kab. Pohuwato maupun Kota Gorontalo

# TRANSFER DAERAH



01

## Peningkatan Penggunaan ARKAS 4.0 dan SIPLah serta Percepatan Penyaluran Dana BOS

Hasil :

- Tersampaikan kebijakan pencapaian penggunaan arkas kepada admin markas.
- Dipahaminya kebutuhan sekolah dalam menggunakan arkas 4.0
- Penggunaan Arkas 4.0 dirasakan sangat dibutuhkan karena dari segi kemudahan
- Rencana tindak lanjut bagi Admin markas dalam penggunaan Arkas 4.0

02

## Pendampingan penggunaan dan pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan SIPLah

Hasil :

Satuan Pendidikan segera menggunakan Arkas 4.1 dan membuat perencanaan Tahap 1 Pada Lembar kerja Arkas dan kemudian di Sahkan oleh Dinas untuk menjadi kegiatan sekolah di TA 2024.



03

## Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan BOSP melalui ARKAS

Hasil :

- Meningkatnya pemahaman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pengeseran dan perubahan RKAS, pelaporan serta pertanggungjawaban ARKAS 4.1 satuan pendidikan;
- Peserta lebih mengenali sistem pembelanjaan di SIPLah
- Meningkatnya pemahaman pentingnya Evaluasi Diri menuju PAUD berkualitas



## ASESMEN NASIONAL

### RAKORTEK ASESMEN NASIONAL DAN PEMBEKALAN PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN UNTUK PENINGKATAN DELTA AN TAHUN 2023

Hasil

- Peserta memiliki penguatan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan AN dalam pemetaan kualitas sistem pendidikan di Indonesia;
- Para pemangku kepentingan di daerah dapat saling berkoordinasi dan berkolaborasi, baik secara teknis dan administratif dalam menyiapkan AN, agar dapat berjalan sesuai dengan POS AN 2023;
- Terpenuhinya Progress peningkatan Adoption Rate Rapor Pendidikan;
- Terpahaminya peserta terhadap pemanfaatan Rapor Pendidikan;
- Tim Tata Kelola Dinas Pendidikan mampu melakukan Analisis Perencanaan Berbasis Data berdasarkan Rapor Pendidikan sehingga mampu merencanakan program / kegiatan sekolah yang tepat sasaran dan dituangkan ke dalam ARKAS.

### PEMANTAUAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN AN DI DAERAH

Hasil

- Diperolehnya gambaran tentang keikutsertaan peserta didik pada pelaksanaan AN nanti
- Diperolehnya gambaran tentang bagaimana peran dan tanggungjawab Dinas Pendidikan pada pelaksanaan AN
- Diperolehnya gambaran tentang kesiapan infrastruktur yang digunakan satuan pendidikan pada pelaksanaan AN nanti

## PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAERAH

### HASIL :

- Terbangunnya kesadaran pentingnya tentang hadirnya Rapor Pendidikan sebagai sumber utama dalam menilai capaian mutu pendidikan yang telah diselaraskan dengan SPM Pendidikan.
- Terinformasinya fitur-fitur dalam Dashboard Metabase serta melakukan pendampingan analisis data Rapor Pendidikan Daerah untuk perencanaan daerah melalui penerapan SPM
- Terinformasinya fitur-fitur dalam Dashboard Metabase serta melakukan pendampingan analisis data Rapor Pendidikan Daerah untuk perencanaan daerah melalui penerapan SPM
- Terbangunnya kesadaran seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk melakukan aksi nyata dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD) dalam rangka penerapan SPM Pendidikan.

## PENDAMPINGAN PBD RAPOR PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN

### HASIL :

- Tersosialisasikannya hasil Rapor Pendidikan Tahun 2022 Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan di lingkup Bappeda, BPKAD dan Dinas Pendidikan
- Tersosialisasikannya materi-materi kegiatan Rakor Rapor Pendidikan Dan PBD untuk Pemda Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dari tanggal 28 - 31 Agustus di Kota Makasar.
- Tersusunnya Dokumen Rencana Program/Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk RAPBD Perubahan Tahun 2023 sebagai tindak lanjut hasil Rapor Pendidikan.

## TOT BIMTEK PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN

### HASIL

- Sebanyak 60 orang yang telah mengikuti TaT Bimbingan Teknis Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Melalui Penguatan Literasi Provinsi Gorontalo
- Peserta memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi terkait :
  1. Kebijakan Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui Penguatan Literasi
  2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru
  3. Memahami dan Menguatkan literasi
  4. Pnguatan Literasi Berbasis Teks Multimodal
  5. Strategi Pemanfaatan Bahan Baca Multimodal untuk penumbuhan Minat Baca
  6. Strategi Pemanfaatan Bahan Bacaan Multimodal untuk Penumbuhan minat baca

## BIMTEK PEMULIHAN DAN TRANSFORMASI PEMBELAJARAN MELALUI PENGUATAN LITERASI

### HASIL :

- Meningkatnya pemahaman peserta terkait strategi benahi literasi melalui Pembelajaran dan Asesmen
- Meningkatnya pemahaman peserta terkait Strategi benahi literasi melalui Lingkungan Belajar
- Tersusunnya rencana tindak lanjut untuk penguatan komunitas belajar

## REFLEKSI INTERVENSI PENGUATAN LITERASI UPT

### HASIL :

- Sebanyak 24 orang telah mengikuti kegiatan Pembekalan Refleksi Intervensi Pemulihan
- Pembelajaran BPMP Provinsi Gorontalo Tahun 2023
- Setelah mengikuti kegiatan Pembekalan Refleksi Intervensi Pemulihan Pembelajaran,
- Peserta dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait : SOP Refleksi Intervensi Pemulihan Pembelajaran; Overview Program Pemulihan Pembelajaran; Instrumen Refleksi Satuan Pendidikan; Instrumen Refleksi Dinas Pendidikan; Form Refleksi Awal Dinas Pendidikan; Format Laporan; Membedah Instrumen Refleksi Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan

## AUDIENSI DALAM RANGKA SINKRONISASI / KOLABORASI PROGRAM PEMULIHAN PEMBELAJARAN

### HASIL :

Terjalinnnya kolaborasi program terkait literasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi, Kab/Kota yang dapat dikerjasamakan/ dengan program peningkatan literasi di BPMP Prov. Gorontalo antara lain : Penyusunan bersama antara BPMP Prov. Gorontalo dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Program - Program Peningkatan literasi di satuan pendidikan literasi level 1 dan 2 untuk tahun anggaran 2024

## PELAKSANAAN FGD BERSAMA PEMDA DAN DPRD

### HASIL :

- Tersosialisasikannya hasil capaian Rapor Pendidikan Tahun 2021 pada Pemda dan DPRD Kabupaten / Kota / Provinsi Gorontalo
- Tersosialisasikannya regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan dan penganggaran semua indikator prioritas SPM bidang Pendidikan tahun 2023 dan 2024
- Kesepakatan bersama antara semua Organisasi Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dibidang pendidikan termasuk DPRD untuk mengawal bersama implementasi dan penganggaran semua indikator prioritas SPM Bidang Pendidikan di seluruh Kabupaten / Kota / Provinsi Gorontalo.

## COACHING CLINIC AKSES RAPOR PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN AKUN BELAJAR.ID

### HASIL :

- Terlaksananya Coaching Clinic Akses Rapor Pendidikan, Pemanfaatan Chromebook dan Akun Belajar.id kepada 397 operator sekolah
- Tersampainya strategi pelaksanaan pengimbasan di Kecamatan

# PERENCANAAN BERBASIS DATA

**Workshop perencanaan program transisi PAUD-SD, Gerakan Sekolah Sehat dan Transformasi Pendidikan Khusus**

**HASIL :**

- Tersusunnya Perencanaan RTL, Mekanisme Penyebaran Alat Bantu, Juknis PPDB, Pengaktifan FORKOM dan Koordinasi Sekolah Piloting, yang mendukung Gerakan Transisi PAUD-SD yang menyenangkan;
- Tersusunnya Komitmen Bersama Tindak Lanjut Gerakan Sekolah Sehat;
- Tersusunnya Komitmen Bersama Tindak Lanjut Transformasi Pendidikan Khusus;
- Tersampainya Informasi tentang Kampanye Sekolah Sehat

**Pendampingan untuk jenjang SD/SMP Kab/Kota terkait kebijakan program pendidikan inklusif**

**HASIL :**

- Sekolah mempunyai wawasan dan pemahaman yang sama terhadap pengelolaan transpormasi pendidikan khusus dan layanan iklim Inklusivitas.
- Adanya Rencana Aksi dari sekolah untuk menaikkan delta D10 transpormasi pendidikan khusus dan layanan iklim Inklusivitas.
- Adanya komitmen sekolah dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung program Kemendikbudristek dalam meningkatkan delta perolehan rapor pendidikan khususnya D10 pendidikan inklusif.

**Pendampingan Tes Kebugaran Siswa Indonesia (TKSI) di Sekolah Binaan Program Gerakan Sekolah Sehat**

**HASIL :**

- Terpetakan kebugaran peserta didik di satuan pendidikan piloting SD, SMP dan SMA di Provinsi Gorontalo
- Terinputnya data kebugaran peserta didik
- Terlaporkan hasil TKSI ke pusat
- Teridentifikasi kesehatan peserta didik
- Tersampainya TKSI ke semua sekolah piloting

**Pendampingan sekolah binaan Gerakan Sekolah Sehat(GSS)**

**HASIL :**

- Terlaksananya pendampingan kepada Satuan Pendidikan Piloting/binaan untuk dapat mengimplementasikan program Kampanye Sekolah Sehat fokus kepada 3S (Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi); Optimalisasi Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah; Pembiasaan Hidup Bersih Sehat (PHBS) terhadap warga Satuan Pendidikan;

**Advokasi dan Kemitraan Program Transisi PAUD-SD**

**HASIL :**

- Adanya penguatan kepada Pengawas Sekolah tentang pencapaian target 3 program transisi PAUD-SD, sehingga dapat mendampingi sekolah binaannya dalam pengimplementasian program transisi PAUD-SD
- Tercapainya target tiga tentang penyelarasan proses pembelajaran pada pada tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru yang dapat membangun enam kemampuan fondasi anak sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat

**Pendampingan Sekolah Piloting Program Transisi PAUD-SD Tahun 2023**

**HASIL :**

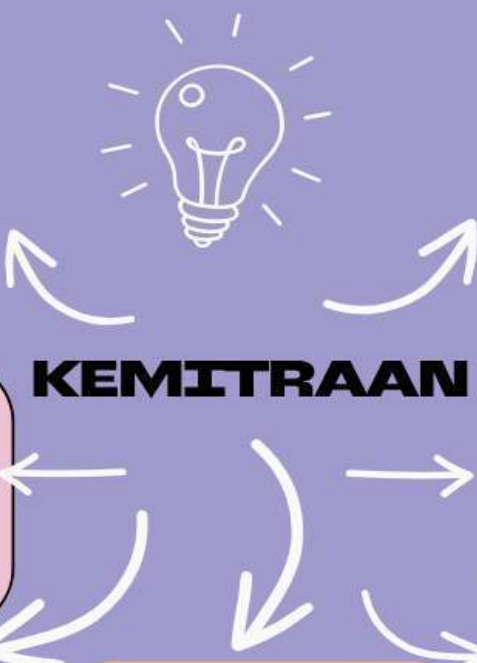
- Tercapainya objective PDM 09 yaitu 10% satuan pendidikan (PAUD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru
- Tercapainya objective PDM 9 yaitu 10% satuan pendidikan (SD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru.
- Terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pembinaan 6 kemampuan fondasi sehingga dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat.

**Pembahasan Rancangan PerGub terkait KMB**

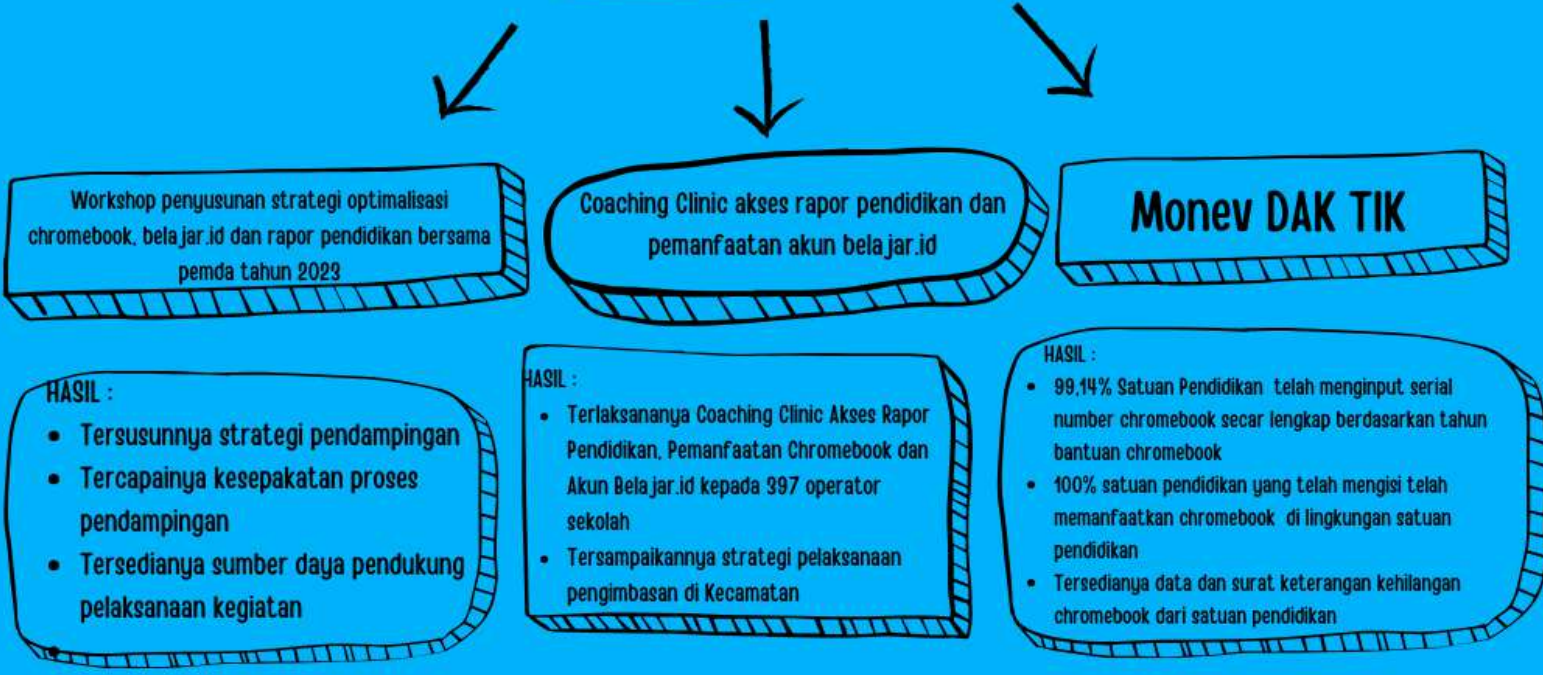
**HASIL :**

- Terlaksananya pembahasan rancangan PerGub dalam bentuk draft rancangan yang memuat kesepakatan judul, dasar hukum, isi, sasaran, evaluasi dsb

**KEMITRAAN**



**DIGITALISASI**



**Workshop penyusunan strategi optimalisasi chromebook, bela.jar.id dan rapor pendidikan bersama pemda tahun 2023**

**HASIL :**

- Tersusunnya strategi pendampingan
- Tercapainya kesepakatan proses pendampingan
- Tersedianya sumber daya pendukung pelaksanaan kegiatan

**Coaching Clinic akses rapor pendidikan dan pemanfaatan akun bela.jar.id**

**HASIL :**

- Terlaksananya Coaching Clinic Akses Rapor Pendidikan, Pemanfaatan Chromebook dan Akun Bela.jar.id kepada 397 operator sekolah
- Tersampainya strategi pelaksanaan pengimbasan di Kecamatan

**Monev DAK TIK**

**HASIL :**

- 99,14% Satuan Pendidikan telah menginput serial number chromebook secara lengkap berdasarkan tahun bantuan chromebook
- 100% satuan pendidikan yang telah mengisi telah memanfaatkan chromebook di lingkungan satuan pendidikan
- Tersedianya data dan surat keterangan kehilangan chromebook dari satuan pendidikan

## **7. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja**

Berdasarkan realisasi pencapaian target indikator kinerja tentang Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) BPMP Provinsi Gorontalo telah mencapai 100% dari target 30%. Beberapa faktor penyebab keberhasilan capaian ini antara lain adanya pendampingan asimetris yang berkaitan dengan perencanaan berbasis data baik satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, penguatan literasi dan numerasi, pembelajaran paradigma baru dan pemanfaatan tiga platform program prioritas kemendikbudristek (SDS, PMM dan Rapor Pendidikan).

## **8. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja**

- 1) Rendahnya pemahaman dan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di lingkup Bappeda dan BPKAD serta di Dinas Pendidikan terkait;
- 2) Terlambatnya sosialisasi/penguatan regulasi-regulasi dari Kemdikbudristek tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Kesadaran akan pentingnya Rapor Pendidikan sebagai sumber utama dalam menilai capaian mutu pendidikan yang telah diselaraskan dengan SPM belum maksimal;
- 4) Keterbatasan fiskal daerah untuk pemenuhan seluruh sub kegiatan SPM bidang pendidikan tahun 2024.

## **9. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja**

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, antara lain :

- 1) Penguatan dan sosialisasi yang berkesinambungan dari Kementerian terkait (Kemendagri dan Kemenkeu) kepada seluruh pemangku kepentingan tentang



tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di lingkup Bappeda dan BPKAD serta di Dinas Pendidikan terkait;

- 2) Sosialisasi awal terkait perubahan – perubahan regulasi-regulasi dari Kemdikbudristek tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Pendampingan akan pentingnya Rapor Pendidikan Pemda sebagai satu – satunya sumber dalam dalam menilai capaian mutu pendidikan yang telah diselaraskan dengan pemenuhan SPM;
- 4) Mendorong OPD teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan, BAPPEDA dan BPKAD untuk lebih berperan aktif dalam merancang kegiatan yang menunjang SPM bidang pendidikan yang benar-benar berdasarkan hasil capaian Rapor Pendidikan.

#### **10. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**

Strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja tersebut adalah :

- 1) Pembentukan Tim Khusus internal Dinas Pendidikan yang berfokus pada perencanaan, penganggaran dan monitoring pelaksanaan program - program Dinas Pendidikan khususnya pada pemenuhan indeks SPM bidang pendidikan;
- 2) Koordinasi dan kolaborasi antar semua OPD terkait dengan perubahan regulasi-regulasi dari Kemdikbudristek tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota;
- 3) Pendampingan Perencanaan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan fitur – fitur Rapor Pendidikan daerah dalam menyusun Perencanaan dan anggaran yang diselaraskan dengan pemenuhan SPM;
- 4) Koordinasi dan kolaborasi antar semua OPD terkait untuk menyusun strategi penganggaran kegiatan dengan kondisi keterbatasan dana sesuai kondisi fiskal daerah.



## Sasaran Kegiatan 2

**‘Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo’**



Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	A	A	100%



## IKK. 2.1

### Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo

#### 1. Definisi Operasional

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari 8 program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyatakan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

#### 2. Cara perhitungan indikator kinerja

Untuk menghitung indikator kinerja adalah dengan mengevaluasi implementasi SAKIP menggunakan instrumen yang meliputi 4 komponen sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

NILAI	PREDIKAT	INTERPRETASI
>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
>80 – 90	A	Memuaskan
>70 – 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup
>30 – 50	C	Kurang
>0 – 30	D	Sangat Kurang

Target predikat SAKIP BPMP Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah A. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPMP Provinsi Gorontalo meraih predikat A dalam implementasi SAKIP dengan bobot penilaian 83,95. Nilai ini mengalami peningkatan bobot sebanyak 1,15 dari perolehan nilai tahun 2022 yakni 80,82 dengan predikat A. Dengan ini, maka target di akhir periode renstra telah dapat dicapai oleh BPMP Provinsi Gorontalo.

Terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh evaluator sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP Lembaga kedepannya. Catatan dan Rekomendasi tersebut terlihat pada tabel di bawah ini :



PROGRAM/ KEGIATAN	DESKRIPSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<p>Melakukan tahapan implementasi SAKIP yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan - menyiapkan dokumen perencanaan yang terdiri dari : rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kerja dan rencana aksi;</li> <li>2. Pengukuran capaian kinerja - mengukur ketercapaian target triwulan yang telah ditetapkan melalui aplikasi SPASIKITA (SIMPROKA);</li> <li>3. Laporan kinerja - mengidentifikasi unsur-unsur yang harus dimuat dalam laporan kinerja instansi serta melihat bagaimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;</li> <li>4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal-Melakukan tindaklanjut terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum melakukan reviu renstra tahun 2023.</li> <li>● Masih terdapat beberapa dokumen fisik yang belum terdokumentasi dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk melakukan reviu renstra dan reviu Lakip tahun 2022 dan memformalkan</li> <li>● Melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam implementasi SAKIP satuan kerja.</li> </ul>
Melakukan Reviu Dokumen & LHE	Melaksanakan reviu atas kelengkapan dokumen pendukung SAKIP di unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Belum semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan melalui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan koordinasi dengan dengan pimpinan satker terkait beberapa catatan dan rekomendasi pada lembar hasil evaluasi untuk menjadi prioritas utama dan ditindaklanjuti pada tahun 2024</li> </ul>



Terhadap penyelenggaraan SAKIP BPMP Gorontalo di tahun 2023, Inspektorat Jenderal memberikan penilaian dan catatan sebagai mana tertuang dalam Lembar Hasil Evaluasi berikut ini :



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
BPMP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24.6
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24.6
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>	<b>83.95</b>

No	Komponen	Catatan	Rekomendasi
1.	PERENCANAAN KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Pendek dan Menengah serta dokumen perencanaan aktivitas dan anggaran telah tersedia lengkap dan mendukung kinerja.</li> <li>• Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja individu (SKP) namun dokumen perencanaan kinerja pegawai belum memuat matriks peran hasil dan hasil penilaian kinerja, sehingga belum dapat tergambar cascading perencanaan kinerja dari PK Pimpinan di atasnya serta belum dapat terlihat komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.</li> <li>• Hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antarbidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar melengkapi dokumen perencanaan kinerja pegawai dengan matriks peran hasil dan hasil penilaian kinerja pegawai, sehingga dapat tergambar cascading perencanaan kinerja dari PK Pimpinan di atasnya serta komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.</li> <li>• Agar dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023 dilengkapi atau memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas antarbidang/ dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).</li> </ul>



		<p>telah tergambar dalam LAKIN tahun 2022, namun belum tergambar dalam dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2023.</p>	
2.	PENGUKURAN KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan Pengukuran Kinerja belum disusun sesuai dengan ketentuan (dilengkapi dengan notula, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan), keterlibatan pimpinan belum terlihat jelas, hanya tergambar dalam rekomendasi saja.</li> <li>● Laporan Pengukuran Kinerja belum menunjukkan bahwa pemantauan atas pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berjenjang</li> <li>● Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan/atau punishment. Pemberian penghargaan baru didasarkan pada kedisiplinan saja, dan belum terdapat bukti penerapan punishment.</li> <li>● Pimpinan telah melakukan penataan pegawai di internal organisasi berupa mutasi pegawai, namun bukti dukung baru berupa SK mutasi saja, belum dilengkapi dengan dokumen usul mutasi sebagai dasar yang menunjukkan mutasi tersebut didasarkan pada capaian kinerja pegawai bersangkutan</li> <li>● Dokumen SKP yang diunggah adalah SKP tahun 2021 (belum merupakan SKP yang terbaru)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agar dalam menyusun Laporan Pengukuran Kinerja sesuai dengan ketentuan (dilengkapi dengan notula, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan), serta memastikan keterlibatan pimpinan dapat tergambar dengan jelas dalam laporan.</li> <li>● Agar dalam melaksanakan pemantauan atas capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dan memastikan pemantauan berjenjang tersebut dapat tergambar dalam Laporan Pengukuran Kinerja</li> <li>● Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja digunakan sebagai dasar pemberian reward dan/atau punishment, bukan hanya terkait kedisiplinan saja.</li> <li>● Agar melengkapi bukti dukung terkait penataan pegawai dengan dokumen usul/ perencanaan penataan pegawai sebagai dasar yang menunjukkan penataan didasarkan pada capaian kinerja pegawai.</li> <li>● Agar dalam mengunggah bukti dukung dipastikan merupakan bukti dukung yang terkini, yaitu dokumen SKP tahun 2023</li> </ul>



3.	PELAPORAN KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat dokumen laporan kinerja yang memenuhi standar pelaporan dan telah menjadi dasar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja selanjutnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti tetapi masih terdapat tindak lanjut yang belum tepat, yaitu pemberian reward dan punishment berdasarkan pengukuran/capaian kinerja.</li> <li>• Unit Kerja belum melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar memastikan dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya telah sesuai dengan rekomendasi.</li> <li>• Agar hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun sebelumnya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.</li> </ul>

Perolehan nilai SAKIP BPMP Provinsi Gorontalo diperoleh melalui berbagai upaya, yakni :

1. Menyiapkan bahan dokumen perencanaan yang terdiri dari pedoman penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja dan rencana aksi.
2. Melakukan monitoring, pemantauan dan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan serta pelaporan secara tepat waktu.
3. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data kinerja yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja instansi.

Peningkatan nilai SAKIP BPMP Provinsi Gorontalo tahun 2023 tentunya tidak lepas dari faktor-faktor penunjang yang sangat berpengaruh terhadap kualitas implementasi SAKIP unit kerja. Faktor penunjang tersebut adalah komitmen dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada di unit kerja, mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana.

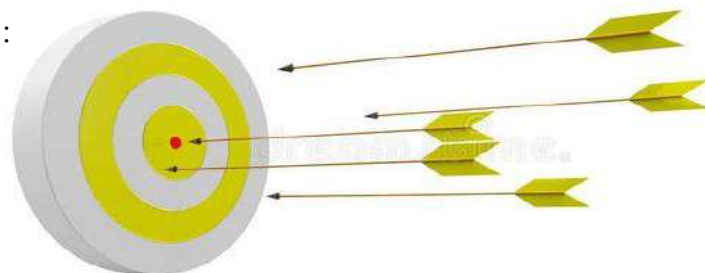


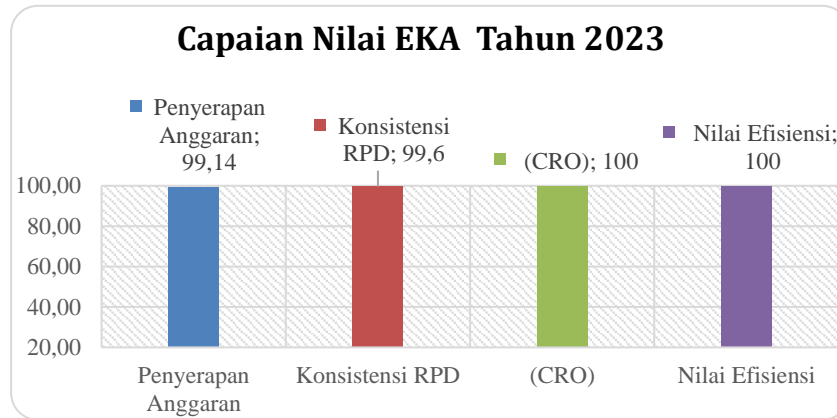
Dalam proses pencapaian target SAKIP terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah adanya beberapa dokumen fisik yang belum terdokumentasi dengan baik. Namun kendala tersebut dapat segera teratasi dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak yang ada di satuan kerja sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat dipenuhi.

## IKK 2.2

### Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan alat monev kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. IKPA diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dari sisi teknis administratif pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA terdiri atas komponen: Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran (14%), Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (41%), Kepatuhan Terhadap Regulasi (30%), dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan (15%). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA terdiri dari: Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks. Capaian NKA yang terdiri dari nilai EKA dan IKPA Provinsi Gorontalo tahun 2023, dapat dilihat pada diagram :





MONEVPA | halchat | LPMP GORONTALO T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	050	023	419510	BPMP PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	82.14	95.37	100.00	100.00	99.96	100.00	100.00	97.28	100%	97.28	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.21	19.07	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek		91.07			99.07			100.00				

Perbandingan capaian dan target NKA BPMP Gorontalo Tahun 2023, terlihat pada tabel berikut :

IKK	Realisasi 2022	2023			Target Renstra 2023	Capaian Renstra 2023 (%)
		Target	Realisasi	%		
2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	99,91	84	98,56	117,33	84	117,33



Nilai kinerja anggaran BPMP Gorontalo sebesar 98,56 diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 99,84 dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 97,28. Jika dibandingkan dengan capaian NKA tahun sebelumnya, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 1,35 karena kurang maksimalnya perolehan nilai pada komponen deviasi halaman III DIPA dan serapan anggaran yang disebabkan oleh :

- Adanya blokir anggaran pada belanja barang non operasional lainnya.
- Gaji dan tunjangan yang tidak terserap karena belanja pegawai untuk Widyaprada pindahan dari BGP yang teralokasi 3 bulan hanya terbayarkan 1 bulan.

Namun, walaupun terjadi penurunan NKA di tahun 2023, BPMP Provinsi Gorontalo masih menjadi satker dengan perolehan NKA tertinggi di lingkungan PAUD Dikdasmen.

Kegiatan yang mendukung perealisasi target kinerja terkait Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebagai berikut :

SUB OUTPUT	DESKRIPSI	REALISASI ANGGARAN (Rp)
Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Melaksanakan program kualitas dalam menjalankan tugas layanan penjaminan mutu Pendidikan pada satuan Dikdas dan Dikmen yang meliputi pelaksanaan pembinaan kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Transfer daerah, Sekolah penggerak, Perencanaan berbasis data, Kemitraan, dan Digitalisasi sekolah	7.793.731.828
Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Melaksanakan program kualitas dalam menjalankan tugas layanan penjaminan mutu Pendidikan pada satuan Paud dan Dikmas yang meliputi pelaksanaan pembinaan kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Transfer daerah, Sekolah penggerak, Perencanaan berbasis data, Kemitraan, dan Digitalisasi sekolah	789.155.945
Layanan Umum	Melaksanakan program dukungan manajemen dalam layanan dukungan manajemen internal yang meliputi pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan	365.796.500



Layanan Perkantoran	Melaksanakan program dukungan manajemen dalam layanan dukungan manajemen internal yang meliputi komponen belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan), serta layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang meliputi Operasional Kantor, Kebutuhan sehari-hari perkantoran, Pemeliharaan kantor, dan Langganan daya dan jasa	11.108.796.680
Layanan Sarana Internal	Melaksanakan program dukungan manajemen dalam layanan sarana internal yang meliputi Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50.000.000

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran, tentunya terdapat kendala yang dihadapi berupa belum maksimalnya capaian beberapa indikator nilai EKA dan IKPA. Adapun kendala permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terjadinya deviasi halaman III DIPA yang melebihi ambang rata-rata deviasi bulanan sebesar 5% akibat ketidakakuratan perencanaan RPD karena penundaan kegiatan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya;
- Pengelolaan UP kurang optimal karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit terkait yang berpengaruh pelaksanaan kegiatan.

Beberapa langkah strategi/tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana perjenis belanja per bulan;
- Mendorong akselerasi belanja berdasarkan pola penyerapan per jenis belanja per triwulan;
- Meningkatkan ketepatan pertanggungjawaban UP dan optimalisasi penggunaan UP;
- Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit terkait untuk mengantisipasi perubahan kebijakan atau kondisi yang tidak terduga.



## B. Realisasi Anggaran

### 1. Capaian Anggaran

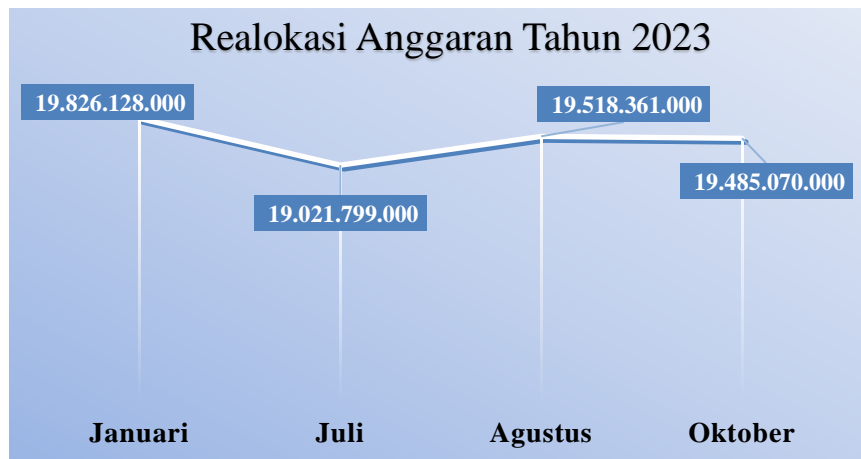
Pagu Anggaran bruto BPMP Provinsi Gorontalo dalam DIPA TA 2023 adalah sebesar Rp19.826.128.000. Pada tahun 2023 dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp341.058.000, sehingga pagu anggaran berdasarkan hasil revisi terakhir adalah sebesar Rp19.485.070.000. Realisasi belanja netto BPMP Provinsi Gorontalo TA 2023 sebesar Rp19.318.324.595 dengan rincian per jenis belanja sebagaimana tabel berikut :

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		Jumlah	%	
Belanja Pegawai	7.810.675.000	7.746.165.615	99,17	64.509.385
Belanja Barang	11.624.395.000	11.522.159.393	99,12	102.235.607
Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>19.485.070.000</b>	<b>19.318.325.008</b>	<b>99,14</b>	<b>166.744.992</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sisa anggaran sebesar Rp166.745.405 atau 0,86% dari pagu belanja yang merupakan sisa belanja pegawai dan belanja barang. Pada jenis belanja pegawai hal ini disebabkan terdapat mutasi pegawai dari BGP Provinsi Gorontalo ke BPMP Provinsi Gorontalo yang tidak dapat direalisasikan belanjanya karena terkait dengan kelengkapan administrasi. Sedangkan pada jenis belanja barang terdapat beberapa akun belanja yang tidak dapat direalisasikan.

Tahun 2023, BPMP Gorontalo beberapa kali mengalami realokasi anggaran. DIPA BPMP Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp 19.826.128.000, yang selanjutnya jumlah anggaran tersebut mengalami perubahan sebanyak 3 kali sehingga di akhir periode menjadi Rp 19.485.070.000. Realokasi anggaran tersebut terlihat pada tabel berikut :





Realokasi tersebut mencakup pengembalian blokir AA ke BA BUN pada belanja pegawai, penambahan anggaran belanja barang untuk program pemulihan pembelajaran, serta penambahan anggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji pegawai fungsional widyaprada pengalihan dari satker BGP Provinsi Gorontalo. Realisasi anggaran di tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

IKK	KRO	Satuan Volume	Alokasi	Realisasi	%
IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.865.346.000	7.793.731.828	99,09
IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)					
IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.569.724.000	11.474.592.767	99,18



IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket	50.000.000	50.000.000	100,00
<b>Total</b>			<b>19.485.070.000</b>	<b>19.318.324.595</b>	<b>99,14</b>

Tren rencana dan realisasi penyerapan anggaran BPMP Provinsi Gorontalo pada tahun TA 2023 dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Sumber: <https://mol.kemdikbud.go.id/2023/?op=1>

## 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023 BPMP Gorontalo melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 4.063.759.405 atau 20,86% dari total anggaran Rp 19.485.070.000. Efisiensi tersebut dicapai melalui berbagai cara berupa penyederhanaan kegiatan baik dengan cara penggabungan, modifikasi teknis dan moda pelaksanaan. Hasil efisiensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk upaya pencapaian sasaran sehingga dapat melebihi target yang telah ditetapkan pada masing-masing komponen rincian output sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :



NO	KEGIATAN/KRO/RO	DESKRIPSI EFISIENSI YANG DILAKUKAN	VOLUME SASARAN KRO		EFISIENSI ANGGARAN (RP)
			Target	Realisasi	
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	<p>Efisiensi dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penggabungan kegiatan yang memiliki sasaran yang sama dengan melakukan analisa keterkaitan pada program PDM seperti : a) PDM 01 &amp; 04A dalam kegiatan “Workshop penyusunan strategi peningkatan rapor pendidikan, pengimbasan dan kesinambungan Sekolah penggerak”; b) PDM 03B &amp; 04A dalam kegiatan “Coaching Clinic akses rapor pendidikan dan pemanfaatan akun belajar.id”; c) PDM 03B, 04A &amp; PDM 04B dalam kegiatan “Workshop penyusunan strategi optimalisasi chromebook, belajar.id dan rapor pendidikan bersama pemda tahun 2023”; d) PDM 06 &amp; PDM 04A dalam kegiatan “Rakortek Asesmen Nasional dan pembekalan pemanfaatan rapor pendidikan untuk peningkatan delta AN tahun 2023”; dan e) PDM 09,11 &amp; 12 dalam kegiatan “Workshop perencanaan program transisi PAUD-SD, Gerakan Sekolah Sehat dan Transformasi Pendidikan Khusus”.</li> <li>● Beberapa kegiatan koordinasi baik antar UPT</li> </ul>	1.346 Lembaga	1.624 Lembaga	1.644.683.372



		<p>maupun Pemerintah Daerah dilakukan dengan media Daring sehingga tidak memerlukan anggaran yang besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknis pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada beberapa PEMDA dapat terlaksana dengan kolaborasi bersama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PEMDA tersebut, dimana BPMP Gorontalo terlibat untuk menjadi narasumber, fasilitator maupun undangan. Kegiatan tersebut adalah a) “Pendampingan penggunaan dan pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan SIPLah” dimana ketercapaiannya dilaksanakan dalam kegiatan “Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) TA 2023” dan “Workshop Penyusunan RKT berbasis data Rapor Pendidikan sebagai dasar sekolah menyusun ARKAS 2024” yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo; b) “FGD Bersama PEMDA dan DPRD” dimana ketercapaiannya dilaksanakan dalam kegiatan “Seminar Awal Kajian SPM Bidang</li> </ul>		
--	--	--	--	--



		Pendidikan Tingkat TK-Paud, PNF, Pendidikan SD dan SMP” yang dilaksanakan oleh PEMDA Kab. Gorontalo dan “Rapat Evaluasi Pencapaian SPM Pendidikan Provinsi Gorontalo” yang dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Gorontalo.			
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Efisiensi pada komponen Layanan Dukungan Manajemen Internal yakni pada layanan umum dilakukan dengan penyesuaian anggaran antar kegiatan-kegiatan pelayanan umum, publikasi dan kegiatan pendukung manajemen internal seperti penguatan pengurus Asosiasi Widyaprada Indonesia, Working session penyusunan strategi program, Reviu POS, Reviu Renstra, Penyusunan SKP, Penyusunan ZI WBK Tahun 2023, dan pelayanan Kesehatan bagi PNS dan PPNPN	1 Layanan	2 Layanan	2.409.076.033
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Efisiensi pada layanan sarana internal dilakukan dengan pemanfaatan anggaran yang ada untuk memperoleh unit belanja modal yang maksimal	1 Unit	2 Unit	10.000.000



### 3. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/ Collaborative

#### o INOVASI

Tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo melakukan berbagai inovasi dalam mendukung pencapaian target serta meningkatkan layanan lembaga baik eksternal maupun internal.

#### 1. PAGATA (Pangkalan Gabungan Data)



**PAGATA**  
PANGKALAN GABUNGAN DATA

<http://dashboard.bmpgorontalo.id/>

**APA?**  
**PAGATA** adalah Aplikasi Web Dashboard Transformasi Digital Provinsi Gorontalo, sebagai Pangkalan Gabungan Data terkait Data Program Merdeka Belajar

**SIAPA?**  
Aplikasi ini dapat digunakan oleh stakeholder pendidikan yang membutuhkan informasi antara lain: Data Rapor Pendidikan, Data Akun belajar.id, RKT & Data Pengguna ARKAS

**MENGAPA?**  
Aplikasi ini memudahkan stakeholder untuk memperoleh informasi serta memantau progres capaian Program Merdeka Belajar

**BAGAIMANA?**  
**Rapor Pendidikan:** Progres Login dan Eksplorasi  
**Akun Belajar:** Progres Presentase Akun belajar.id (Akun tersedia & Akun Login)  
**RKT:** Progres satuan pendidikan yg telah selesai menyusun dan mengupload  
**ARKAS :** Progres Presentase pengguna ARKAS dan Progres belum/sudah update ARKAS V4

Dashboard Transformasi Digital Provinsi Gorontalo merupakan platform digital berbasis web yang dikembangkan oleh BPMP Gorontalo untuk dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dalam memperoleh informasi progres terkait dengan rapor Pendidikan, akun belajar, RKT satuan Pendidikan, dan pengguna ARKAS di Provinsi Gorontalo. Kemudahan mengakses berbagai informasi melalui satu pintu serta penyajian data



secara detail baik wilayah maupun detail satuan Pendidikan memudahkan pengguna dalam memanfaatkan dashboard tersebut.

Di awal pengembangannya, Dashboard Transformasi Digital Provinsi Gorontalo hanya memiliki menu progress rapor Pendidikan dan akun belajar, namun saat ini sudah dikembangkan pada RKT dan juga pengguna ARKAS. Kedepannya platform tersebut akan terus dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal kepada pengguna. Dashboard Transformasi Digital Provinsi Gorontalo dapat diakses melalui link <http://dashboard.bpmpgorontalo.id/>

## 2. Ponuwa Podcast



Ponuwa Podcast merupakan salah satu inovasi di BPMP Gorontalo berupa konten media sosial yang dimanfaatkan sebagai wadah dalam menyampaikan informasi secara lebih luas dalam format audio dan visual. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk menyebarkan pesan/narasi program/kebijakan Kemdikbudristek, khususnya program prioritas PDM, kepada target audiens baik Pemerintah Daerah, Dinas, Kepala Sekolah, Guru, Murid, Orang tua, serta masyarakat umum sehingga dapat membangun sentimen positif terhadap program prioritas Kemendikbudristek. Ponuwa podcast dapat diakses melalui kanal youtube BPMP Provinsi Gorontalo/Ponuwa Podcast.



### 3. E-KINERJA



Aplikasi E-Kinerja merupakan aplikasi yang digunakan oleh setiap pegawai untuk mengupload bukti kinerja setiap hari. Melalui E-Kinerja pimpinan dapat dengan mudah untuk melakukan monitoring pekerjaan yang dilakukan pegawai BPMP Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini dikembangkan untuk peningkatan kualitas kerja pegawai BPMP Provinsi Gorontalo.

### 4. Mo'ambuwa

# MO'AMBUWA

Mo'ambuwa adalah rapat atau pertemuan rutin yang diadakan setiap hari Kamis dengan dihadiri seluruh pegawai di lingkungan BPMP Provinsi Gorontalo.



**Ajang Mengevaluasi Program / Kegiatan**



**Wadah komunitas belajar antar pegawai untuk berbagi informasi terkait Program MB**



**Diskusi dan tukar pikiran antara pimpinan dengan pegawai**



**Mempererat Silaturahmi antar pegawai**



## ○ PENGHARGAAN

Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo menerima berbagai penghargaan :

### SATUAN KERJA UPT NILAI NKA TERTINGGI (99,91) TAHUN 2022



**DUTA MERDEKA  
BELAJAR KATEGORI  
DAMPAK PEMANGKU  
KEPENTINGAN**

**DUTA MERDEKA BELAJAR  
KATEGORI DAMPAK  
PEMANGKU KEPENTINGAN**



## o PROGRAM CROSSCUTTING/ COLLABORATIVE

Sejak tahun tahun 2022 sampai dengan sekarang, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo melakukan program *crosscutting/collaborative* dalam rangka implementasi Program Merdeka Belajar. Program Kolaborasi dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dalam mengawal kebijakan program prioritas nasional “Merdeka Belajar” Kemendikbudristek di Provinsi Gorontalo.

a. Pihak yang berkaitan dengan Program *Crosscutting/Collaborative* BPMP Provinsi Gorontalo terdiri dari instansi pemerintah maupun dari instansi swasta, di antaranya sebagai berikut:

- Unit Utama Ditjen PAUD Dikdan dan Dikmen Kemendikbudristek
- UPT Kemendikbudristek (BGP Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo)
- Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Dinas Pendidikan, Bappeda, Satuan Pendidikan)
- DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi Gorontalo
- Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

b. Peran dalam Program *Crosscutting /Collaborative*

### *Crosscutting /Collaborative* pada “**Pendampingan Program Sekolah Penggerak**”

- BPMP Provinsi Gorontalo melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan dengan UPT Kemendikbudristek BGP Provinsi Gorontalo terkait Pendampingan Program Sekolah Penggerak.



- Melaksanakan Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Advokasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terkait Pendampingan Program Sekolah Penggerak
- Melaksanakan Forum PMO Daerah dan Forum Pemangku Kepentingan Daerah

### *Crosscutting / Collaborative* pada “**Advokasi Penerapan Kurikulum Merdeka**”

- BPMP Provinsi Gorontalo melakukan Sosialisasi dan Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait Penerapan Kurikulum Merdeka
- BPMP Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama dan sinkronisasi dengan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam rangka Penguatan Literasi dan Numerasi di Satuan Pendidikan Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo.
- BPMP Provinsi Gorontalo melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah)



Kolaborasi BPMP Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah diperlukan untuk menyatukan visi dan misi, serta sumber daya dari kedua pihak. Hampir



keseluruhan program di BPMP Provinsi berkolaborasi dengan pemda terkait, diantaranya Kolaborasi BPMP dengan pemda dalam rangka Pendampingan dan Advokasi implementasi merdeka belajar merupakan salah satu upaya untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

Beberapa bentuk kolaborasi BPMP dengan Pemda dalam implementasi Merdeka Belajar, seperti Pengembangan Kebijakan dan fasilitasi.

- Kunjungan Kerja Pemda dalam rangka Sinergitas Program Pendidikan tahun 2023



- Fasilitasi dalam rangka mendukung implementasi Merdeka Belajar



Dalam rangka implementasi Merdeka Belajar, BPMP melakukan berbagai fasilitasi kepada pemda, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Fasilitasi tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar secara optimal di daerah. Fasilitasi dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti bimbingan teknis, konsultasi dan pelatihan. Fasilitasi tersebut diharapkan dapat membantu pemda, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk memahami dan melaksanakan Merdeka Belajar dengan baik.

Berbagai kegiatan advokasi sebagai bentuk kolaborasi BPMP Provinsi Gorontalo dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Advokasi dilakukan untuk mendorong pemda mendukung kebijakan yang dirumuskan Kemdikbudristek.

### *Crosscutting / Collaborative* pada **“Advokasi Peran Mitra Pembangunan”**

- BPMP Provinsi Gorontalo sebagai UPT Kemdikbudristek di Daerah berperan melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan dalam melakukan pendampingan kepada sasaran kebijakan dan program merdeka belajar.
- BPMP Provinsi Gorontalo melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait peran mitra pembangunan dalam mendukung kebijakan merdeka belajar.
- BPMP Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait dengan dukungan mitra pembangunan dalam implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan.

Berikut daftar mitra pembangunan di Provinsi Gorontalo serta bentuk bantuannya dan sasaran penerima :

NO	WILAYAH	NAMA MITRA	BENTUK BANTUAN	PENERIMA
1	Kab. Bonbol	PT. GM	Bantuan Mobil	Pemda
		CV. Boneva	Air Mineral	Dinas Pendidikan
2	Kab. Gorut	PLTA Tomilito	Makanan Tambahan utk Siswa	Sekolah di sekitaran PLTA
		PLTU Anggrek	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	SMKN 1 Gorut



		Balai Benih Ikan (BBI) Kota Gorontalo	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	SMKN 1 Gorut
		Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG	Penyerapan alumni	SMKN 1 Gorut
		BI Cabang Gorut		
3	Kota Gorontalo	Bank Indonesia	Dana 600 Jt (Baju, Sepeda, Kulkas, TV)	Dinas Pendidikan Kota gtlo
		Pertamina Depo Gtlo		
		1. Erlangga 2. Intan Pariwara 3. Siplah Nusantara 4. Mitra Indo Sarana 5. Tamba Print	Buku Siswa	SDN No. 10 Kota Barat
		Siplah Nusantara	Buku Siswa	SDN No. 64 Kota Timur
		CV. NIPPON PAINT	Cat 5 Kg, Kaus dan spanduk pada keg. 17 Agustus,	SDN NO. 11 KOTA BARAT
			Susu Hilo Untuk siswa, Piala utk Lomba Siswa	
		Pertamina Depo Gorontalo	LCD, sosialisasi Pembelajaran	SDN No. 40 Hulonthalangi
		Bank Mandiri Cab. Gorontalo	1 Kecamatan di beri pelatihan pembelajaran Pembentukan Karakter 3 x pertemuan tahun 2021, 1 x pertemuan selama 2 minggu.	SDN No. 60 Kota Timur
		Bank Mandiri Cab. Gorontalo	1 Kecamatan di beri pelatihan pembelajaran Pembentukan Karakter 3 x pertemuan tahun 2021, 1 x pertemuan selama 2 minggu.	SDN No 38 Hulontalangi
		Pertamina Depo gtlo	Minuman untuk Siswa dan Guru Bibit tamanam optik hidup	SDN No 42 Hulondtalangi
		Pertamina Depo Makasar	Meja guru 10 Buah Komputer 1 Unit Dispencer 1 Unit	SDN No 42 Hulondtalangi
		Erlangga	Workshop IKM seluruh kepek dan guru kelas 1 dan 4 tahun 2022	SDN no 79 Kota Tengah (Dinas Pendidikan)
		1. Erlangga 2. Intan Pariwara 3. Siplah Nusantara 4. Mitra Indo Sarana 5. Tamba Print	Buku Siswa	SDN No. 10 Kota Barat
		Siplah Nusantara	Buku Siswa	SDN No. 64 Kota Timur
		CV. NIPPON PAINT	Cat 5 Kg, Kaus dan spanduk pada keg. 17 Agustus,	SDN NO. 11 KOTA BARAT



			Susu Hilo Untuk siswa, Piala utk Lomba Siswa	
		Pertamina Depo Gorontalo	LCD, sosialisasi	SDN No. 40 Hulonthalangi
		Bank Mandiri Cab. Gorontalo	1 Kecamatan di beri pelatihan pembelajaran Pembentukan Karakter 3 x pertemuan tahun 2021, 1 x pertemuan selama 2 minggu.	SDN No. 60 Kota Timur
			Konsumsi, ATK, Narasumber dari Kementerian	
			Print dan Laptop 1	
		Bank Mandiri Cab. Gorontalo	1 Kecamatan di beri pelatihan pembelajaran Pembentukan Karakter 3 x pertemuan tahun 2021, 1 x pertemuan selama 2 minggu.	SDN No 38 Hulontalangi
			Konsumsi, ATK, Narasumber dari Kementerian	
			Print dan Laptop 1	
		Pertamina Depo gtlo	Minuman untuk Siswa dan Guru Bibit tanaman optik hidup	SDN No 42 Hulondtalangi
		Pertamina Depo Makasar	Meja guru 10 Buah Komputer 1 Unit Dispencer 1 Unit	SDN No 42 Hulondtalangi
		Erlangga	Workshop IKM seluruh kepek dan guru kelas 1 dan 4 tahun 2022	SDN no 79 Kota Tengah (Dinas Pendidikan)
4	Kab. Pohuwato	PT. Harim	Bantuan Beasiswa ke UNG	UNG
			Bantuan Laptop	SDN 12 Paguat
		PT. Indomart	Perbaikan kelas dan Dewan guru	SDN 03 Duhiadaa
		PT. Fets (Pengeboran Tambang Emas)	Pembinaan Kesehatan	SDN 6 , 4 dan 3 Buntulia
			Perbaikan sekolah Terbakar	SDN 5 Buntulia
			Sarana Kesehatan (Tempat Cuci Tangan)	SDN 07 Buntulia
			Alat bantu Tuna Daksa 4 buah	SLB Marisa
			Pakaian sekolah 50 buah	SLB Marisa
			Buka gambar 100 buah	SLB Marisa
			Krayon 100 buah	SLB Marisa
		Dalam proses (telah mengajukan Proposal)	Bantuan Bus Sekolah	SLB Marisa
5	Kab. Boalemo	PT. Tolangohula		
		SMKN 1 Tilamuta		
		SLB Tilamuta		
		TK Tilamuta	Mitra Pembangunan	



		PT. Mahoni Edukasi Digital	Aplikasi Kipin Perpus Digital yg berisi 400 bahan literasi bacaan sebagai penunjang sarana perpustakaan	Dinas Pendidikan
6	Kab. Gorontalo	Erlangga	Bantuan Buku	Satuan Pendidikan
		BSG		
7	Provinsi	Nutrifood	Bantuan Minuman Sehat untuk siswa	Satuan Pendidikan
		Erlangga	Bantuan Buku	

### c. Dampak Pelaksanaan Program *Crosscutting / Collaborative*

Secara umum pelaksanaan program *crosscutting/collaborative* yang dilakukan BPMP Provinsi Gorontalo tahun 2023 berdampak terhadap capaian IKK “1.1. Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) Yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya”, maupun IKK “1.2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)”. Secara khusus dampak langsung terhadap pelaksanaan program *crosscutting / collaborative*, diantaranya adalah:

#### **Dampak *Crosscutting / Collaborative* pada Program Sekolah Penggerak:**

- Selarasnya kebijakan Program Sekolah Penggerak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- Ketuntasan penyelesaian kendala dan permasalahan dalam program sekolah penggerak di tingkat daerah.

#### **Dampak *Crosscutting / Collaborative* pada Program Implementasi Kurikulum Merdeka:**

- Perluasan terhadap jumlah sasaran untuk Implementasi Kurikulum Merdeka;
- Kedalaman pembelajaran dari Implementasi Kurikulum Merdeka; Efisiensi anggaran dalam pengawalan Implementasi Kurikulum Merdeka.

#### **Dampak *Crosscutting / Collaborative* Pada Program Perencanaan Berbasis Data:**

- Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terkait Indikator Kinerja Urusan (IKU) pendidikan Provinsi Gorontalo yang sesuai dengan hasil analisis rapor pendidikan;
- Efektifitas pelaksanaan program berbasis data.





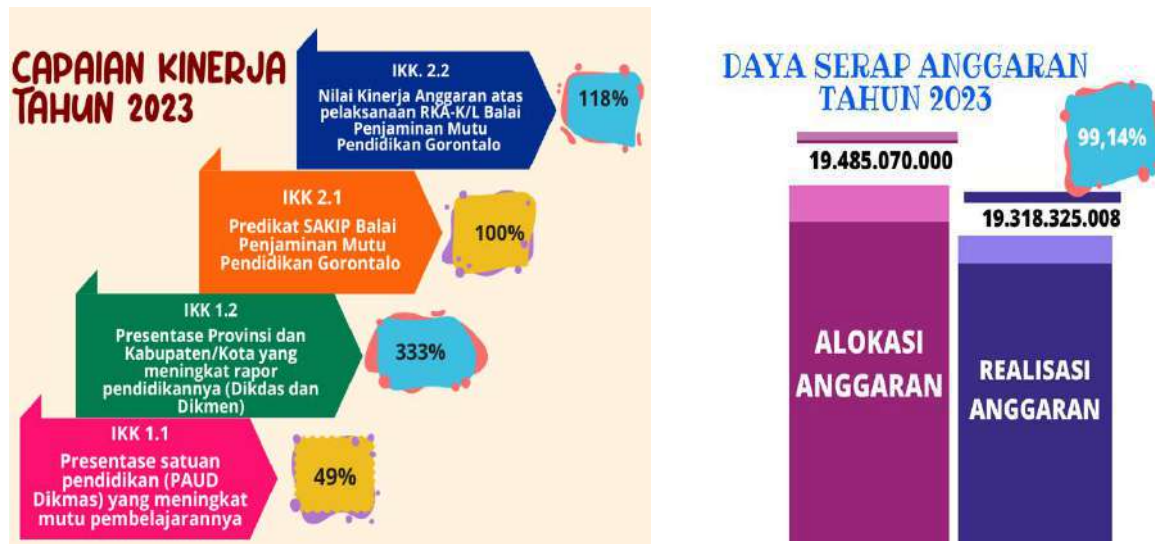
# BAB 4 PENUTUP

---



# PENUTUP

Seluruh kegiatan dalam upaya mencapai target indikator kinerja lembaga tahun 2023 telah berhasil dilaksanakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Berikut adalah hasil capaian pada masing-masing IKK tahun 2023 :



SK	IKK	TARGET	REALISASI	PERSENTASI CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN	
					Anggaran	%
[SK.1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	0,96	49%	789.155.945	99,91
	[1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor	30	100	333%	7.004.575.883	99
[SK. 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	[2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	A	A	100%	11.524.592.767	99,18
	[2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	84	98,56	118%		

Capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagaimana pada tabel di atas diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan inovasi melalui pemanfaatan pagu anggaran sebesar **Rp19.318.325.008** atau **99,14%** dari total pagu **Rp19.485.070.000**.



**Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :**

1. Perlu adanya data satuan PAUD Dikmas yang terakreditasi tahun 2022 dan 2023 pada Dapodik serta Data Sulingjar satuan PAUD Dikmas tahun 2023;
2. Memaksimalkan upaya peningkatan pemahaman berupa sosialisasi dan penguatan kepada stakeholder terkait SPM, rapor Pendidikan, RKT, program transisi PAUD dan inklusi serta program Merdeka Belajar lainnya;
3. Pendokumentasian seluruh kegiatan yang menunjang kinerja organisasi harus menjadi perhatian semua pihak terutama SDM yang mengampu/bertanggungjawab sesuai yang diamanatkan pimpinan.
4. Menjaga konsistensi jadwal pelaksanaan kegiatan karena sangat berpengaruh terhadap RPD yang telah direncanakan baik bulanan maupun triwulan, serta mengoptimalkan pengelolaan UP.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya, perlu adanya beberapa hal yang menjadi rekomendasi perbaikan dari berbagai aspek. Beberapa hal yang menjadi rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan dan advokasi kepada Pemda sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam rangka meningkatkan komitmen pemda terhadap program prioritas Kemdikbudristek;
2. Menentukan formulasi pelaksanaan program Kemitraan yang efektif seperti pelibatan Bunda PAUD, Mitra Pembangunan, Organisasi Profesi Bidang Pendidikan dan organisasi terkait dalam rangka pencapaian target program Kemdikbudristek;
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit terkait untuk mengantisipasi perubahan kebijakan atau kondisi yang tidak terduga;
4. Peningkatan kapasitas SDM internal BPMP Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan terkait program prioritas Kemdikbudristek yang menjadi target kinerja lembaga;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan internal untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam implementasi pencapaian target lembaga.





# LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA
  - PENGUKURAN KINERJA
  - PERNYATAAN LAKIN SUDAH DIREVIEW
- 





**Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Kepala BPMP Provinsi Gorontalo  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**

**Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Gorontalo, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo,**



**Iwan Syahril**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 12.231.867.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.594.261.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.826.128.000</b>

Gorontalo,30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo,**



**Iwan Syahril**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**

**Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Gorontalo, 15 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo,**



**Iwan Syahril**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30.00
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 11.619.724.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.865.346.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.485.070.000</b>

Gorontalo, 15 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo,**



**Iwan Syahril**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 1  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GORONTALO  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN GORONTALO s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30.00	TW1 : 0	TW1 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Predikat	A	TW1 : -	TW1 : -
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Nilai	84	TW1 : 0	TW1 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.19.826.128.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 12 Mei 2023 sebesar **Rp. 5.603.663.876** atau **28.26%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 12 Mei 2023 **Rp. 14.222.464.124**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

**Progress / Kegiatan :**

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 adalah

1. Koordinasi ke Dinas Provinsi, Kab/Kota terkait Percepatan Penyaluran dana BOSP tahap 1 Gelombang 1 tahun 2023 jenjang PAUD, Kesetaraan, SD dan SMP yang dilakukan secara daring
2. Persiapan Rapat PMO bulan Januari dengan BGP secara daring
3. Pelaksanaan Rapat PMO bulan Januari dengan Pemda secara daring
4. Audiensi bersama BGP, Dinas Kota Gorontalo ke Pemerintah Daerah
5. Pendampingan percepatan pelaporan Dana BOSP
6. Mengawal Dinas Pendidikan untuk menerbitkan SE Transisi PAUD-SD
7. Sosialisasi SPM dan Surat MM ke Pemda (Diskusi Terpumpun terkait SPM Pendidikan)
8. Persiapan Rapat PMO bulan Februari dengan BGP secara daring
9. Mengumpulkan data penerima chromebook Kabupaten/Kota
10. Sosialisasi pendaftaran IKM
11. Perkemahan Bakti (PERTI) Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti (SWBB) Gorontalo"
12. Sinkronisasi dan Kolaborasi Program Merdeka Belajar
13. Pendataan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh guru PSP
14. Analisis kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan model peningkatan kapasitas SDM ( Pemda, Satpen, Kombel)
15. Persiapan Rapat PMO dengan BGP (bulan Maret)
16. Rapat PMO bulan Maret dengan Pemerintah Daerah (daring).

**Kendala / Permasalahan :**

- Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1, adalah :
1. Anggaran dalam proses revisi eselon 1
  2. Kendala atau permasalahan PSP yang ada di SIMPKB belum ditindak lanjuti oleh PMO Daerah. Hal ini menyebabkan permasalahan yang butuh dukungan daerah masih terbaca belum terselesaikan
  3. Beberapa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang menjadi tim PMO tidak bisa mengikuti rapat PMO daerah
  4. Adanya keluhan pengawas terkait kepek yg lambat merespon pengawas bina
  5. Jenjang PAUD masih banyak yang belum mengaktifasi akun belajar
  6. Penjadwalan Rapat PMO yang beberapa kali mengalami penundaan karena kesibukan pihak-pihak terkait terutama PMO Dinas

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Pendidikan Kabupaten Gorontalo

7. Koordinasi yang kurang baik antar Kabid PAUD dan Kabid Dikdas. Masing - masing bagian saling berharap untuk menindaklanjuti SE Transisi PAUD-SD
8. Kesalahan media yang digunakan untuk mengunggah SE Transisi PAUD-SD
9. Kendala yang masih ada yaitu belum tersedianya data lengkap masing-masing PSP yang menggambarkan kondisi sekolah sebelum dan sesudah program PSP yang bisa dijadikan profil sekolah penggerak angkatan 1 yang terdiri atas 8 SD, 5 SMP, dan 2 TK
10. Belum tersusun regulasi terkait handover PSP angkatan 1
11. Terbantur Kodefikasi kode kegiatan yang akan diinput ke Aplikasi SIPD-RI belum semua ada/sesuai dengan Kepmendikbudristek 311 Tahun 2022
12. Kebijakan Fiskal daerah yang tidak bisa mengakomodir semua sub kegiatan yang ada pada indikator Prioritas SPM Tahun 2024
13. Adanya perbedaan data metabase BOSP PAUD dengan Data Dinas Pendidikan Kab/Kota
14. Adanya sejumlah laporan fasilitator yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi dalam pelaksanaan PSP angkatan 1 maupun angkatan 2
15. Chromebook diterima dan disimpan saja, tidak dimanfaatkan sama sekali
16. Terdapat perbedaan data penerima chromebook pusat dan daerah
17. Kepsek masih berstatus Plt. terutama di sekolah Satap
18. Akun belajar belum menjadi admin masih akun guru
19. Mutasi kepek sehingga masih terbaca di sekolah yg lama
20. Belum di updatenya data perubahan kepala sekolah di Dapodik
21. Pada saat lomba mau dimulai, sebagian peserta belum ada ditempat terhubung ada sebagian peserta yang merangkap, atau sementara ikut kegiatan lain
22. Belum melakukan pengiriman atau mengupload video praktek atau belum berbagi konten melalui PMM
23. Praktek baik hanya dilakukan secara internal
24. Komunitas belajar yang ada belum dimanfaatkan dengan baik
25. Terdapat ketidaksesuaian data IKM antara BPMP dan BGP
26. Adanya ketidaksesuaian data metabase BOSP Pauddasemen dengan data Dinas Pendidikan kab. Gorontalo
27. Belum adanya solusi penyelesaian isu yang membutuhkan dukungan PMO daerah yang telah dilaporkan melalui SIMPKB oleh fasilitator PSP
28. Data Kepala sekolah penggerak angkatan 3 yang belum terupdate. Selain itu terdapat satuan pendidikan sekolah penggerak yang berubah status menjadi Sekolah Negeri. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan tersebut berstatus tenaga honor
29. Jenjang PAUD masih banyak yang belum mengaktifasi akun belajar.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1, adalah

1. Melakukan koordinasi dengan eselon 1
2. Berkoordinasi dengan Tim BOSP pusat
3. Mendorong PMO Daerah agar menyelesaikan isu PSP yang ada di Sim PKB dengan melibatkan peran tim PMO BPMP di masing-masing Kab/Kota/Provinsi
4. Koordinasi secara intensif dengan pihak Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi
5. Mendorong Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti beberapa kendala yang muncul terutama Aktivasi akun belajar jenjang PAUD serta Percepatan Penyaluran BOSP tahap 1
6. Tim pdm 01 BPMP dan BGP akan menyusun dan merekapitulasi data psp angkatan 1 , menghimpunnya secara lengkap
7. Tim PDM 01 menyusun profil psp angkatan 1
8. Koordinasi secara pribadi (japri) dan Pemberian informasi terbaru secara intens terkait SE Transisi PAUD SD
9. Pemutakhiran Aplikasi SIPD-RI ( Koordinasi level Kementerian antara Kemdikbudristek dan Kemendagri RI )
10. Sinkronisasi semua regulasi yang mendukung pelaksanaan SPM Pendidikan Tahun 2024
11. Pemilihan sub kegiatan SPM yang efektif memberikan manfaat yang maksimal dengan penggunaan dana yang seefisien mungkin
12. Mendorong PMO Daerah agar menyelesaikan isu PSP yang ada di Sim PKB dengan melibatkan peran tim PMO BPMP di masing-masing Kab/Kota/Provinsi
13. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan melibatkan UPT daerah untuk memfasilitasi sekolah dalam memanfaatkan chromebook untuk pembelajaran
14. Berkoordinasi dengan pusat dan daerah terkait data penerima Chromebook
15. Mengisi link kendala pendaftaran IKM yang akan di selesaikan oleh pihak Pusdatin
16. Solusi terhadap masalah sudah dikonsultasikan dengan PMO PSP Pusat dan akan segera ditindaklanjuti pada aplikasi Dapodik
17. Fasilitator dan panitia selalu mengingatkan peserta untuk datang tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan
18. Melakukan konfirmasi untuk kesesuaian data IKM dengan BGP
19. Melakukan konfirmasi dan pengecekan terkait data BSOP Pauddasmen
20. Melakukan perekapan data real isu isu yang membutuhkan dukungan PMO daerah untuk dijadikan agenda utama pada pelaksanaan rapat PMO bulan berikutnya.

#### **B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

#### **Progress / Kegiatan :**

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 adalah

1. Koordinasi ke Dinas Provinsi, Kab/Kota terkait Percepatan Penyaluran dana BOSP tahap 1 Gelombang 1 tahun 2023 jenjang SD dan SMP yang dilakukan secara daring
2. Persiapan Rapat PMO bulanan dengan BGP secara daring
3. Pelaksanaan Rapat PMO bulan Januari dengan Pemda secara daring
4. Kick Off Program Kampus Mengajar Angkatan 5
5. Audiensi bersama BGP, Dinas Kota Gorontalo ke Pemerintah Daerah
6. Pendampingan percepatan pelaporan Dana BOS

7. Mengawal Dinas Pendidikan untuk menerbitkan SE Transisi PAUD-SD
8. Sosialisasi SPM dan Surat MM ke Pemda (Diskusi Terpumpun terkait SPM Pendidikan)
9. Persiapan Rapat PMO bulan Februari dengan BGP secara daring
10. Mengumpulkan data penerima chromebook kabupaten/kota
11. Sosialisasi pendaftaran IKM
12. Perkemahan Bakti (PERTI) Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti (SWBB) Gorontalo"
13. Sinkronisasi dan Kolaborasi Program Merdeka Belajar
14. Pendataan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh guru PSP
15. Analisis kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan model peningkatan kapasitas SDM ( Pemda, Satpen, Kombel)
16. Persiapan Rapat PMO bulan Maret dengan BGP
17. Rapat PMO Bulan Maret dengan Pemerintah Daerah (daring).

**Kendala / Permasalahan :**

- Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2, adalah :
1. Anggaran dalam proses revisi eselon 1
  2. Pemahaman tim Pokja UPT belum sempurna terhadap hal-hal yang menyangkut Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik khususnya informasi terkait fitur-fitur pada aplikasi Arkas dan Markas
  3. Tim Pokja Kesulitan dalam mengakses aplikasi ARKAS, MARKAS di karenakan tidak mempunyai hak akses atau akun dummy
  4. Kendala atau permasalahan PSP yang ada di SIMPKB belum ditindak lanjuti oleh PMO Daerah. Hal ini menyebabkan permasalahan yang butuh dukungan daerah masih terbaca belum terselesaikan
  5. Beberapa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang menjadi tim PMO tidak bisa mengikuti rapat PMO daerah
  6. Adanya keluhan pengawas terkait kepek yg lambat merespon pengawas bina
  7. Penjadwalan Rapat PMO yang beberapa kali mengalami penundaan karena kesibukan pihak-pihak terkait terutama PMO Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo
  8. Kuota peserta Pelepasan Mahasiswa Program Kampus Mengajar Angkatan tidak sepenuhnya terpenuhi, yakni dari 86 peserta sasaran yang hadir 83 orang. Panitia sudah melakukan koordinasi dari unsur-unsur tersebut, namun yang bersangkutan terkendala tugas yang tidak bisa ditinggalkan, 1 orang mahasiswa tidak bisa dihubungi.
  9. Koordinasi yang kurang baik antar Kabid PAUD dan Kabid Dikdas. Masing - masing bagian saling berharap untuk menindaklanjuti SE Transisi PAUD-SD
  10. Kesalahan media yang digunakan untuk mengunggah SE Transisi PAUD-SD
  11. Kendala yang masih ada yaitu belum tersedianya data lengkap masing-masing PSP yang menggambarkan kondisi sekolah sebelum dan sesudah program PSP yang bisa dijadikan profil sekolah penggerak angkatan 1 yang terdiri atas 8 SD, 5 SMP, dan 2 TK
  12. Belum tersusun regulasi terkait handover PSP angkatan 1
  13. Terbentur Kodefikasi kode kegiatan yang akan diinput ke Aplikasi SIPD-RI belum semua ada/sesuai dengan Kepmendikbudristek 311 Tahun 2022
  14. Kebijakan Fiskal daerah yang tidak bisa mengakomodir semua sub kegiatan yang ada pada indikator Prioritas SPM Tahun 2024
  15. Adanya perbedaan data metabase BOSP PAUD dengan Data Dinas Pendidikan Kab/Kota
  16. Adanya sejumlah laporan fasilitator yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi dalam pelaksanaan PSP angkatan 1 maupun angkatan 2
  17. Chromebook diterima dan disimpan saja, tidak dimanfaatkan sama sekali
  18. Terdapat perbedaan data penerima chromebook pusat dan daerah
  19. Kepek masih berstatus Plt. terutama di sekolah Satap
  20. Akun belajar belum menjadi admin masih akun guru
  21. Mutasi kepek sehingga masih terbaca di sekolah yg lama
  22. Belum di updatenya data perubahan kepala sekolah di Dapodik
  23. Terdapat beberapa peserta yang tidak dapat rekomendasi oleh sekolahnya berhubung peserta tersebut sementara persiapan ikut ujian sekolah
  24. Belum melakukan pengiriman atau mengupload video praktek atau belum berbagi konten melalui PMM
  25. Praktek baik hanya dilakukan secara internal
  26. Komunitas belajar yang ada belum dimanfaatkan dengan baik
  27. Terdapat ketidaksesuaian data IKM antara BPMP dan BGP
  28. Adanya ketidaksesuaian data metabase BOSP Pauddasemen dengan data Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo
  29. Data Kepala sekolah penggerak angkatan 3 yang belum terupdate. Selain itu terdapat satuan pendidikan sekolah penggerak yang berubah status menjadi Sekolah Negeri. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan tersebut berstatus tenaga honor.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2, yaitu

1. Melakukan koordinasi dengan eselon 1
2. IHT terkait dengan DAK non fisik oleh PDM 03A
3. Berkoordinasi dengan Tim BOSP pusat
4. Mendorong PMO Daerah agar menyelesaikan isu PSP yang ada di Sim PKB dengan melibatkan peran tim PMO BPMP di masing-masing Kab/Kota/Provinsi
5. Koordinasi secara intensif dengan pihak Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi
6. Mendorong Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti beberapa kendala yang muncul terutama Aktivasi akun belajar jenjang PAUD serta Percepatan Penyaluran BOSP tahap 1
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengkonfirmasi kehadiran peserta pada kegiatan Kick off Program Kampus Mengajar angkatan 5
8. Tim pdm 01 BPMP dan BGP akan menyusun dan merekapitulasi data psp angkatan 1 , menghimpunnya secara lengkap
9. Tim pdm 01 menyusun profil psp angkatan 1
10. Koordinasi secara pribadi (japri) dan Pemberian informasi terbaru secara intensif terkait SE Transisi PAUD SD
11. Pemutakhiran Aplikasi SIPD-RI ( Koordinasi level Kementerian antara Kemdikbudristek dan Kemendagri RI )
12. Sinkronisasi semua regulasi yang mendukung pelaksanaan SPM Pendidikan Tahun 2024
13. Pemilihan sub kegiatan SPM yang efektif memberikan manfaat yang maksimal dengan penggunaan dana yang seefisien mungkin
14. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan melibatkan UPT daerah untuk memfasilitasi sekolah dalam memanfaatkan chromebook untuk pembelajaran
15. Berkoordinasi dengan pusat dan daerah terkait data penerima Chromebook

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

16. Mengisi link kendala pendaftaran IKM yang akan di selesaikan oleh pihak Pusdatin
17. Solusi terhadap masalah sudah dikonsultasikan dengan PMO PSP Pusat dan akan segera ditindaklanjuti pada aplikasi Dapodik
18. Fasilitator dan panitia selalu mengingatkan peserta untuk datang tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan
19. Melakukan konfirmasi untuk kesesuaian data IKM dengan BGP
20. Melakukan konfirmasi dan pengecekan terkait data BSOP Pauddasmen
21. Melakukan perekapan data real isu isu yang membutuhkan dukungan PMO daerah untuk dijadikan agenda utama pada pelaksanaan rapat PMO bulan berikutnya.

### C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

#### **Progress / Kegiatan :**

Untuk mendukung tercapainya target nilai SAKIP yang telah ditetapkan, BPMP Gorontalo telah menyusun konsep SAKIP, yang meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu

- 1) Perencanaan : menyiapkan dokumen perencanaan yang terdiri dari rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kerja dan rencana aksi
- 2) Pengukuran capaian kinerja : mengukur ketercapaian target yang telah ditetapkan yang diinput pada aplikasi SPASIKITA (SIMPROKA)
- 3) Laporan kinerja : mengidentifikasi unsur-unsur yang harus dimuat dalam laporan kinerja instansi serta melihat bagaimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala / Permasalahan dalam pencapaian IKK 2.1 adalah

- 1) Belum melakukan rewiu renstra tahun 2023
- 2) Masih terdapat beberapa dokumen fisik yang belum terdokumentasi dengan baik.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi / Tindak Lanjut dalam rangka pencapaian IKK 2.1 adalah

- 1) Melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk melakukan rewiu renstra dan rewiu Lakip tahun 2022
- 2) Melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam implementasi SAKIP satuan kerja.

### D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

#### **Progress / Kegiatan :**

Nilai Kerja Anggaran BPMP Provinsi Gorontalo Triwulan 1 adalah 20,18, nilai ini diperoleh dari nilai EKA sebesar 33,63 dan nilai IKPA sebesar 0.

#### **Kendala / Permasalahan :**

NKA masih rendah karena nilai IKPA masih 0 ( belum ada penarikan data dari SAKTI untuk nilai IKPA TW1)

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan serta melakukan koordinasi dan pemantauan terkait unsur-unsur yang menjadi penyumbang nilai EKA dan IKPA di satuan kerja.

## 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Melakukan koordinasi dengan PDM 01 - 12 secara intensive
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan disepakati
3. Melaksanakan program prioritas dalam rangka mendukung pencapaian IKK sesuai perjanjian kinerja tahun 2023
4. Melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan Pauddasmen terkait capaian IKPA 0 pada aplikasi SPASIKITA
5. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam implementasi SAKIP BPMP Provinsi Gorontalo tahun 2023
6. Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait unsur-unsur yang menjadi penyumbang nilai EKA dan IKPA BPMP Provinsi Gorontalo

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Gorontalo, 12 Mei 2023

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II  
BPMP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI GORONTALO s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30.00	TW2 : 0	TW2 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Predikat	A	TW2 : -	TW2 : -
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Nilai	84	TW2 : 0	TW2 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.19.826.128.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 06 Juli 2023 sebesar **Rp. 7.980.568.280** atau **40.25%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 06 Juli 2023 **Rp. 11.845.559.720**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

**Progress / Kegiatan :**

A. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 BULAN APRIL adalah:

1. Persiapan Rapat PMO dengan BGP

2. Rapat PMO dengan Pemerintah Daerah

B. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 BULAN MEI , adalah :

1. Rapat Persiapan PMO dengan BGP bulan Mei (POHUWATO)

2. Rapat PMO bulan Mei dengan Pemerintah Daerah secara DARING/LURING

3. Semarak Bulan Merdeka Belajar

4. Forum Pemangku Kepentingan angk 1 dan 2 ( Kab. Pohuwato,dan Kab. Gorontalo)

5. Analisis delta nilai rapor psp tahun 2021 - 2022 per masing-masing individu sekolah (Rapat awal pembahasan bersama BGP)

6. Pengumpulan data bukti karya/ konten berbagi praktik baik yang di unggah di PMM

7. Penyusunan bahan advokasi PBD satpen ke dinas

8. Pendampingan perencanaan Daerah Tahap 1

9. Koordinasi berkala terkait perencanaan daerah ke PDM 04C dan daerah setiap pekan ke dua

10. Melaksanakan finalisasi bahan dan metode mitigasi resiko

11. Koordinasi dengan stakeholder terkait dengan Kampanye GSS

12. Percepatan Penyaluran Dana BOSP (dilaksanakan bersama rapat PMO bulan Mei)

13. Koordinasi intensif terkait percepatan BOSP Provinsi, Kab/Kota

14. Koordinasi pelaksanaan kesiapan pelaksanaan Asesmen Nasional melalui rapat PMO bulan Mei 2023

15. Koordinasi terkait progres aktivasi akun belajar.id jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, Kesetaraan melalui rapat PMO bulan Mei 2023

C. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 BULAN JUNI, adalah:

1. Rapat Persiapan PMO bulan Juni 2023 (KABGOR)

2. Rapat PMO bulan Juni 2023

3. Rakortek AN dan Pembekalan Pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk Peningkatan Delta AN Tahun 2023

4. Bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan SIPLah

5. Pendampingan percepatan pelaporan Dana BOSP melalui ARKAS 4.0

6. Forum Pemangku Kepentingan Angkatan 1 dan 2 ( Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo)

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



7. Rapat PMO bulan Juni 2023
8. Pelaksanaan FGD bersama Pemda dan DPRD
9. Advokasi ke dinas terkait pemanfaatan rapor satpen
10. Workshop Perencanaan Program Transisi PAUD-SD
11. Pendampingan Sekolah Piloting Transisi PAUD-SD
12. Mengadvokasi Dinas Pendidikan untuk melakukan kampanye transisi PAUD-SD, bekerjasama dengan Pokja Bunda PAUD
13. Rakor program GSS kepada pemerintah daerah
14. Sharing session pelaksanaan mentoring sistem UPT
15. Rapat Koordinasi dengan Daerah Terkait Komitmen Pemda terhadap
16. Pendidikan Khusus dan Iklusif di masing2 Kabupaten/Kota
17. Pertemuan dengan Pihak Google terkait optimalisasi pemanfaatan chromebook dan belajar id
18. Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan akun belajar. Id
19. Optimalisasi Pemanfaatan Akun Belajar.id

**Kendala / Permasalahan :**

A. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN APRIL adalah, adalah :

1. Banyak kendala / masalah di sekolah penggerak yang berulang dilaporkan atau belum ditindaklanjuti baik oleh PMO level sekolah atau oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota sehingga masih terbaca di sistem dan secara otomatis akan terbaca di level Pusat
2. Laporan yang disampaikan oleh koordinator fasilitator belum dipilah berdasarkan kategori masalah sehingga agak sulit untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan
3. Terkait pembekalan komite pembelajaran, hanya mengambil sampel 2 orang pendidik di jenjang SMP yang akan dibekali
4. Terkait rapor pendidikan yang selalu keluar nanti pertengahan tahun sementara dinas dan satuan pendidikan harus membuat perencanaan di awal tahun belum berdasarkan rapor pendidikan tahun ini
5. Bentuk strategi pendampingan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki akun belajar.id belum maksimal
6. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan di Daerah terkait program Merdeka Belajar belum maksimal
7. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait program Merdeka Belajar belum dilakukan secara periodik
8. Strategi pendampingan untuk perencanaan berbasis data bagi satuan Pendidikan belum maksimal
9. Kurangnya kompetensi pendidik , terutama di daerah pesisir menjadi dilema bagi dinas dan tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan pelaksanaan program – program kemendikbudristek yang akan diimplementasikan di satuan – satuan pendidikan di daerah pesisir
10. Kekurangan pengawas di Kab. Bone Bolango yang akan mendampingi dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Angkatan 3
11. Adanya sejumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang terbaca belum melaporkan penggunaan dan BOP tahun 2022
12. Tindak lanjut eksplorasi dan unduh rekomendasi rapor Pendidikan untuk jenjang PAUD belum maksimal
13. Beberapa unsur peserta tidak hadir seperti bagian perencanaan dinas, PJ BOSP jenjang PAUD,SD dan SMP, Admin SIMPKB sehingga hal-hal yang perlu disampaikan dan di diskusikan tidak berjalan maksimal
14. Peserta rapat PMO dari Dinas Pendidikan tidak datang tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda
15. Rendahnya aktivasi akun belajar terutama untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan

B. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN MEI adalah, adalah :

1. Adanya masalah yang selalu berulang , yang selalu diangkat pada rapat PMO yang belum juga diselesaikan
2. Masalah mutasi kepala sekolah penggerak yang perlu menjadi perhatian kita, agar bisa dicegah atau diminimalisir, karena adanya mutasi kepala sekolah dapat mengganggu struktur pelaksanaan program sekolah penggerak
3. Masih ada 200 masalah terkait PSP yang belum ditanggapi Dinas
4. Dinas mendapatkan dana peruntukkan pendidikan tetapi tidak mengetahui cara menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan PSP, IKM dan PBD
5. Tidak semua unsur atas sasaran tidak bisa hadir dalam rapat karena banyaknya kegiatan, hal ini berdampak tidak terselesaikannya masalah dan isu-isu dan tidak dapat memitigasi resiko yang terjadi di daerah
6. Komitmen waktu masih perlu ditingkatkan, khususnya tentang peralihan tema kegiatan
7. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki video praktik baik, sehingga yang ditampilkan hanya berupa paparan
8. Permintaan Data dari pihak BGP agak terkendala birokrasi
9. Masih terdapat sekolah penggerak yang lambat dalam merespon permintaan data dari BPMP
10. Minimnya kreativitas mahasiswa dalam menciptakan kegiatan literasi dan numerasi di sekolah tempatnya bertugas. Demikian pula buku yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik
11. Belum semua kepala sekolah sudah memperoleh pelatihan tentang Kampus mengajar dan pengelolaan buku hibah
12. Bagian Perencanaan Disdik Kabupaten Gorontalo belum melakukan penginputan E-Rakortek sebagai tindak lanjut kegiatan Pendampingan Perencanaan Daerah Tahap 1. (Kab. Gorontalo)
13. Data SPM yang telah diinput dalam e-Rakortek terbaca beberapa sub indikator belum terpenuhi (terdapat sub indikator yang belum dianggarkan pembiayaannya)
14. Untuk E rakortek itu belum di selesaikan karena dinas tidak bisa mengakses karna admin masih ada keduakaan dan bisa membuka aplikasi itu nanti 2 hari ini baru bisa membuka penginputan e- Rakortek
15. Dinas mendapatkan dana peruntukkan pendidikan tetapi tidak mengetahui cara menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan PSP, IKM dan PBD
16. Internal Dinas Pendidikan belum mendiskusikan secara komprehensif seluruh indikator kinerja SPM Pendidikan tahun 2024 pada seluruh bidang/urusan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini agak menghambat karena beberapa Kabid masih menegosiasikan kegiatan dibidangnya yang harus terakomodir tahun 2024 dengan Kasubag Perencanaan masing-masing Dinas Pendidikan
17. Aplikasi e-Rakortek Kemendagri belum diupdate oleh Bappeda Kab/Kota sehingga pihak Dinas Pendidikan harus menunggu Bappeda mengupdate data pada aplikasi e-Rakortek baru bisa menginput seluruh indikator SPM Tahun 2024
18. Format yang didownload dari Surat Menteri untuk beberapa indikator disatukan sehingga diasumsikan oleh pihak Dinas Pendidikan bahwa penganggarannya juga bisa disatukan untuk semua level pendidikan, hal ini tidak sesuai dengan format inputan yang sudah dimutakhirkan pada aplikasi e-Rakortek Kemendagri
19. Kemampuan fiskal dan kebijakan di beberapa kabupaten agak menyulitkan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan Tahun 2024, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Keuangan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota
20. Untuk monitoring keterlaksanaan SPM bidang Pendidikan tahun 2023, kendala yang sering terjadi adalah seringkali aplikasi yang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- digunakan bermasalah sehingga Dinas Pendidikan mengalami kendala dalam penginputan realisasi yang dilakukan
21. Untuk monitoring pelaksanaan perencanaan daerah tahun 2024 kendala yang dihadapi adalah pejabat yang berwenang dalam pengambilan kebijakan tidak berada ditempat sehingga menjadi kendala penetapan sub kegiatan SPM yang akan dialokasikan anggarannya tahun 2024
  22. Intensitas kegiatan ditingkat Dinas Pendidikan yang cukup tinggi sehingga staf yang berwenang dalam penginputan aplikasi e-Rakortek mengalami kendala waktu
  23. Responden ada yang tidak sempat diwawancarai yaitu Kepala dinas Pendidikan Kota Gorontalo Karena Jadwal yang Padat sehingga tidak Punya waktu untuk di wawancarai, Fasilitas yang digunakan masih kurang memadai, pada saat wawancara Responden mengeluh tentang keterlambatan keluarnya hasil dari Rapor Pendidikan satuan Pendidikan yang menyebabkan terlambatnya penrencanaan satuan Pendidikan
  24. Belum ada tindaklanjut terhadap permintaan data sekolah piloting gerakan sekolah sehat di Kabupaten Gorontalo (kabupaten Gorontalo)
  25. Kurangnya informasi dan koordinasi dimasing-masing Kabupaten/Kota, kurangnya respon dari PIC dan Dinas Pendidikan Kab./Kota, Upaya promosi kesehatan di sekolah selama ini belum optimal, Dengan dimulainya kembali pembelajaran tatap muka, sekolah perlu memperhatikan kembali kondisi kesehatan anak (Konsumsi makanan berisiko setiap hari, Status Gizi, Kebersihan Diri dan Aktivitas Fisik)
  26. Masih terdapat beberapa sekolah jenjang Kesetaraan, PAUD dan SD yang belum mendapatkan dana BOSP tahap 1
  27. Sekolah Penggerak belum memahami penyusunan RAB dana Boskin
  28. Masih ada sekolah yang belum bisa membuka akun belajar
  29. Rapot pendidikan yang belum login itu karena belum terbuka akun raport pendidikannya. 30. Dinas mendapatkan dana peruntukkan pendidikan tetapi tidak mengetahui cara menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan PSP, IKM dan PBD
- C. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN JUNI adalah, adalah :
1. Tidak terpenuhinya actor pendukung pelaksanaan kegiatan PGP
  2. PMM hanya mengejar adoption rate
  3. Kendala yang terjadi dilapangan adalah ketidak hadirannya seluruh undangan atau peserta terutama DPRD komisi bidang pendidikan
  4. Banyaknya peraturan menteri yang muncul sehingga sering menimbulkan kebingungan
  5. Padatnya jadwal dari anggota DPRD yang menyebabkan beberapakali dibatalkannya kegiatan audience sehingga harus menyesuaikan Kembali
  6. Satuan pendidikan belum memandang AN dan Sulingjar sebagai proses perbaikan pembelajaran
  7. Hasil AN dipandang belum berdampak pada satuan pendidikan
  8. Masih terdapat Dinas Pendidikan yang mengirim wakil yang kurang bersesuaian dengan maksud kegiatan sehingga belum maksimal mengikuti kegiatan
  9. Bendahara belum memahami tata cara pengisian kertas kerja dan penatausahaan dana BOSP pada ARKAS sehingga agak kesulitan pada saat melakukan pelaporan penggunaan dana BOSP
  10. Perencanaan penggunaan dana belum dilakukan berdasarkan raport pendidikan satuan pendidikan
  11. Terdapat peserta yang tidak mengikuti kegiatan sampai akhir
  12. Kehadiran Pengawas di PMO sekolah sangat minim
  13. Rasio pengawas di Kabupaten Gorontalo tidak sesuai karena ada yang sudah pensiun dan menjelang pensiun
  14. Karena ada perpindahan guru PKP sehingga sekolah perlu meregenerasi guru PKP lagi
  15. Dalam kegiatan sebenarnya dibutuhkan 5 ruangan,,akan tetapi hanya terdapat 4 ruangan yang tersedia
  16. Penggunaan BOSKIN mengarah pada SDM tapi secara kualitas tidak ada, misalnya BOSKIN tertera biaya rapat Kepsek sebesar 1,5 juta, sehingga terkesan menghamburkan anggaran BOSKIN
  17. Alumni PKP enggan membagikan ilmu yang sudah didapat pada rekan-rekan sejawat
  18. Fasil tidak melihat secara langsung permasalahan di sekolah PSP
  19. Dinas Pendidikan di setiap Kab/Kota/Provinsi selaku Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kunci dalam penyusunan alokasi anggaran pada semua indikator prioritas SPM bidang pendidikan cenderung abai dan asal-asalan dalam penginputan alokasi anggaran pada aplikasi e-Rakortek SIPD Kemendagri
  20. Kekurangpahaman DPRD Kab/Kota/Provinsi khususnya Komisi Pendidikan tentang capaian mutu pendidikan diwilayah kerjanya dan penerjemahan regulasi - regulasi yang mendukung pelaksanaan SPM bidang pendidikan sehingga penganggaran yang dialokasikan pada indikator prioritas SPM bidang pendidikan terkesan asal dan tidak mengacu pada regulasi yang ada
  21. Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dan Renstra di setiap Kab/Kota yang belum mengakomodir indikator dan sub kegiatan pada SPM Bidang Pendidikan
  22. Pemahaman peserta masih sangat kurang terhadap pemanfaatan Rapor Pendidikan
  23. Masih banyak satuan pendidikan yang lupa password
  24. Masih banyak Satpen mengakses Rapor Pendidikan tanpa melakukan eksplorasi dan langsung melakukan Unduh RP
  25. Padatnya jadwal dari anggota DPRD yang menyebabkan beberapakali dibatalkannya kegiatan audience sehingga harus menyesuaikan Kembali
  26. Tim Perencanaan Dinas Pendidikan Gorut tidak hadir, sehingga tidak bisa memberikan konfirmasi terkait alokasi anggaran kegiatan pada indikator SPM Pendidikan
  27. Regulasi dan Juknis PPDB yang mendukung pelaksanaan program transisi PAUD-SD, masih proses tanda tangan, sementara jadwal kegiatan PPDB sudah harus segera berjalan. 28. Beberapa unsur kemenag dan Dinas Pendidikan yang diundang tidak hadir, sehingga persamaan persepsi tentang program transisi PAU dan GSS tidak maksimal
  29. Penyusunan RTL tdk maksimal karena 3 kab tdk menyusun rtl karena tdk berada di kelas
  30. Data siswa yg di sekolah inklusif tdk ada
  31. Banyak yang belum memanfaatkan chromebook yang telah diterima karena ada jalur yang terputus yaitu penyaluran chromebook dari Dinas Pendidikan (DAK) bukan ke satpen sehingga tidak ada kewajiban pihak penyedia untuk melakukan training langsung ke Satpen penerima chromebook
  32. Masih mengalami kesulitan dalam berkolaborasi dengan Disdik dimana ada yang menyambut baik namun ada juga yang menolak, sehingga program yang diajukan belum mendapatkan respon yang baik.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

A. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN APRIL adalah:

1. Mendorong dinas untuk lebih memotivasi satuan pendidikan untuk aktivasi akun belajar dan penyelesaian masalah sejumlah satuan

pendidikan yang belum melapor dana BOSP Tahun 2022

2. Terkait kompetensi pendidik di daerah Bone Bolango menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kompetensi mereka
3. Terkait rapor pendidikan yang belum keluar sampai pertengahan april ini, untuk perencanaan daerah dan satuan pendidikan masih bisa mengacu ke rapor pendidikan sebelumnya karena kekurangan dan masalah yang belum diselesaikan di rapor pendidikan sebelumnya masih perlu dimasukkan dalam perencanaan
4. Masalah kekurangan pengawas dalam pendampingan PSP Angkatan 3 segera dikoordinasikan dengan pihak - pihak terkait
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo terkait pentingnya kehadiran semua unsur pada setiap pelaksanaan rapat PMO yang dilaksanakan secara daring maupun luring
6. Diknas Kab. Gorut akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terkait implementasi program merdeka belajar dengan memberdayakan pengawas bina

B. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN MEI adalah:

1. Permasalahan yang dimunculkan pada SIMPKB, harus ditelaah dulu oleh fasilitator dan dikoordinasikan dengan dinas terkait
2. Setiap bidang di Dinas Pendidikan Gorontalo Utara agar menyusun kembali rencana kegiatan yang sesuai SPM. Tim BPMP siap mendampingi dan memfasilitasi penyusunan perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan Dinas
3. Mendorong dinas pendidikan untuk dapat hadir dalam pertemuan rutin setiap bulan
4. Untuk kegiatan selanjutnya perlu komitmen yang sama oleh semua pihak
5. Sekolah penggerak seharusnya memiliki video praktik baik yang di buat, dan hal tersebut seharusnya dipastikan dalam pendampingan yang dilakukan oleh FSP
6. Melakukan pendekatan secara personal dan persuasif kepada BGP dalam permintaan data
7. Tim PMO Kab. Gorontalo segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga data dibutuhkan dapat segera dipenuhi serta masalah yang ada dapat segera dicarikan solusinya
8. Tindak lanjut Disdik Bone Bolango terkait pemenuhan SPM akan terus didampingi oleh PMO UPT
9. Berkoordinasi untuk anggaran yang belum tersedia bisa menyampaikan rancangan sub indikator yang ada di e-Rakortek
10. Pendampingan secara berkesinambungan oleh BPMP Provinsi Gorontalo dalam mengawal penggaran SPM Pendidikan Tahun 2024 sampai APBD Tahun 2024 disahkan
11. Diperlukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk semua stakeholder yang mengampu perencanaan daerah seperti Komisi yang membidangi urusan pendidikan dan pihak Badan Keuangan Daerah seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo sesegera mungkin sebelum APBD disahkan
12. Melakukan koordinasi dengan Bappeda tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai wakil Kemendagri dalam monitoring keterlaksanaan SPM bidang pendidikan tahun 2023
13. Koordinasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota secara terus-menerus melalui PIC Perencanaan Daerah di setiap Tim PMO Provinsi/Kabupaten/Kota
14. Tim PMO Kab. Gorontalo segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga data dibutuhkan dapat segera dipenuhi serta masalah yagn ada dapat segera dicarikan solusinya
15. Tim PMO/PDM 3A/Pokja 4, segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga data dibutuhkan dapat segera dipenuhi serta masalah yagn ada dapat segera dicarikan solusinya
16. Penyusunan RKS Boskin dilakukan bersama Pengawas sekolah dan Tim BOS Dinas dan segera diinput di Arkas sebelum Pendampingan PSP. Penyusunan RKS/RAB bisa dilakukan pada IHT(bulan Juli) dan tim BOSP BPMP Gorontalo siap mendampingi
17. Untuk masalah akun belajar operator menghubungi helpdesk BPMP untuk mengatasi masalah yang ada

C. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN JUNI adalah:

1. Saran ke Disdik adalah ada reward dan punishment bagi guru yang tidak memanfaatkan PMM sebagai sumber belajar dan berkarya
2. PMM dilaksanakan secara luring, sehingga berhadapan langsung dengan fasilitator melalui kombel bisa berdiskusi terkait dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi
3. Advokasi ke Disdik untuk tidak hanya mengejar adoption rate
4. Koordinasi antara BPMP Dengan DPRD Harus Lebih Ditingkatkan, Sosialisasi Tentang Peraturan Menteri Juga Harus Lebih Sering Dilaksanakan
5. Diharapkan pada pelaksanaan kegiatan audience kedepan bisa menghadirkan seluruh pihak terkait terutama anggota DPRD bidang pendidikan
6. Koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan serta OPD terkait lainnya
7. Silaturahmi secara berkesinambungan baik formal maupun informal dengan DPRD Kab/Kota,Provinsi khususnya dengan Tim Komisi Pendidikan
8. Perlu sosialisasi dan pendampingan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini melalui bapak dan ibu Pengawas Bina di masing-masing satuan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan pentingnya Rapor Pendidikan sebgai bahan evaluasi sekaligus bahan perencanaan untuk perbaikan kualitas pembelajaran
9. Khusus Dinas Pendidikan sebaiknya perlu memperhatikan konten yang akan dibahas sehingga perlu memperhatikan SDM yang berkompeten untuk berpartisipasi dalam kegiatan demi keberlanjutan kegiatan
10. Untuk kedepannya perencanaan dana dilakukan berdasarkan raport pendidikan masing - masing satuan pendidikan dengan memperhatikan prioritas rekomendasinya
11. Diberikan pemahaman bagaimana cara melakukan pengisian kertas kerja melalui aplikasi ARKAS
12. Karena dalam pelaksanaan kegiatan ruangan yang tersedia tidak cukup, maka ruangan aula di bagi untuk 2 kelas. Namun dalam kelas tidak menggunakan sound system karena akan saling bertabrakan suara
13. Silaturahmi secara berkesinambungan baik formal maupun informal dengan DPRD Kab/Kota, Provinsi khususnya dengan Tim Komisi Pendidikan
14. Tim PDM 04 / Tim PMO Provinsi, Kab/Kota agar melakukan koordinasi kembali dengan Tim perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Gorut untuk melakukan pengecekan isian anggaran pada SIPD guna mengawal Pemenuhan Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024
15. Dibutuhkan sinergitas dan usaha yang keras dari berbagai pihak untuk dapat mendorong satuan pendidikan agar dapat melakukan PBD berdasarkan Rapor Pendidikan
16. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang akunya bermasalah untuk dilakukan reset
17. Mendorong santuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan eksplorasi Rapor Pendidikan
18. Koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan terbitnya regulasi dan juknis PPDB, yang mendukung program transisi PAUD-SD

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ



19. Koordinasi dengan kantor kementerian agama harus terus dibangun, agar pemenuhan hak anak bisa mencakup juga bagi anak - anak di sekolah dibawah naungan kemenag
20. Untuk Rencana tindak lanjut gerakan sekolah sehat segera dikoordinasikan bagi kab/kota yang belum ada
21. Melakukan penjangkauan data siswa di sekolah inklusif
22. Untuk menghasilkan kualitas gambar atau Video dalam proses kegiatan Live Streaming atau Pembuatan Film Dokumenter, Masih Perlu Penambahan sarana pendukung seperti Kamera dan perangkat pendukung Lainnya
23. Melakukan kolaborasi dengan Google maupun mitra google.

## **B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

### **Progress / Kegiatan :**

A. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 BULAN APRIL, adalah:

1. Persiapan Rapat PMO dengan BGP
2. Rapat PMO dengan Pemerintah Daerah

B. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 BULAN MEI, adalah :

1. Rapat Persiapan PMO dengan BGP bulan Mei (POHUWATO)
2. Rapat PMO bulan Mei dengan Pemerintah Daerah secara DARING/LURING
3. Semarak Bulan Merdeka Belajar
4. Forum Pemangku Kepentingan angk 1 dan 2 ( Kab. Pohuwato,dan Kab. Gorontalo)
5. Analisis delta nilai rapor psp tahun 2021 - 2022 per masing-masing individu sekolah (Rapat awal pembahasan bersama BGP)
6. Pengumpulan data bukti karya/ konten berbagi praktik baik yang di unggah di PMM
7. Monev Program Kampus Mengajar Angk 5 dan Pemanfaatan Hibah Buku Bacaan Bermutu
8. Penyusunan bahan advokasi PBD satpen ke dinas
9. Pendampingan perencanaan Daerah Tahap 1
10. Koordinasi berkala terkait perencanaan daerah ke PDM 04C dan daerah setiap pekan ke dua
11. Wawancara Isu isu Strategis Program Merdeka Belajar Khususnya Perencanaan Berbasis data Satuan Pendidikan
12. Melaksanakan finalisasi bahan dan metode mitigasi resiko
13. Koordinasi dengan stakeholder terkait dengan Kampanye GSS
14. Percepatan Penyaluran Dana BOSP (dilaksanakan bersama rapat PMO bulan Mei)
15. Koordinasi intensif terkait percepatan BOSP Provinsi, Kab/Kota
16. Koordinasi pelaksanaan kesiapan pelaksanaan Asesmen Nasional melalui rapat PMO bulan Mei 2023
17. Koordinasi terkait progres aktivasi akun belajar.id jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, Kesetaraan melalui rapat PMO bulan Mei 2023

C. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 BULAN JUNI, adalah :

1. Rapat Persiapan PMO bulan Juni 2023 (KABGOR)
2. Rapat PMO bulan Juni 2023
3. Rakortek AN dan Pembekalan Pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk Peningkatan Delta AN Tahun 2023
4. Bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan SIPLah
5. Pendampingan percepatan pelaporan Dana BOSP melalui ARKAS 4.0
6. Forum Pemangku Kepentingan Angkatan 1 dan 2 ( Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo)
7. Rapat PMO bulan Juni 2023
8. Pelaksanaan FGD bersama Pemda dan DPRD
9. Advokasi ke dinas terkait pemanfaatan rapor satpen
10. Workshop Perencanaan Program Transisi PAUD-SD
11. Pendampingan Sekolah Piloting Transisi PAUD-SD
12. Mengadvokasi Dinas Pendidikan untuk melakukan kampanye transisi PAUD-SD, bekerjasama dengan Pokja Bunda PAUD
13. Rakor program GSS kepada pemerintah daerah
14. Sharing session pelaksanaan mentoring sistem UPT
15. Podcast live streaming Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Gorontalo
16. Rapat Koordinasi dengan Daerah Terkait Komitmen Pemda terhadap
17. Pendidikan Khusus dan Iklusif di masing2 Kabupaten/Kota
18. Pertemuan dengan Pihak Google terkait optimalisasi pemanfaatan chromebook dan belajar id
19. Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan akun belajar. Id
20. Optimalisasi Pemanfaatan Akun Belajar.id

### **Kendala / Permasalahan :**

A. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN APRIL , adalah:

1. Banyak kendala / masalah di sekolah penggerak yang berulang dilaporkan atau belum ditindaklanjuti baik oleh PMO level sekolah atau oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota sehingga masih terbaca di sistem dan secara otomatis akan terbaca di level Pusat
2. Laporan yang disampaikan oleh koordinator fasilitator belum dipilah berdasarkan kategori masalah sehingga agak sulit untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan
3. Terkait pembekalan komite pembelajaran, hanya mengambil sampel 2 orang pendidik di jenjang SMP yang akan dibekali
4. Terkait rapor pendidikan yang selalu keluar nanti pertengahan tahun sementara dinas dan satuan pendidikan harus membuat perencanaan di awal tahun belum berdasarkan rapor pendidikan tahun ini.
5. Bentuk strategi pendampingan bagi satuan pendidikan yang belum memiliki akun belajar.id belum maksimal
6. Bentuk koordinasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan di Daerah terkait program Merdeka Belajar belum maksimal
7. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi terkait program Merdeka Belajar belum dilakukan secara periodik
8. Strategi pendampingan untuk perencanaan berbasis data bagi satuan Pendidikan belum maksimal
9. Kurangnya kompetensi pendidik , terutama di daerah pesisir menjadi dilema bagi dinas dan tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan pelaksanaan program - program kemendikbudristek yang akan diimplementasikan di satuan - satuan pendidikan di daerah pesisir

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

10. Kekurangan pengawas di Kab. Bone Bolango yang akan mendampingi dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Angkatan 3
  11. Adanya sejumlah satuan pendidikan jenjang PAUD yang terbaca belum melaporkan penggunaan dan BOP tahun 2022
  12. Tindak lanjut eksplorasi dan unduh rekomendasi rapor Pendidikan untuk jenjang PAUD belum maksimal
  13. Beberapa unsur peserta tidak hadir seperti bagian perencanaan dinas, PJ BOS jenjang SD dan SMP, Admin SIMPKB sehingga hal-hal yang perlu disampaikan dan di diskusikan tidak berjalan maksimal
  14. Peserta rapat PMO dari Dinas Pendidikan tidak datang tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan sedikit tertunda
  15. Rendahnya aktivasi akun belajar terutama untuk jenjang PAUD dan Kesetaraan
- B. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN MEI adalah :
1. Adanya masalah yang selalu berulang , yang selalu diangkat pada rapat PMO yang belum juga diselesaikan
  2. Masalah mutasi kepala sekolah penggerak yang perlu menjadi perhatian kita, agar bisa dicegah atau diminimalisir, karena adanya mutasi kepala sekolah dapat mengganggu struktur pelaksanaan program sekolah penggerak
  3. Masih ada 200 masalah terkait PSP yang belum ditanggapi Dinas
  4. Dinas mendapatkan dana peruntukkan pendidikan tetapi tidak mengetahui cara menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan PSP, IKM dan PBD
  5. Tidak semua unsur atas sasaran tidak bisa hadir dalam rapat karena banyaknya kegiatan, hal ini berdampak tidak terselesaikannya masalah dan isu-isu dan tidak dapat memitigasi resiko yang terjadi di daerah
  6. Komitmen waktu masih perlu ditingkatkan, khususnya tentang peralihan tema kegiatan
  7. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki video praktik baik, sehingga yang ditampilkan hanya berupa paparan
  8. Permintaan Data dari pihak BGP agak terkendala birokrasi
  9. Masih terdapat sekolah penggerak yang lambat dalam merespon permintaan data dari BPMP
  10. Minimnya kreativitas mahasiswa dalam menciptakan kegiatan literasi dan numerasi di sekolah tempatnya bertugas. Demikian pula buku yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik
  11. Belum semua kepala sekolah sudah memperoleh pelatihan tentang Kampus mengajar dan pengelolaan buku hibah
  12. Bagian Perencanaan Disdik Kabupaten Gorontalo belum melakukan penginputan E-Rakortek sebagai tindak lanjut kegiatan Pendampingan Perencanaan Daerah Tahap 1. (Kab. Gorontalo)
  13. Data SPM yang telah diinput dalam e-Rakortek terbaca beberapa sub indikator belum terpenuhi (terdapat sub indikator yang belum dianggarkan pembiayaannya)
  14. Untuk E rakortek itu belum di selesaikan karena dinas tidak bisa mengakses karena admin masih ada kedukaan dan bisa membuka aplikasi itu nanti 2 hari ini baru bisa membuka penginputan e- Rakortek
  15. Dinas mendapatkan dana peruntukkan pendidikan tetapi tidak mengetahui cara menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan PSP, IKM dan PBD
  16. Internal Dinas Pendidikan belum mendiskusikan secara komprehensif seluruh indikator kinerja SPM Pendidikan tahun 2024 pada seluruh bidang/urusan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini agak menghambat karena beberapa Kabid masih menegosiasikan kegiatan dibidangnya yang harus terakomodir tahun 2024 dengan Kasubag Perencanaan masing-masing Dinas Pendidikan
  17. Aplikasi e-Rakortek Kemendagri belum diupdate oleh Bappeda Kab/Kota sehingga pihak Dinas Pendidikan harus menunggu Bappeda mengupdate data pada aplikasi e-Rakortek baru bisa menginput seluruh indikator SPM Tahun 2024
  18. Format yang didownload dari Surat Menteri untuk beberapa indikator disatukan sehingga diasumsikan oleh pihak Dinas Pendidikan bahwa penganggarannya juga bisa disatukan untuk semua level pendidikan, hal ini tidak sesuai dengan format inputan yang sudah dimutakhirkan pada aplikasi e-Rakortek Kemendagri
  19. Kemampuan fiskal dan kebijakan di beberapa kabupaten agak menyulitkan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan Tahun 2024, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Keuangan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota
  20. Untuk monitoring keterlaksanaan SPM bidang Pendidikan tahun 2023, kendala yang sering terjadi adalah seringkali aplikasi yang digunakan bermasalah sehingga Dinas Pendidikan mengalami kendala dalam penginputan realisasi yang dilakukan
  21. Untuk monitoring pelaksanaan perencanaan daerah tahun 2024 kendala yang dihadapi adalah pejabat yang berwenang dalam pengambilan kebijakan tidak berada ditempat sehingga menjadi kendala penetapan sub kegiatan SPM yang akan dialokasikan anggarannya tahun 2024
  22. Intensitas kegiatan ditingkat Dinas Pendidikan yang cukup tinggi sehingga staf yang berwenang dalam penginputan aplikasi e-Rakortek mengalami kendala waktu
  23. Responden ada yang tidak sempat diwawancarai yaitu Kepala dinas Pendidikan Kota Gorontalo Karena Jadwal yang Padat sehingga tidak Punya waktu untuk di wawancarai, Fasilitas yang digunakan masih kurang memadai, pada saat wawancara Responden mengeluh tentang keterlambatan keluarnya hasil dari Rapor Pendidikan satuan Pendidikan yang menyebabkan terlambatnya penrencanaan satuan Pendidikan
  24. Belum ada tindak lanjut terhadap permintaan data sekolah piloting gerakan sekolah sehat di Kabupaten Gorontalo (kabupaten Gorontalo)
  25. Kurangnya informasi dan koordinasi dimasing-masing Kabupaten/Kota, kurangnya respon dari PIC dan Dinas Pendidikan Kab./Kota, Upaya promosi kesehatan di sekolah selama ini belum optimal, Dengan dimulainya kembali pembelajaran tatap muka, sekolah perlu memperhatikan kembali kondisi kesehatan anak (Konsumsi makanan berisiko setiap hari, Status Gizi, Kebersihan Diri dan Aktivitas Fisik)
  26. Masih terdapat beberapa sekolah jenjang Kesetaraan, PAUD dan SD yang belum mendapatkan dana BOSP tahap 1
  27. Sekolah Penggerak belum memahami penyusunan RAB dana Boskin
  28. Terdapat sekolah yang tidak mengikuti AN (karena siswanya baru kelas 4) sehingga belum bisa download Rekomendasi di Rapor Pendidikan
  29. Masih ada sekolah yang belum bisa membuka akun belajar
  30. Rapot pendidikan yang belum login itu karena belum terbuka akun raport pendidikannya.
  31. Dinas mendapatkan dana peruntukkan pendidikan tetapi tidak mengetahui cara menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan PSP, IKM dan PBD
- C. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN JUNI adalah :
1. Tidak terpenuhinya actor pendukung pelaksanaan kegiatan PGP
  2. PMM hanya mengejar adoption rate
  3. Kendala yang terjadi dilapangan adalah ketidak hadiran seluruh undangan atau peserta terutama DPRD komisi bidang pendidikan
  4. Banyaknya peraturan menteri yang muncul sehingga sering menimbulkan kebingungan
  5. Padatnya jadwal dari anggota DPRD yang menyebabkan beberapakali dibatalkannya kegiatan audience sehingga harus

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

menyesuaikan Kembali

6. Satuan pendidikan belum memandang AN dan Sulingjar sebagai proses perbaikan pembelajaran
7. Hasil AN dipandang belum berdampak pada satuan pendidikan
8. Masih terdapat Dinas Pendidikan yang mengirim wakil yang kurang bersesuaian dengan maksud kegiatan sehingga belum maksimal mengikuti kegiatan
9. Bendahara belum memahami tata cara pengisian kertas kerja dan penatausahaan dana BOSP pada ARKAS sehingga agak kesulitan pada saat melakukan pelaporan penggunaan dana BOSP
10. Perencanaan penggunaan dana belum dilakukan berdasarkan raport pendidikan satuan pendidikan
11. Terdapat peserta yang tidak mengikuti kegiatan sampai akhir
12. Kehadiran Pengawas di PMO sekolah sangat minim
13. Rasio pengawas di Kabupaten Gorontalo tidak sesuai karena ada yang sudah pensiun dan menjelang pensiun
14. Karena ada perpindahan guru PKP sehingga sekolah perlu meregenerasi guru PKP lagi
15. Dalam kegiatan sebenarnya dibutuhkan 5 ruangan,,akan tetapi hanya terdapat 4 ruangan yang tersedia
16. Penggunaan BOSKIN mengarah pada SDM tapi secara kualitas tidak ada, misalnya BOSKIN tertera biaya rapat Kepsek sebesar 1,5 juta, sehingga terkesan menghamburkan anggaran BOSKIN
17. Alumni PKP enggan membagikan ilmu yang sudah didapat pada rekan-rekan sejawat
18. Fasil tidak melihat secara langsung permasalahan di sekolah PSP
19. Dinas Pendidikan di setiap Kab/Kota/Provinsi selaku Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kunci dalam penyusunan alokasi anggaran pada semua indikator prioritas SPM bidang pendidikan cenderung abai dan asal-asalan dalam penginputan alokasi anggaran pada aplikasi e-Rakortek SIPD Kemendagri
20. Kekurangpahaman DPRD Kab/Kota/Provinsi khususnya Komisi Pendidikan tentang capaian mutu pendidikan diwilayah kerjanya dan penerjemahan regulasi - regulasi yang mendukung pelaksanaan SPM bidang pendidikan sehingga penganggaran yang dialokasikan pada indikator prioritas SPM bidang pendidikan terkesan asal dan tidak mengacu pada regulasi yang ada
21. Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dan Renstra di setiap Kab/Kota yang belum mengakomodir indikator dan sub kegiatan pada SPM Bidang Pendidikan
22. Pemahaman peserta masih sangat kurang terhadap pemanfaatan Rapor Pendidikan
23. Masih banyak satuan pendidikan yang lupa password
24. Masih banyak Satpen mengakses Rapor Pendidikan tanpa melakukan eksplorasi dan langsung melakukan Unduh RP
25. Padatnya jadwal dari anggota DPRD yang menyebabkan beberapakali dibatalkannya kegiatan audience sehingga harus menyesuaikan Kembali
26. Tim Perencanaan Dinas Pendidikan Gorut tidak hadir, sehingga tidak bisa memberikan konfirmasi terkait alokasi anggaran kegiatan pada indikator SPM Pendidikan
27. Regulasi dan Juknis PPDB yang mendukung pelaksanaan program transisi PAUD-SD, masih proses tanda tangan, sementara jadwal kegiatan PPDB sudah harus segera berjalan. 28. Beberapa unsur kemenag dan Dinas Pendidikan yang diundang tidak hadir, sehingga persamaan persepsi tentang program transisi PAU dan GSS tidak maksimal
29. Penyusunan RTL tdk maksimal karena 3 kab tdk menyusun rtl karena tdk berada di kelas
30. Data siswa yg di sekolah inklusif tdk ada
31. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Podcast livestreaming Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Gorontalo, alat atau sarana dan Prasarana pendukung seperti Kamera, Pencahayaan dan alat alat lain masih perlu penambahan seperti kamera dengan kualitas yang lebih baik yang ada sekarang
32. Banyak yang belum memanfaatkan chromebook yang telah diterima karena ada jalur yang terputus yaitu penyaluran chromebook dari Dinas Pendidikan (DAK) bukan ke satpen sehingga tidak ada kewajiban pihak penyedia untuk melakukan training langsung ke Satpen penerima chromebook
33. Masih mengalami kesulitan dalam berkolaborasi dengan Disdik dimana ada yang menyambut baik namun ada juga yang menolak, sehingga program yang diajukan belum mendapatkan respon yang baik.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

A. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN APRIL adalah:

1. Mendorong dinas untuk lebih memotivasi satuan pendidikan untuk aktivasi akun belajar dan penyelesaian masalah sejumlah satuan pendidikan yang belum melapor dana BOSP Tahun 2022
2. Terkait kompetensi pendidik di daerah Bone Bolango menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kompetensi mereka
3. Terkait rapor pendidikan yang belum keluar sampai pertengahan april ini, untuk perencanaan daerah dan satuan pendidikan masih bisa mengacu ke rapor pendidikan sebelumnya karena kekurangan dan masalah yang belum diselesaikan di rapor pendidikan sebelumnya masih perlu dimasukkan dalam perencanaan
4. Masalah kekurangan pengawas dalam pendampingan PSP Angkatan 3 segera dikoordinasikan dengan pihak - pihak terkait
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo terkait pentingnya kehadiran semua unsur pada setiap pelaksanaan rapat PMO yang dilaksanakan secara daring maupun luring
6. Diknas Kab. Gorut akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terkait implementasi program merdeka belajar dengan memberdayakan pengawas bina

B. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN MEI adalah:

1. Permasalahan yang dimunculkan pada SIMPKB, harus ditelaah dulu oleh fasilitator dan dikoordinasikan dengan dinas terkait
2. Setiap bidang di Dinas Pendidikan Gorontalo Utara agar menyusun kembali rencana kegiatan yang sesuai SPM. Tim BPMP siap mendampingi dan memfasilitasi penyusunan perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan Dinas
3. Mendorong dinas pendidikan untuk dapat hadir dalam pertemuan rutin setiap bulan
4. Untuk kegiatan selanjutnya perlu komitmen yang sama oleh semua pihak
5. Sekolah penggerak seharusnya memiliki video praktik baik yang di buat, dan hal tersebut seharusnya dipastikan dalam pendampingan yang dilakukan oleh FSP
6. Melakukan pendekatan secara personal dan persuasif kepada BGP dalam permintaan data
7. Perlu ada SK Pengelola Buku Bacaan Bermutu
8. Perlu adanya pengelola Buku Bacaan Bermutu dan Perpustakaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah
9. Perlu ada Pengelolaan perpustakaan
10. Buku Bacaan Bermutu dimanfaatkan dengan memberikan literasi 15 setiap membuka pelajaran di kelas
11. Perlu dilakukan penjenjangan/klasifikasi dan pelebelan Buku Bacaan Bermutu

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

12. Perlu adanya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Buku Bacaan Bermutu dan Perpustakaan
  13. Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu
  14. Melakukan pendampingan pelatihan tentang Kampus mengajar dan pengelolaan buku hibah terhadap Kepsek yang belum mengikuti kegiatan sejenis
  15. Tim PMO Kab. Gorontalo segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga data dibutuhkan dapat segera dipenuhi serta masalah yang ada dapat segera dicarikan solusinya
  16. Tindak lanjut Disdik Bone Bolango terkait pemenuhan SPM akan terus didampingi oleh PMO UPT
  17. Berkoordinasi untuk anggaran yang belum tersedia bisa menyampaikan rancangan sub indikator yang ada di e Rakortek
  18. Pendampingan secara berkesinambungan oleh BPMP Provinsi Gorontalo dalam mengawal penggaran SPM Pendidikan Tahun 2024 sampai APBD Tahun 2024 disahkan
  19. Diperlukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk semua stakeholder yang mengampu perencanaan daerah seperti Komisi yang membidangi urusan pendidikan dan pihak Badan Keuangan Daerah seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota Gorontalo sesegera mungkin sebelum APBD disahkan
  20. Melakukan koordinasi dengan Bappeda tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai wakil Kemendagri dalam monitoring keterlaksanaan SPM bidang pendidikan tahun 2023
  21. Koordinasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota secara terus-menerus melalui PIC Perencanaan Daerah di setiap Tim PMO Provinsi/Kabupaten/Kota
  22. Responden yang belum sempat diwawancarai bias di jadwalkan Kembali untuk Wawancara, Alat atau sarana untuk wawancara busa Menggunakan alat atau sarana yang memadai
  23. Tim PMO Kab. Gorontalo segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga data dibutuhkan dapat segera dipenuhi serta masalah yagn ada dapat segera dicarikan solusinya
  24. Tim PMO/PDM 3A/Pokja 4, segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga data dibutuhkan dapat segera dipenuhi serta masalah yagn ada dapat segera dicarikan solusinya
  25. Penyusunan RKS Boskin dilakukan bersama Pengawas sekolah dan Tim BOS Dinas dan segera diinput di Arkas sebelum Pendampingan PSP. Penyusunan RKS/RAB bisa dilakukan pada IHT(bulan Juli) dan tim BOSP BPMP Gorontalo siap mendampingi
  26. Untuk masalah akun belajar operator menghubungi helpdesk BPMP untuk mengatasi masalah yang ada
- C. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan bulan Juni adalah:
1. Saran ke Disdik adalah ada reward dan punishment bagi guru yang tidak memanfaatkan PMM sebagai sumber belajar dan berkarya
  2. PMM dilaksanakan secara luring, sehingga berhadapan langsung dengan fasilitator melalui kombel bisa berdiskusi terkait dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi
  3. Advokasi ke Disdik untuk tidak hanya mengejar adoption rate
  4. Koordinasi antara BPMP Dengan DPRD Harus Lebih Ditingkatkan, Sosialisasi Tentang Peraturan Menteri Juga Harus Lebih Sering Dilaksanakan
  5. Diharapkan pada pelaksanaan kegiatan audience kedepan bisa menghadirkan seluruh pihak terkait terutama anggota DPRD bidang pendidikan
  6. Koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Pendidikan serta OPD terkait lainnya
  7. Silaturahmi secara berkesinambungan baik formal maupun informal dengan DPRD Kab/Kota,Provinsi khususnya dengan Tim Komisi Pendidikan
  8. Perlu sosialisasi dan pendampingan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini melalui bapak dan ibu Pengawas Bina di masing-masing satuan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan pentingnya Rapor Pendidikan sebgai bahan evaluasi sekaligus bahan perencanaan untuk perbaikan kualitas pembelajaran
  9. Khusus Dinas Pendidikan sebaiknya perlu memperhatikan konten yang akan dibahas sehingga perlu memperhatikan SDM yang berkompeten untuk berpartisipasi dalam kegiatan demi keberlanjutan kegiatan
  10. Untuk kedepannya perencanaan dana dilakukan berdasarkan raport pendidikan masing - masing satuan pendidikan dengan memperhatikan prioritas rekomendasinya
  11. Diberikan pemahaman bagaimana cara melakukan pengisian kertas kerja melalui aplikasi ARKAS
  12. Karena dalam pelaksanaan kegiatan ruangan yang tersedia tidak cukup, maka ruangan aula di bagi untuk 2 kelas. Namun dalam kelas tidak menggunakan sound system karena akan saling bertabrakan suara
  13. Silaturahmi secara berkesinambungan baik formal maupun informal dengan DPRD Kab/Kota, Provinsi khususnya dengan Tim Komisi Pendidikan
  14. Tim PDM 04 / Tim PMO Provinsi, Kab/Kota agar melakukan koordinasi kembali dengan Tim perencanaan Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo untuk melakukan pengecekan isian anggaran pada SIPD guna mengawal Pemenuhan Indikator Prioritas SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024
  15. Dibutuhkan sinergitas dan usaha yang keras dari berbagai pihak untuk dapat mendorong satuan pendidikan agar dapat melakukan PBD berdasarkan Rapor Pendidikan
  16. Mengidentifikasi satuan pendidikan yang akunya bermasalah untuk dilakukan reset
  17. Mendorong santuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan eksplorasi Rapor Pendidikan
  18. Koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan terbitnya regulasi dan juknis PPDB, yang mendukung program transisi PAUD-SD
  19. Koordinasi dengan kantor kementerian agama harus terus dibangun, agar pemenuhan hak anak bisa mencakup juga bagi anak - anak di sekolah dibawah naungan kemenag
  20. Untuk Rencana tindak lanjut gerakan sekolah sehat segera dikoordinasikan bagi kab/kota yang belum ada
  21. Melakukan penjaringan data siswa di sekolah inklusif
  22. Untuk menghasilkan kualitas gambar atau Video dalam proses kegiatan Live Streaming atau Pembuatan Film Dokumenter, Masih Perlu Penambahan sarana pendukung seperti Kamera dan perangkat pendukung Lainnya
  23. Melakukan kolaborasi dengan Google maupun mitra google

## C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

### Progress / Kegiatan :

Untuk mendukung tercapainya target nilai SAKIP yang telah ditetapkan, BPMP Provinsi Gorontalo telah menyusun konsep SAKIP, yang meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu : 1) Perencanaan : menyiapkan dokumen perencanaan yang terdiri dari rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kerja dan rencana aksi  
2) Pengukuran capaian kinerja : mengukur ketercapaian target triwulan 2 yang telah di tetapkan dan di input pada aplikasi SPASIKITA (SIMPROKA)  
3) Laporan kinerja : mengidentifikasi unsur-unsur yang harus dimuat dalam laporan kinerja instansi serta melihat bagaimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

**Kendala / Permasalahan :**

- 1) Renstra revisi 2023 sudah tersedia tetapi belum diformalkan
- 2) Masih terdapat beberapa dokumen fisik yang belum terdokumentasi dengan baik

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- 1) Melakukan finalisasi sekaligus memformalkan renstra revisi 2023
- 2) Melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam implementasi SAKIP satuan kerja

**D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo**

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

**Progress / Kegiatan :**

BPMP Provinsi Gorontalo berada di peringkat pertama untuk capaian IKPA triwulan 2 yaitu sebesar 96,46 serta capaian nilai EKA sebesar 32,7.

**Kendala / Permasalahan :**

NKA masih terbaca rendah pada aplikasi SPASIKITA karena nilai IKPA masih terbaca 0 ( belum ada penarikan data dari SAKTI).

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya serta melakukan koordinasi dan pemantauan terkait unsur-unsur yang menjadi penyumbang nilai EKA dan IKPA di satuan kerja.

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Melaksanakan program prioritas nasional sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan disepakati dalam rangka mendukung pencapaian IKK sesuai perjanjian kinerja tahun 2023
2. Melakukan evaluasi terhadap strategi/tindaklanjut atas kendala/permasalahan pada pelaksanaan program dan kegiatan triwulan 2 untuk perbaikan program/kegiatan berikutnya
3. Segera melakukan finalisasi Renstra hasil reuiu tahun 2023 dan kemudian diformalkan sebagai dokumen pendukung implementasi SAKIP BPMP Provinsi Gorontalo tahun 2023
4. Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait unsur-unsur yang menjadi penyumbang nilai EKA dan IKPA BPMP Provinsi Gorontalo.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Gorontalo, 06 Juli 2023

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN III  
BPMP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI GORONTALO s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW3 : 0	TW3 : 0
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30.00	TW3 : 0	TW3 : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Predikat	A	TW3 : -	TW3 : -
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Nilai	84	TW3 : 0	TW3 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.19.485.070.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 30 Oktober 2023 sebesar **Rp. 15.294.495.174** atau **78.49%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 30 Oktober 2023 **Rp. 4.190.574.826**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

**Progress / Kegiatan :**

A. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 BULAN JULI, adalah :

- 1) Workshop penguatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka (IKM)
- 2) Sosialisasi Kebijakan AN ke Satuan Pendidikan
- 3) Percepatan Penyaluran Dana BOSP Tahap 1
- 4) Koordinasi terkait Pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS dan BOP
- 5) Seminar awal kajian spm bidang pendidikan tingkat TK-PAUD, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kabupaten boalemo
- 6) Rapat evaluasi pencapaian spm pendidikan Provinsi Gorontalo
- 7) Seminar awal kajian spm bidang pendidikan tingkat TK-PAUD, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kabupaten Boalemo
- 8) Rapat persiapan pendampingan PBD Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi Gorontalo tahun 2023
- 9) Workshop penyusunan strategi pengimbasan, peningkatan nilai rapor pendidikan dan kesinambungan program sekolah penggerak
- 10) Koordinasi satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 dan 2
- 11) Harmonisasi Keberlanjutan Program Transisi PAUD-SD
- 12) Advokasi dan pendampingan dalam rangka implementasi Sekolah sehat di Satuan Pendidikan Binaan
- 13) Koordinasi Program Sekolah Sehat
- 14) Advokasi dan pendampingan dalam rangka implementasi Sekolah sehat di Satuan Pendidikan Binaan
- 15) pengembangan sekolah karisma bunga bangsa bersama PDM 12 BPMP Provinsi Gorontalo
- 16) Koordinasi Teknis dengan pemangku kepentingan
- 17) Pembahasan Draf Regulasi Program Sekolah Penggerak dan Program Mitra Pembangunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
- 18) Pendampingan Sekolah Piloting Program Transisi PAUD-SD Tahap 2 Tahun 2023
- 19) Workshop Penyusunan Strategi Optimalisasi Chromebook, Belajar.id dan Rapor Pendidikan dengan Pemerintah Daerah Tahun 2023
- 20) Coaching clinic akses rapor pendidikan, pemanfaatan chromebook, dan akun belajar.id provinsi Gorontalo tahun 2023 (Kab. Bonbol, Kota Gorontalo, Gorut)

B. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 BULAN AGUSTUS, adalah:

- 1) Workshop 6 Strategi IKM Bagi Pengawas Sekolah

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 2) Monev Persiapan Pelaksanaan AN Tahun 2023(Gladi Bersih) jenjang SMA/Kesetaraan
  - 3) Monev Pelaksanaan AN Tahun 2023 Jenjang SMA/Kesetaraan
  - 4) Pendampingan PBD Penyusunan Rkt & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan
  - 5) Pendampingan ARKAS 4.0
  - 6) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP
  - 7) Pemetaan indikator dan sub indikator SPM dalam RKPD
  - 8) Pendampingan sekolah binaan Gerakan Sekolah Sehat
  - 9) Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Transformasi Pendidikan Khusus dan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah
  - 10) Pembahasan draf regulasi kebijakan Merdeka Belajar & Penggalangan Mitra Pembangunan
  - 11) Advokasi dalam menciptakan Transformasi Pembelajaran Menyenangkan bersama belajar.id dan Chromebook
- C. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 BULAN SEPTEMBER, adalah:
- 1) Pendampingan PBD Penyusunan RKT & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan Kepada Satuan Pendidikan Wilayah Dan Pengawas Bina SD/SMP/Kesetaraan Wilayah Kab/Kota
  - 2) Pendampingan PBD Pemda Tahap II di Kabupaten Gorontalo Utara
  - 3) Kegiatan Studi Tiru ke BPMP Provinsi DIY
  - 4) Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah
  - 5) Pembahasan draf regulasi KMB & Mitra Pembangunan Daerah
  - 6) Pendampingan ke satuan Pendidikan Piloting terkait Kampanye Sekolah Sehat
  - 7) Monev Pelaksanaan AN Tahun 2023 Jenjang SMP/Paket B Sederajat
  - 8) Koordinasi untuk Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan
  - 9) Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan belajar id untuk satuan PAUD di Kabupaten Gorontalo
  - 10) Koordinasi Optimalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA,SMK, SLB/kesetaraan melalui zoom meeting
  - 11) Analisis rapor Pendidikan Sekolah PSP angkatan 3
  - 12) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP angkatan 2 untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

#### **Kendala / Permasalahan :**

A. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN JULI, adalah:

- 1) Terdapat Guru, Kepsek & pengawas memiliki akun belajar.id tetapi belum memahami cara memanfaatkannya
- 2) Pemanfaatan Akun belajar.id untuk masuk ke PMM hanya dalam bentuk sosialisasi
- 3) Masalah yang sering ditemukan baik oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo sama setiap tahun yakni satuan pendidikan melakukan tumpuk pajak dimana pajak yang telah dipungut tidak segera dilakukan penyetoran.
- 4) Waktu pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan strategi Pengimbasan PSP yang terbatas karena setelah draft juknis jadi, kemudian dipaparkan terdapat masukan-masukan disampaikan untuk perbaikan juknis tersebut, akan tetapi masukan-masukan tersebut tidak bisa langsung diperbaiki karena terbatasnya waktu yang ada
- 5) Permasalahan yang dihipunkan dari pelaksanaan KSS di sekolah piloting GSS adalah belum seluruh sekolah binaan yang melakukan Sosialisasi di karenakan kehadiran siswa belum maksimal karena masih dalam masa libur semester
- 6) Terdapat sekolah yang belum memiliki kepsek definitif, sehingga berdampak pada pemanfaatan akun belajar id, untuk login ke PMM
- 7) Kepala Lembaga PAUD dan Pengelola PKBM tidak dilibatkan pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan AN ke Satuan Pendidikan karena berada di bawah Bidang PAUD PNF
- 8) Dana BOSP tahap 1 terlambat masuk ke rekening sekolah
- 9) Masih banyak sekolah yang tidak memiliki akses internet
- 10) Satuan pendidikan belum memahami juknis BOSP
- 11) Sekolah belum memahami pencatatan Dana BOSP di aplikasi simda dan SIPD operator
- 12) Unsur BAPPEDA Kabupaten Boalemo belum memahami mengenai SPM Pendidikan yang menjadi amanat surat MM tentang SPM Pendidikan
- 13) Kajian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh pihak ke 3 yaitu Universitas Negeri Gorontalo dengan fokus kajian pada 4 standar nasional pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan dimana fokus kajian yang dibahas tidak berdasarkan hasil Rapor Pendidikan 2022 yang telah rilis pada tanggal 5 Juli 2023
- 14) Masih terdapat Dinas Pendidikan yang mengirim wakil yang kurang bersesuaian dengan maksud kegiatan sehingga belum maksimal mengikuti kegiatan. Hal ini sangat berpengaruh pada proses tindak lanjut di masing-masing Kabupaten / Kota dan Provinsi Gorontalo (Menentukan titik sasaran kegiatan dan personil yang dihadirkan)
- 15) Terdapat dinas pendidikan belum menerbitkan SK pengimbasan PSP , sehingga tim kesulitan untuk mencros cek sekoah sasaran pengimbasan
- 16) Dibeberapa sekolah penggerak tidak terdapat internet yang lancar sehingga bisa menyebabkan terlambatnya akses belajar
- 17) Pemangku kepentingan di Biro Kesra dan Dinas Kesehatan tidak berada ditempat karena sedang mengikuti kegiatan diluar kantor. Adapun Kendala dalam pelaksanaan Program KSS di Biro Kesra adalah TP UKS belum aktif dalam menjalankan program kerjanya. Sedangkan di Dinas Kesehatan Provinsi kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya sinergitas program antara Dikes dengan Dinas Pendidikan maupun TP UKS Provinsi terkait dengan pendataan/penjaringan kesehatan disatuan pendidikan
- 18) Masih terdapat beberapa sekolah yang tidak sempat hadir dalam zoom meeting tersebut sehingga belum diperoleh informasi terkait implementasi sekolah sehat di satuan pendidikan tersebut
- 19) Masih terdapat sekolah binaan yang belum melaksanakan sosialisasi Kampanye sekolah sehat dan pengisian asesmen awal khusus peserta didik
- 20) Masih kurangnya sumberdaya yang berkompeten dalam pendidikan khusus
- 21) Tenaga pendidik kurang terlatih, stigma negatif, kebijakan otoritas yang kurang aplikatif, kurangnya pengetahuan tenaga pendidik, hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber belajar, dan keterbatasan finansial terkait pendidikan khusus
- 22) Pemahaman dan sikap yang belum merata dikalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif
- 23) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus
- 24) Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus
- 25) Belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif
- 26) Sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif
- 27) Pemahaman kepala sekolah, guru dan pengambil kebijakan didaerah terhadap konsep pendidikan inklusif masih terbatas dan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

bervariasi

- 28) Terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus mengunjungi sekolah inklusif
  - 29) SDM yang ada di sekolah (reguler) inklusif sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum, maupun assesment akademik dan non akademik ABK
  - 30) Sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus
  - 31) Sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya masuk di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya. Sikap ini mempengaruhi jumlah siswa yang masuk disekolah reguler
  - 32) Progres Regulasi Program Sekolah Penggerak pada Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo masih pada tahap pembahasan internal sedangkan pada Kota Gorontalo masih di proses di bagian hukum setda Kota Gorontalo
  - 33) Belum adanya informasi akurat ataupun pemetaan terhadap Mitra Pembangunan Daerah
  - 34) Belum adanya MOU Kerjasama antara Mitra Pembangunan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini antara Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi
  - 35) Lemahnya budaya literasi Kepala Sekolah dan Guru yang menyebabkan sulitnya belajar mandiri melalui modul di laman PMM transisi PAUD-SD
  - 36) Kapasitas SDM di satuan pendidikan jenjang PAUD yang kurang, menyebabkan sulitnya mengerjakan aksi nyata dan mengunggah aksi nyata pada laman PMM
  - 37) Masih banyak Satuan pendidikan yang belum melakukan akses ke rapor pendidikan
  - 38) Masih banyak Satuan pendidikan yang belum melakukan eksplorasi ke rapor pendidikan
  - 39) Sumber daya manusia yang masih kurang dalam memahami rapor pendidikan
  - 40) Jaringan internet yang ada didaerah-daerah khusus yang masih menjadi kendala dalam melakukan akses ke rapor pendidikan
  - 41) Pemahaman peserta (PMO Tata Kelola) terhadap pemanfaatan rapor pendidikan di satuan pendidikan belum maksimal karena yang dihadirkan pada kegiatan tersebut memiliki tupoksi yang berbeda
  - 42) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota yang diharapkan hadir sebagai narasumber tidak seluruhnya hadir dan hanya diwakili oleh pejabat struktural lainnya
  - 43) Terdapat Strategi pelaksanaan pengimbasan yang tidak bisa diterapkan sama di seluruh wilayah dinas pendidikan Kab/Kota
  - 44) Belajar.id yang menjadi kunci dalam Akses Rapor Pendidikan dan Pemanfaatan Chromebook masih mengalami kendala ,yaitu : Lupa password, Akun siswa yang naik ke jenjang selanjutnya (naik kelas atau lulus sekolah),Pengajuan akun guru yang belum masuk Dapodik, Cara mereset password, Akun masih terbaca di sekolah lama, Pada saat admin pilih admin Plh. Kepala Sekolah muncul status error, terjadi pergantian admin, terdapat akun guru belum aktif, Cara mengaktifasi akun guru dan siswa
  - 45) Beberapa peserta tidak hadir pada pelaksanaan kegiatan karena mengikuti kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada waktu bersamaan
  - 46) Beberapa sekolah penggerak terletak didaerah yang jauh dari kota ( pelosok) sehingga akses menuju ke sekolah tersebut agak lama ditambah lagi dengan infrakstruktur jalan yang tidak mendukung
  - 47) Progress satuan pendidikan yang melakukan aksi nyata yang masih rendah terutama untuk jenjang PAUD
  - 48) Kalender pendidikan untuk Kab. Gorontalo belum disesuaikan dengan program transisi PAUD-SD, dimana 3 hari MPLS dan 7 hari asesmen awal
  - 49) Lemahnya budaya literasi Kepala Sekolah dan Guru yang menyebabkan sulitnya belajar mandiri melalui modul di laman PMM transisi PAUD-SD
- B. Kendala/Permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1, BULAN AGUSTUS, adalah:
- 1) Belum optimalnya pengetahuan pengawas dan penilik tentang 6 stretegi IKM yaitu, PMM, Komunitas Belajar, Webinar, Narasumber berbagi praktik baik, Mitra Pembangunan dan Helpdesk
  - 2) Kendala akun belajar.id pengawas dan penilik yang belum dimiliki dan lupa password
  - 3) Belum memahami tentang mengeksplere di PMM khususnya pengawas PAUD dan penilik
  - 4) Terjadi putus jaringan sesaat disaat kegiatan secara daring dengan pusat. Namun segera dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan pulsa data. Sehingga semua berjalan sesuai perencanaan Tidak dijumpai kendala/masalah yang berarti dalam pelaksanaan tersebut
  - 5) Kurangnya koordinasi antar Dinas Pendidikan khususnya PNF dengan SKB/PKBM yang ada di wilayahnya dalam persiapan pelaksanaan AN
  - 6) Tidak semua peserta mengikuti gladi bersih dalam rangka persiapan pelaksanaan AN
  - 7) Adanya gangguan pada Server Pusat serta Jaringan Internet yang tidak stabil pada saat pelaksanaan Gladi Bersih AN
  - 8) Tidak semua peserta hadir untuk mengikuti AN
  - 9) Pengawas tidak memahami POS AN
  - 10) Adanya data anomali pada beberapa PKBM dalam pelaksanaan AN
  - 11) Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan yang kurang sehingga menyulitkan penyelesaian tindak lanjut kegiatan pendampingan PBD Penyusunan Rkt & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan
  - 12) Kurangnya pengetahuan IT yang di miliki oleh kepala - kepala sekolah dalam melakukan penyusunan RKT Perencanaan Berbasis Data
  - 13) Tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan di wilayah - wilayah tersebut
  - 14) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan, sehingga menyulitkan tim pendamping untuk mengumpulkan hasil kerja RKT dan HASil Kerja Lembar Kerja ARKAS
  - 15) Satuan pendidikan akan melakukan konversi ke ARKAS 4.0 menunggu intruksi dari Admin MARKAS Dinas Pendidikan
  - 16) Satuan pendidikan banyak yang belum melakukan perencanaan dalam melakukan pengelolaan dan BOSP
  - 17) Pengelolaan Dana BOSP belum berdasarkan Rapor Pendidikan
  - 18) Sekolah pelaksana IKM mandiri masih memerlukan pendampingan terkait kurikulum merdeka sehingga proses pengimbasan yang dilakukan diharapkan bukan hanya satu atau dua kali, sedangkan masih terdapat kabupaten yang belum menganggarkan terkait dengan proses pengimbasan yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak
  - 19) Kodefikasi indikator dan sub indikator SPM dalam RKPD di beberapa Kabupaten/Kota yang belum sesuai update kodefikasi terbaru ( Kemendagri nomor 1317 Tahun 2023 )
  - 20) Kabupaten Gorontalo telah mengupload RKPD tahun 2024 tetapi belum melampirkan Renja Tahun 2024 sehingga belum bisa dipetakan RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2024

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 21) Beberapa sekolah belum terpenuhi jumlah responden dalam pengisian instrumen asesmen awal program GSS
- 22) Beberapa responden masih kurang memahami mekanisme pengisian instrumen asesmen awal, responden hanya mengisi namun tidak sampai pada tahap submit, sehingga meski sudah melakukan pengisian namun belum terbaca di link pusat
- 23) Sebagian sekolah belum sepenuhnya menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus dikarenakan belum mempunyai wawasan yang sama bahwa semua sekolah adalah inklusif sehingga wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus
- 24) Belum semua sekolah mempunyai sarana prasarana untuk melayani anak berkebutuhan khusus. selain itu sekolah reguler belum mempunyai SDM khusus menangani ABK
- 25) Draf regulasi terhambat prosesnya di dinas pendidikan Kab Pohuwato & Kab Gorontalo Utara
- 26) Mitra pembangunan daerah belum menjadi sarana pendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah
- 27) Masih terdapat beberapa kendala teknis terkait akun belajar id seperti akun double, akun tidak aktif dsb
- 28) Waktu advokasi optimalisasi Chromebook terlalu singkat sehingga peserta tidak dapat mempelajari semua fitur dan fungsi chromebook

C. Kendala/Permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 BULAN SEPTEMBER, adalah :

- 1) Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan yang tidak semuanya bisa hadir sehingga menyulitkan penyelesaian tindak lanjut kegiatan pendampingan di sekolah binaan masing - masing
- 2) Ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Gorontalo Utara pada saat pelaksanaan kegiatan Pendampingan PBD Pemda Tahap II di Kabupaten Gorontalo Utara
- 3) Transformasi Pendidikan khusus dan iklim inklusivitas belum terlaksana secara optimal di setiap Kabupaten/Kota/Provinsi
- 4) Padatnya aktivitas kegiatan pada Dinas Pendidikan Kab Gorontalo menyebabkan pembahasan draf regulasi KMB dan Mitra Pembangunan bergerak perlahan
- 5) Tidak semua peserta hadir untuk mengikuti AN pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP/Sederajat
- 6) Belum semua Rapor Pendidikan satuan pendidikan terkumpul pada saat pelaksanaan analisis rapor Pendidikan Sekolah PSP angkatan 3
- 7) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP angkatan 2 untuk Kota Gorontalo tidak berjalan maksimal karena Sekolah sudah dibagi habis di angkatan 1
- 8) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP angkatan 2 untuk Kabupaten Gorontalo tidak berjalan maksimal karena kesibukan dinas terkait
- 9) Tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan tersebut
- 10) Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan belajar id untuk satuan PAUD di Kabupaten Gorontalo yaitu hanya 1 hari sehingga materi tidak tersampaikan dengan maksimal
- 11) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan, sehingga menyulitkan tim pendamping untuk mengumpulkan hasil kerja RKT dan Hasil Kerja Lembar Kerja ARKAS 4.0
- 12) Minimnya pemahaman dan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di lingkup Bappeda dan BPKAD serta di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
- 13) Keterlambatan sosialisasi/penguatan regulasi-regulasi dari Kemdikbudristek tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota
- 14) Informasi terkait adanya perbedaan dalam mengawal program Kemendikbudristek dimana BPMP Yogyakarta menggunakan Pokja-pokja sedangkan di BPMP Provinsi Gorontalo menggunakan PDM
- 15) Pengawas tidak memahami POS AN, adanya peserta JOKI di SKB dan PKBM, adanya data anomali pada beberapa PKBM pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP/Sederajat
- 16) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan, sehingga menyulitkan tim pendamping untuk mengumpulkan hasil kerja RKT dan Hasil Kerja Lembar Kerja ARKAS 4.0
- 17) Dinas Pendidikan belum melaksanakan Sosialisasi Kampanye Sekolah Sehat di satuan pendidikan
- 18) Surat Edaran GSS belum tersampaikan ke Satuan Pendidikan
- 19) Rapor Kesehatan Siswa belum semua siswa yang terdata dan raport belum semua sekolah belum memiliki
- 20) Tidak semua peserta hadir untuk mengikuti AN jenjang SMP/paket B
- 21) Koordinasi tidak dihadiri oleh semua pihak terkait yang menjadi sasaran kegiatan Koordinasi Optimalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA, SMK, SLB/Kesetaraan melalui zoom meeting
- 22) Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan belum optimal
- 23) Adanya gangguan server pusat dan Jaringan internet tidak stabil pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP/Sederajat

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

A. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN JULI adalah:

- 1) Mengoptimalkan peran admin sekolah yang didampingi pengawas sekolah
- 2) Melakukan pemutakhiran akun belajar.id memanfaatkan helpdesk
- 3) Berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Keuangan untuk mendorong satuan pendidikan agar segera melakukan penyetoran setelah dilakukan pemugutan pajak
- 4) Masukan-masukan yang disampaikan dituangkan kedalam notulen, dan nantinya akan di perbaiki oleh panitia pelaksana
- 5) Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi KSS kepada seluruh warga sekolah pada saat siswa mulai aktif disekolah sehingga sosialisasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik
- 6) Alokasi anggaran di e-rakortek belum diisi per jenjang satuan pendidikan
- 7) Alokasi anggaran yang diinput ke e rakortek belum sesuai dengan di SIPD Dinas Pendidikan provinsi Gorontalo
- 8) Rencana Anggaran sudah terkunci untuk penyesuaian anggaran masing-masing indikator per jenjang satuan pendidikan
- 9) Melakukan koordinasi dengan Kabid PAUD PNF terkait pelaksanaan Sosialisasi AN untuk Jenjang PAUD dan Kesetaraan
- 10) Berkoordinasi dengan dinas kab/kota dan kendala atau masalah/kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan kemudian di konsultasikan dengan penanggung jawab BOSP Pusat
- 11) Memberikan pemahaman mengenai SPM Pendidikan sesuai amanat Surat MM tentang SPM Pendidikan
- 12) Disarankan agar hasil kajian mengacu pada hasil Rapor Pendidikan 2022 yang telah rilis pada tanggal 05 Juli 2023
- 13) Perlunya Sosialisasi ke Pemda Boalemo mengenai SPM Pendidikan sesuai amanat Surat MM Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023
- 14) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan personil yang perlu dihadirkan pada kegiatan
- 15) Dinas pendidikan segera memetakan dan menerbitkan SK pengimbasan PSP , sehingga sekolah bisa langsung melakukan pengimbasan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 16) Mengupayakan pengadaan internet bagi sekolah penggerak yang tidak memiliki akses
- 17) Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi KSS kepada seluruh warga sekolah pada saat siswa mulai aktif disekolah sehingga sosialisasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik
- 18) Koordinasi dilakukan dengan Pejabat fungsional yang ada di Biro Kesra dan Dinas Kesehatan terkait program Gerakan Sekolah Sehat (GSS)
- 19) Terus melakukan koordinasi dan mendorong sekolah melalui Group diskusi Whatsapp Program GSS
- 20) Meningkatkan komitmen semua pihak dalam menghadapi tantangan sekolah inklusi bukan hanya sosialisasi semata, tetapi membutuhkan upaya nyata
- 21) Memaksimalkan dukungan terhadap Dinas Pendidikan terkait pembahasan regulasi dengan memfasilitasi tenaga ahli dalam FGD maupun fasilitas tempat jika dibutuhkan
- 22) Komunikasi dan intervensi secara maksimal kepada pihak-pihak yang terkait penerbitan regulasi PSP di tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten/kota/provinsi Gorontalo
- 23) Memaksimalkan koordinasi dalam menjaring informasi dan memetakan Mitra Pembangunan Daerah yang pernah, sedang dan akan melaksanakan kemitraan dengan satuan Pendidikan maupun dinas Pendidikan kab/kota/provinsi
- 24) Mendorong mitra pembangunan daerah agar dapat melakukan Kerjasama yang disahkan dalam MOU dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi dalam mendukung Program Merdeka Belajar
- 25) Memberikan pemahaman kepada kapten co kapten untuk melakukan strategi dalam pendampingan akses ke rapor pendidikan
- 26) Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Daerah serta UPT Kemdikbudristek terkait pemamfaatan Rapor Pendidikan
- 27) Melakukan Penyamaan persepsi/penguatan terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan terutama kepada PMO Tata Kelola. Sehingga PMO Tata Kelola dapat mendampingi Satuan Pendidikan secara maksimal memanfaatkan rapor pendidikan dalam merencanakan kegiatan
- 28) Penyelesaian langsung oleh admin akun belajar BPMP Provinsi Gorontalo atas masalah/kendala terkait akun belajar
- 29) Memberikan bimbingan akses dan explore rapor pendidikan
- 30) BAPPEDA Provinsi Gorontalo akan menyurat ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk membuka login karena inputan anggaran sudah dikunci
- 31) Akan di lakukan penginputan anggaran masing-masing indikator dan sub kegiatan per jenjang satuan pendidikan
- 32) Advokasi dinas untuk melakukan penadampingan program sekolah penggerak terutama di daerah terpencil , bisa melakukan monitoring secara online
- 33) Memberdayakan pengawas sekolah untuk mendorong satuan pendidikan melakukan aksi nyata dan mengunggah aksi nyata di laman PMM
- 34) Dinas Kab. Gorontalo akan segera menindaklanjuti penyesuaian kalender pendidikan
- 35) Mengadakan pendampingan terhadap Kepala Sekolah dan Guru untuk dapat melakukan belajar mandiri melalui modul di laman PMM Transisi PAUD-SD

B. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan BULAN AGUSTUS adalah:

- 1) Memaksimalkan advokasi melalui kegiatan Workshop 6 strategi IKM bagi pengawas sekolah dan penilik di 6 kab/kota dan provinsi untuk menimalisir permasalahan terkait PMM
- 2) Penyusunan Program bersama BPMP Prov. Gorontalo dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Gorontalo terkait Program Peningkatan literasi pada satuan pendidikan yang tingkat literasinya rendah ( level 1 dan 2) untuk tahun anggaran 2024
- 3) Mendorong Dinas Pendidikan khususnya bidang PNF untuk selalu berkoordinasi dengan SKB/PKBM dan sebaliknya
- 4) Memberikan rekomendasi ke Kepala Satuan Pendidikan/Ketua PKBM untuk membuat pengumuman melalui grup WA agar yang menjadi peserta AN khususnya pada Jenjang Paket C untuk ikut pada pelaksanaan AN sesuai jadwal
- 5) Proktor agar senantiasa berkoordinasi dengan Tim Teknis Kab/Kota/Provinsi terkait kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan gladi bersih AN
- 6) Kepala Satuan pendidikan berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet untuk kelancaran pelaksanaan gladi bersih AN
- 7) Menyarankan untuk mengikuti penjadwalan ulang
- 8) Perlu adanya Sosialisasi POS bagi Proktor/Teknisi/Pengawas ruang
- 9) Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Tim Teknis baik Kab/Kota maupun Provinsi
- 10) Memaksimalkan Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan untuk melakukan tindak lanjut kegiatan pendampingan PBD Penyusunan Rkt & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan
- 11) Karena pengetahuan IT kurang di miliki oleh kepala - kepala sekolah dalam melakukan penyusunan RKT Perencanaan Berbasis Data, maka memaksimalkan peran operator - operator sekolah untuk mendampingi kepala - kepala sekolah dalam penyusunan RKS dan Lembar Kerja ARKAS 4.0
- 12) Karena tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan, maka di lakukan kesepakatan untuk merampungkan hasil kerja tersebut dengan melalui pengawas - pengawas bina dan mengirimkannya di link lembar hasil kerja
- 13) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan di lakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 14) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan untuk segera mendorong sekolah melakukan konversi ke ARKAS 4.0
- 15) Memandu sekolah dalam menyusun lembar kerja RKAS berdasarkan Rapor Pendidikan
- 16) Menginformasikan kepada dinas pendidikan terkait untuk mengatur mekanisme pembiayaan proses pengimbasan oleh sekolah penggerak
- 17) Melakukan koordinasi secara terus menerus dan berkesinambungan baik luring maupun daring dengan Bappeda seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo dalam rangka mengoptimalkan pemetaan indikator dan sub indikator SPM dalam RKPD
- 18) Melakukan pendampingan secara langsung responden yang ada di satuan pendidikan dalam melakukan pengisian asesmen awal program GSS dengan baik dan benar
- 19) Memberikan sosialisasi /pemahaman kepada semua guru dan kepala sekolah tentang transformasi pendidikan khusus agar bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus d sekolahnya
- 20) Bermitra dengan pemda atau Dinas Pendidikan membangun sarana yang bisa menunjang anak anak berkebutuhan khusus di sekolah
- 21) Berkoordinasi dengan Bappeda, Biro Hukum Setda dalam mengidentifikasi dokumen kelengkapan penyusunan draf regulasi
- 22) Menghimpun perusahaan lokal guna mendukung peningkatan mutu pendidikan daerah

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

23) Pendampingan secara langsung untuk mengatasi masalah terkait akun belajar id serta mengoptimalkan peran ko kapten dan duta teknologi di daerah

C. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN SEPTEMBER adalah:

- 1) Memaksimalkan Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan untuk melakukan tindak lanjut kegiatan pendampingan Pendampingan PBD Penyusunan RKT & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan Kepada Satuan Pendidikan Jenjang SD/SMP
- 2) Pelaksanaan Kegiatan PBD Pemda Tahap II di Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya teragendakan dalam kegiatan yang wajib dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
- 3) Meningkatkan iklim inklusivitas hasil rapor pendidikan tahun 2022 di satpen umum dan kejuruan melalui pengisian sulinjar lebih berhati hati lagi (sesuai dengan kondisi sebenarnya)
- 4) Meningkatkan kompetensi khusus guru berkebutuhan khusus dengan cara mendiklatkan mereka, magang di sekolah Diksus, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi
- 5) Mengoptimalkan Kebijakan -kebijakan terkait pendidikan inklusif di daerah
- 6) Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lulusan penyandang disabilitas yang kompeten untuk bisa diterima bekerja di instansi pemerintah
- 7) Konsultan & Tim PDM 5 terus berkoordinasi dengan Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kab Gorontalo untuk segera menyelesaikan penyusunan draf regulasi KMB
- 8) Koordinasi intensif dengan dinas terkait dan satuan pendidikan melalui telp dan WA Group dalam rangka mendapatkan rapor pendidikan satuan pendidikan terkait Analisis rapor Pendidikan Sekolah PSP angkatan 3
- 9) Membagi sekolah mitra berdasarkan tema untuk mendapatkan solusi pelaksanaan pengimbasan PSP angkatan 2 di Kota Gorontalo serta koordinasi intersif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengimbasan PSP Angkatan 2 di wilayah tersebut
- 10) Karena tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan, maka dilakukan kesepakatan untuk merampungkan hasil kerja tersebut dengan melalui pengawas - pengawas bina dan mengirimkannya di link lembar hasil kerja
- 11) Mengotipmalkan peran kapten dan co capten di daerah serta koordinator kecamatan yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya
- 12) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan dilakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 13) Penguatan dan sosialisasi yang berkesinambungan dari Kemeterian terkait (Kemendagri dan Kemenkeu) kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota
- 14) Mengawal secara bersama-sama program Kemendikbudristek dengan pencapaian untuk menuntaskan target di Grid masing - masing PDM dan melakukan pendekatan ke satuan pendidikan melalui pengawas dan penilik dengan melakukan pendampingan kepada pengawas terkait segala kebijakan/kegiatan yang diamanatkan oleh Kemendikbudristek
- 15) Perlu adanya Sosialisasi POS Asesmen nasional bagi Proktor/Teknisi/Pengawas ruang
- 16) Perlu adanya perhatian khusus dari pihak Dinas Pendidikan pada SKB dan PKBM di masing-masing Kab/Kota terkait adanya data anomali pada beberapa PKBM serta adanya peserta JOKI di SKB dan PKBM
- 17) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan dilakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 18) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait kendala hasil pendampingan Piloting Kampanye Sekolah Sehat
- 19) Menyampaikan ke Dinas Kesehatan terkait Raport Kesehatan Siswa hasil pendampingan Piloting Kampanye Sekolah Sehat
- 20) Menyarankan untuk mengikuti penjadwalan ulang bagi peserta yang belum mengikuti AN jenjang SMP/Paket B
- 21) Melakukan koordinasi lanjutan dengan ketua KKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Optiomalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA,SMK, SLB/Kesetaraan
- 22) Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
- 23) Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Tim Teknis baik Kab/Kota maupun Provinsi serta perlu adanya pendampingan Verval Dapodik dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan AN

## **B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

### **Progress / Kegiatan :**

A. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 BULAN JULI, adalah:

- 1) Workshop penguatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum merdeka (IKM)
- 2) Sosialisasi Kebijakan AN ke Satuan Pendidikan
- 3) Percepatan Penyaluran Dana BOSP Tahap 1
- 4) Koordinasi terkait Pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS dan BOP
- 5) Seminar awal kajian spm bidang pendidikan tingkat TK-PAUD, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kabupaten boalemo
- 6) Rapat evaluasi pencapaian spm pendidikan Provinsi Gorontalo
- 7) Seminar awal kajian spm bidang pendidikan tingkat TK-PAUD, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Kabupaten Boalemo
- 8) Rapat persiapan pendampingan PBD Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi Gorontalo tahun 2023
- 9) Workshop penyusunan strategi pengimbasan, peningkatan nilai rapor pendidikan dan kesinambungan program sekolah penggerak
- 10) Koordinasi satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 1 dan 2
- 11) Harmonisasi Keberlanjutan Program Transisi PAUD-SD
- 12) Advokasi dan pendampingan dalam rangka implementasi Sekolah sehat di Satuan Pendidikan Binaan
- 13) Koordinasi Program Sekolah Sehat
- 14) Advokasi dan pendampingan dalam rangka implementasi Sekolah sehat di Satuan Pendidikan Binaan
- 15) pengembangan sekolah karisma bunga bangsa bersama PDM 12 BPMP Provinsi Gorontalo

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 16) Koordinasi Teknis dengan pemangku kepentingan
  - 17) Pembahasan Draf Regulasi Program Sekolah Penggerak dan Program Mitra Pembangunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
  - 18) Pendampingan Sekolah Piloting Program Transisi PAUD-SD Tahap 2 Tahun 2023
  - 19) Workshop Penyusunan Strategi Optimalisasi Chromebook, Belajar.id dan Rapor Pendidikan dengan Pemerintah Daerah Tahun 2023
- B. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 BULAN AGUSTUS, adalah:
- 1) Workshop 6 Strategi IKM Bagi Pengawas Sekolah
  - 2) Kick Off Kampus Mengajar Angkatan 6
  - 3) Audiensi dalam rangka sinkronisasi / kolaborasi Program pemulihan pembelajaran
  - 4) Monev Persiapan Pelaksanaan AN Tahun 2023(Gladi Bersih) jenjang SMA/Kesetaraan
  - 5) Monev Pelaksanaan AN Tahun 2023 Jenjang SMA/Kesetaraan
  - 6) Pendampingan PBD Penyusunan Rkt & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan
  - 7) Pendampingan ARKAS 4.0
  - 8) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP
  - 9) Pemetaan indikator dan sub indikator SPM dalam RKPD
  - 10) Pendampingan sekolah binaan Gerakan Sekolah Sehat
  - 11) Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Transformasi Pendidikan Khusus dan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah
  - 12) Pembahasan draf regulasi kebijakan Merdeka Belajar & Penggalangan Mitra Pembangunan
  - 13) Advokasi dalam menciptakan Transformasi Pembelajaran Menyenangkan bersama belajar.id dan Chromebook
- C. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 BULAN SEPTEMBER, adalah:
- 1) Pendampingan PBD Penyusunan RKT & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan Kepada Satuan Pendidikan Wilayah Dan Pengawas Bina SD/SMP/Kesetaraan Wilayah Kab/Kota
  - 2) Pendampingan PBD Pemda Tahap II di Kabupaten Gorontalo Utara
  - 3) Audiensi dalam rangka sinkronisasi/ kolaborasi Program Pemulihan Pembelajaran
  - 4) Kegiatan Studi Tiru ke BPMP Provinsi DIY
  - 5) Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah
  - 6) Pembahasan draf regulasi KMB & Mitra Pembangunan Daerah
  - 7) Pendampingan ke satuan Pendidikan Piloting terkait Kampanye Sekolah Sehat
  - 8) Verifikasi dan Validasi Komunitas Pegiat Literasi Kab/Kota
  - 9) Studi Tiru Program Rapor Pendidikan Dan PBD Daerah Ke BBPMP Jawa Timur Dan Setditjen PDM Kemendikbudristek RI
  - 10) Monev Pelaksanaan AN Tahun 2023 Jenjang SMP/Paket B Sederajat
  - 11) Pembuatan Konten Pemulihan Pembelajaran
  - 12) Kordinasi untuk Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan
  - 13) Koordinasi Optimalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA dan SMK melalui zoom meeting
  - 14) Analisis rapor Pendidikan Sekolah PSP angkatan 3
  - 15) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP angkatan 2 untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

#### **Kendala / Permasalahan :**

A. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN JULI, adalah:

- 1) Terdapat Guru, Kepsek & pengawas memiliki akun belajar.id tetapi belum memahami cara memanfaatkannya
- 2) Pemanfaatan Akun belajar.id untuk masuk ke PMM hanya dalam bentuk sosialisasi
- 3) Masalah yang sering ditemukan baik oleh Inspektorat Kota Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo sama setiap tahun yakni satuan pendidikan melakukan tumpuk pajak dimana pajak yang telah dipungut tidak segera dilakukan penyetoran. 4) Waktu pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan strategi Pengimbasan PSP yang terbatas karena setelah draft juknis jadi, kemudian dipaparkan terdapat masukan-masukan disampaikan untuk perbaikan juknis tersebut, akan tetapi masukan-masukan tersebut tidak bisa langsung diperbaiki karena terbatasnya waktu yang ada
- 5) Permasalahan yang dihipun dari pelaksanaan KSS di sekolah piloting GSS adalah belum seluruh sekolah binaan yang melakukan Sosialisasi di karenakan kehadiran siswa belum maksimal karena masih dalam masa libur semester
- 6) Terdapat sekolah yang belum memiliki kepsek definitif, sehingga berdampak pada pemanfaatan akun belajar id, untuk login ke PMM
- 7) Dana BOSP tahap 1 terlambat masuk ke rekening sekolah
- 8) Masih banyak sekolah yang tidak memiliki akses internet
- 9) Satuan pendidikan belum memahami juknis BOSP
- 10) Sekolah belum memahami pencatatan Dana BOSP di aplikasi simda dan SIPD operator
- 11) Unsur BAPPEDA Kabupaten Boalemo belum memahami mengenai SPM Pendidikan yang menjadi amanat surat MM tentang SPM Pendidikan
- 12) Kajian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Boalemo dilaksanakan oleh pihak ke 3 yaitu Universitas Negeri Gorontalo dengan fokus kajian pada 4 standar nasional pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan diaman fokus kajian yang dibahas tidak berdasarkan hasil Rapor Pendidikan 2022 yang telah rilis pada tanggal 5 Juli 2023
- 13) Masih terdapat Dinas Pendidikan yang mengirim wakil yang kurang bersesuaian dengan maksud kegiatan sehingga belum maksimal mengikuti kegiatan. Hal ini sangat berpengaruh pada proses tindaklanjut di masing-masing Kabupaten / Kota dan Provinsi Gorontalo (Menentukan titik sasaran kegiatan dan personil yang dihadirkan)
- 14) Terdapat dinas pendidikan belum menerbitkan SK pengimbasan PSP , sehingga tim kesulitan untuk mencros cek sekoah sasaran pengimbasan
- 15) Dibeberapa sekolah penggerak tidak terdapat internet yang lancar sehingga bisa menyebabkan terlambatnya akses belajar
- 16) Pemangku kepentingan di Biro Kesra dan Dinas Kesehatan tidak berada ditempat karena sedang mengikuti kegiatan diluar kantor. Adapun Kendala dalam pelaksanaan Program KSS di Biro Kesra adalah TP UKS belum aktif dalam menjalankan program kerjanya. Sedangkan di Dinas Kesehatan Provinsi kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya sinergitas program antara Dikes dengan Dinas Pendidikan maupun TP UKS Provinsi terkait dengan pendataan/penjaringan kesehatan disatuan pendidikan
- 17) Masih terdapat beberapa sekolah yang tidak sempat hadir dalam zoom meeting tersebut sehingga belum diperoleh informasi terkait implementasi sekolah sehat di satuan pendidikan tersebut. Masih terdapat sekolah binaan yang belum melaksanakan sosialisasi Kampanye sekolah sehat dan pengisian asesmen awal khusus peserta didik
- 18) Masih kurangnya sumberdaya yang berkompeten

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

dalam pendidikan khusus

- 19) Tenaga pendidik kurang terlatih, stigma negatif, kebijakan otoritas yang kurang aplikatif, kurangnya pengetahuan tenaga pendidik, hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber belajar, dan keterbatasan finansial terkait pendidikan khusus
- 20) Pemahaman dan sikap yang belum merata dikalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, 21) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus: 22) Sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus
- 23) Belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif,
- 24) Sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif
- 25) Pemahaman kepala sekolah, guru dan pengambil kebijakan di daerah terhadap konsep pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi
- 26) Terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus mengunjungi sekolah inklusif
- 27) SDM yang ada di sekolah (reguler) inklusif sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum, maupun assesment akademik dan non akademik ABK
- 28) Sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus
- 29) Sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya masuk di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya. Sikap ini mempengaruhi jumlah siswa yang masuk disekolah reguler
- 30) Progres Regulasi Program Sekolah Penggerak pada Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo masih pada tahap pembahasan internal sedangkan pada Kota Gorontalo masih di proses di bagian hukum setda Kota Gorontalo
- 31) Belum adanya informasi akurat ataupun pemetaan terhadap Mitra Pembangunan Daerah
- 32) Belum adanya MOU Kerjasama antara Mitra Pembangunan dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini antara Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi
- 33) Lemahnya budaya literasi Kepala Sekolah dan Guru yang menyebabkan sulitnya belajar mandiri melalui modul di laman PMM transisi PAUD-SD
- 34) Kapasitas SDM di satuan pendidikan jenjang PAUD yang kurang, menyebabkan sulitnya mengerjakan aksi nyata dan mengunggah aksi nyata pada laman PMM
- 35) Masih banyak Satuan pendidikan yang belum melakukan akses ke rapor pendidikan
- 36) Masih banyak Satuan pendidikan yang belum melakukan eksplorasi ke rapor pendidikan
- 37) Sumber daya manusia yang masih kurang dalam memahami rapor pendidikan
- 38) Jaringan internet yang ada di daerah-daerah khusus yang masih menjadi kendala dalam melakukan akses ke rapor pendidikan
- 39) Pemahaman peserta (PMO Tata Kelola) terhadap pemanfaatan rapor pendidikan di satuan pendidikan belum maksimal karena yang dihadirkan pada kegiatan tersebut memiliki tupoksi yang berbeda
- 40) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota yang diharapkan hadir sebagai narasumber tidak seluruhnya hadir dan hanya diwakili oleh pejabat struktural lainnya
- 41) Terdapat Strategi pelaksanaan pengimbasan yang tidak bisa diterapkan sama di seluruh wilayah dinas pendidikan Kab/Kota
- 42) Belajar.id yang menjadi kunci dalam Akses Rapor Pendidikan dan Pemanfaatan Chromebook masih mengalami kendala ,yaitu : Lupa password, Akun siswa yang naik ke jenjang selanjutnya (naik kelas atau lulus sekolah), Pengajuan akun guru yang belum masuk Dapodik, Cara mereset password, Akun masih terbaca di sekolah lama, Pada saat admin pilih admin Pih. Kepala Sekolah muncul status error, terjadi pergantian admin, terdapat akun guru belum aktif, Cara mengaktifkan akun guru dan siswa
- 43) Beberapa peserta tidak hadir pada pelaksanaan kegiatan karena mengikuti kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada waktu bersamaan
- 44) Beberapa sekolah penggerak terletak di daerah yang jauh dari kota ( pelosok) sehingga akses menuju ke sekolah tersebut agak lama. Ditambah lagi dengan infrastruktur jalan yang tidak mendukung
- 45) Progress satuan pendidikan yang melakukan aksi nyata yang masih rendah terutama untuk jenjang PAUD
- 46) Kalender pendidikan untuk Kab. Gorontalo belum disesuaikan dengan program transisi PAUD-SD, dimana 3 hari MPLS dan 7 hari asesmen awal
- 47) Lemahnya budaya literasi Kepala Sekolah dan Guru yang menyebabkan sulitnya belajar mandiri melalui modul di laman PMM transisi PAUD-SD

B. Kendala/Permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 BULAN AGUSTUS, adalah :

- 1) Belum optimalnya pengetahuan pengawas dan penilik tentang 6 strategi IKM yaitu, PMM, Komunitas Belajar, Webinar, Narasumber berbagi praktik baik, Mitra Pembangunan dan Helpdesk
- 2) Kendala akun belajar.id pengawas dan penilik yang belum dimiliki dan lupa password
- 3) Belum memahami tentang mengeksplorasi di PMM khususnya pengawas PAUD dan penilik
- 4) Terjadi putus jaringan sesaat disaat kegiatan secara daring dengan pusat. Namun segera dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan pulsa data. Sehingga semua berjalan sesuai perencanaan Tidak dijumpai kendala/masalah yang berarti dalam pelaksanaan tersebut
- 5) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Gorontalo lebih fokus pada akreditasi perpustakaan, baik perpustakaan universitas, perpustakaan khusus, perpustakaan umum, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan untuk program kegiatan adalah transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, tidak pada peningkatan literasi yang menjadi tugas utama sebuah perpustakaan
- 6) Kurangnya koordinasi antar Dinas Pendidikan khususnya PNF dengan SKB/PKBM yang ada di wilayahnya dalam persiapan pelaksanaan AN
- 7) Tidak semua peserta mengikuti gladi bersih dalam rangka persiapan pelaksanaan AN
- 8) Adanya gangguan pada Server Pusat serta Jaringan Internet yang tidak stabil pada saat pelaksanaan Gladi Bersih AN
- 9) Tidak semua peserta hadir untuk mengikuti AN
- 10) Pengawas tidak memahami POS AN
- 11) Adanya data anomali pada beberapa PKBM dalam pelaksanaan AN
- 12) Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan yang kurang sehingga menyulitkan penyelesaian tindak lanjut kegiatan pendampingan PBD Penyusunan Rkt & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan
- 13) Kurangnya pengetahuan IT yang dimiliki oleh kepala - kepala sekolah dalam melakukan penyusunan RKT Perencanaan Berbasis Data
- 14) Tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan di wilayah - wilayah tersebut

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 15) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan, sehingga menyulitkan tim pendamping untuk mengumpulkan hasil kerja RKT dan Hasil Kerja Lembar Kerja ARKAS
- 16) Satuan pendidikan akan melakukan konversi ke ARKAS 4.0 menunggu intruksi dari Admin MARKAS Dinas Pendidikan
- 17) Satuan pendidikan banyak yang belum melakukan perencanaan dalam melakukan pengelolaan dan BOSP
- 18) Pengelolaan Dana BOSP belum berdasarkan Rapor Pendidikan
- 19) Sekolah pelaksana IKM mandiri masih memerlukan pendampingan terkait kurikulum merdeka sehingga proses pengimbasan yang dilakukan diharapkan bukan hanya satu atau dua kali, sedangkan masih terdapat kabupaten yang belum menganggarkan terkait dengan proses pengimbasan yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak
- 20) Kodefikasi indikator dan sub indikator SPM dalam RKPD di beberapa Kabupaten/Kota yang belum sesuai update kodefikasi terbaru ( Kemendagri nomor 1317 Tahun 2023 )
- 21) Kabupaten Gorontalo telah mengupload RKPD tahun 2024 tetapi belum melampirkan Renja Tahun 2024 sehingga belum bisa dipetakan RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2024
- 22) Beberapa sekolah belum terpenuhi jumlah responden dalam pengisian instrumen asesmen awal program GSS
- 23) Beberapa responden masih kurang memahami mekanisme pengisian instrumen asesmen awal, responden hanya mengisi namun tidak sampai pada tahap submit, sehingga meski sudah melakukan pengisian namun belum terbaca di link pusat
- 24) Sebagian sekolah belum sepenuhnya menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus dikarenakan belum mempunyai wawasan yang sama bahwa semua sekolah adalah inklusif sehingga wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus
- 25) Belum semua sekolah mempunyai sarana prasarana untuk melayani anak berkebutuhan khusus. selain itu sekolah reguler belum mempunyai SDM khusus menangani ABK
- 26) Draf regulasi terhambat prosesnya di dinas pendidikan Kab Pohuwato & Kab Gorontalo Utara
- 27) Mitra pembangunan daerah belum menjadi sarana pendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah
- 28) Masih terdapat beberapa kendala teknis terkait akun belajar id seperti akun double, akun tidak aktif dsb
- 29) Waktu advokasi optimalisasi Chromebook terlalu singkat sehingga peserta tidak dapat mempelajari semua fitur dan fungsi chromebook

C. Kendala/Permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 BULAN SEPTEMBER, adalah :

- 1) Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan yang tidak semuanya bisa hadir sehingga menyulitkan penyelesaian tindak lanjut kegiatan pendampingan di sekolah binaan masing - masing
- 2) Ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Gorontalo Utara pada saat pelaksanaan kegiatan Pendampingan PBD Pemda Tahap II di Kabupaten Gorontalo Utara
- 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota lebih mengedepankan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi perpustakaan percontohan Nasional sedangkan Program Peningkatan literasi belum terprogram di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pohuato khususnya untuk Satuan Pendidikan yang seharusnya menjadi program utama perpustakaan yang ada di daerah
- 4) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota sangat minim anggaran, sehingga hanya melakukan pelayanan perpustakaan secara terbatas, baik pelayanan perpustakaan ke sekolah - sekolah dan inklusi sosial ke masyarakatpun terbatas karena inklusi sosial adalah program primadona dari perpustakaan, sehingga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan lebih fokus pada program inklusi sosial
- 5) Transformasi Pendidikan khusus dan iklim inklusivitas belum terlaksana secara optimal di setiap Kabupaten/Kota/Provinsi
- 6) Padatnya aktivitas kegiatan pada Dinas Pendidikan Kab Gorontalo menyebabkan pembahasan draf regulasi KMB dan Mitra Pembangunan bergerak perlahan
- 7) Pegiat literasi tidak hadir tepat waktu hadir sesuai jam yang telah disampai disurat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan verval lewat dari jam yang ditentukan
- 8) Tidak semua peserta hadir untuk mengikuti AN pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP/Sederajat
- 9) Kurang terbiasanya narasumber dalam menyampaikan informasi melalui video pada saat Pembuatan Konten Pemulihan Pembelajaran
- 10) Belum semua Rapor Pendidikan satuan pendidikan terkumpul pada saat pelaksanaan analisis rapor Pendidikan Sekolah PSP angkatan 3
- 11) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP angkatan 2 untuk Kota Gorontalo tidak berjalan maksimal karena Sekolah sudah dibagi habis di angkatan 1
- 12) Pendampingan Satuan Pendidikan Terkait Pengimbasan PSP angkatan 2 untuk Kabupaten Gorontalo tidak berjalan maksimal karena kesibukan dinas terkait
- 13) Tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan tersebut
- 14) Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan belajar id untuk satuan PAUD di Kabupaten Gorontalo yaitu hanya 1 hari sehingga materi tidak tersampaikan dengan maksimal
- 15) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan, sehingga menyulitkan tim pendamping untuk mengumpulkan hasil kerja RKT dan Hasil Kerja Lembar Kerja ARKAS 4.0
- 16) Minimnya pemahaman dan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di lingkup Bappeda dan BPKAD serta di Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
- 17) Keterlambatan sosialisasi/penguatan regulasi-regulasi dari Kemdikbudristek tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota
- 18) Informasi terkait adanya perbedaan dalam mengawal program Kemdikbudristek dimana BPMP Yogyakarta menggunakan Pokja-pokja sedangkan di BPMP Provinsi Gorontalo menggunakan PDM
- 19) Pengawas tidak memahami POS AN, adanya peserta JOKI di SKB dan PKBM, adanya data anomali pada beberapa PKBM pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP/Sederajat
- 20) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan, sehingga menyulitkan tim pendamping untuk mengumpulkan hasil kerja RKT dan Hasil Kerja Lembar Kerja ARKAS 4.0
- 21) Dinas Pendidikan belum melaksanakan Sosialisasi Kampanye Sekolah Sehat di satuan pendidikan
- 22) Surat Edaran GSS belum tersampaikan ke Satuan Pendidikan
- 23) Rapor Kesehatan Siswa belum semua siswa yang terdata dan raport belum semua sekolah belum memiliki
- 24) Tidak semua peserta hadir untuk mengikuti AN jenjang SMP/paket B
- 25) Koordinasi tidak dihadiri oleh semua pihak terkait yang menjadi sasaran kegiatan Koordinasi Optimalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA dan SMK melalui zoom meeting
- 26) Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan belum optimal
- 27) Adanya gangguan server pusat dan Jaringan internet tidak stabil pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMP/Sederajat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

28) Sarana/alat pengambilan konten masih kurang optimal terutama yang menyangkut audio pada saat pengambilan video pada Pembuatan Konten Pemulihan Pembelajaran

### **Strategi / Tindak Lanjut :**

A. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN JULI adalah :

- 1) Mengoptimalkan peran admin sekolah yang didampingi pengawas sekolah
- 2) Melakukan pemutakhiran akun belajar.id memanfaatkan helpdesk
- 3) Berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Keuangan untuk mendorong satuan pendidikan agar segera melakukan penyetoran setelah dilakukan pemugutan pajak
- 4) Masukan-masukan yang disampaikan dituangkan kedalam notulen, dan nantinya akan di perbaiki oleh panitia pelaksana
- 5) Panitia kegiatan terus melakukan koordinasi dengan pihak hotel tentang kesiapan layar dan lcd
- 6) Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi KSS kepada seluruh warga sekolah pada saat siswa mulai aktif disekolah sehingga sosialisasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik
- 7) Alokasi anggaran di e-rakortek belum diisi per jenjang satuan pendidikan
- 8) Alokasi anggaran yang diinput ke e rakortek belum sesuai dengan di SIPD Dinas Pendidikan provinsi Gorontalo
- 9) Rencana Anggaran sudah terkunci untuk penyesuaian anggaran masing-masing indikator per jenjang satuan pendidikan
- 10) Berkoordinasi dengan dinas kab/kota dan kendala atau masalah/kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan kemudian di konsultasikan dengan penanggung jawab BOSP Pusat
- 11) Memberikan pemahaman mengenai SPM Pendidikan sesuai amanat Surat MM tentang SPM Pendidikan
- 12) Disarankan agar hasil kajian mengacu pada hasil Rapor Pendidikan 2022 yang telah rilis pada tanggal 05 Juli 2023
- 13) Perlunya Sosialisasi ke Pemda Boalemo mengenai SPM Pendidikan sesuai amanat Surat MM Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023
- 14) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan personil yang perlu dihadirkan pada kegiatan
- 15) Dinas pendidikan segera memetakan dan menerbitkan SK pengimbasan PSP , sehingga sekolah bisa langsung melakukan pengimbasan
- 16) Mengupayakan pengadaan internet bagi sekolah penggerak yang tidak memiliki akses
- 17) Memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi KSS kepada seluruh warga sekolah pada saat siswa mulai aktif disekolah sehingga sosialisasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik
- 18) Koordinasi dilakukan dengan Pejabat fungsional yang ada di Biro Kesra dan Dinas Kesehatan terkait program Gerakan Sekolah Sehat (GSS)
- 19) Terus melakukan koordinasi dan mendorong sekolah melalui Group diskusi Whatsapp Program GSS
- 20) Meningkatkan komitmen semua pihak dalam menghadapi tantangan sekolah inklusi bukan hanya sosialisasi semata, tetapi membutuhkan upaya nyata
- 21) Memaksimalkan dukungan terhadap Dinas Pendidikan terkait pembahasan regulasi dengan memfasilitasi tenaga ahli dalam FGD maupun fasilitas tempat jika dibutuhkan
- 22) Komunikasi dan intervensi secara maksimal kepada pihak-pihak yang terkait penerbitan regulasi PSP di tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten/kota/provinsi Gorontalo
- 23) Memaksimalkan koordinasi dalam menjaring informasi dan memetakan Mitra Pembangunan Daerah yang pernah, sedang dan akan melaksanakan kemitraan dengan satuan Pendidikan maupun dinas Pendidikan kab/kota/provinsi
- 24) Mendorong mitra pembangunan daerah agar dapat melakukan Kerjasama yang disahkan dalam MOU dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi dalam mendukung Program Merdeka Belajar
- 25) Memberikan pemahaman kepada kapten co kapten untuk melakukan strategi dalam pendampingan akses ke rapor pendidikan
- 26) Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di Daerah serta UPT Kemdikbudristek terkait pemanfaatan Rapor Pendidikan
- 27) Melakukan Penyamaan persepsi/penguatan terkait Pemanfaatan Rapor Pendidikan terutama kepada PMO Tata Kelola. Sehingga PMO Tata Kelola dapat mendampingi Satuan Pendidikan secara maksimal memanfaatkan rapor pendidikan dalam merencanakan kegiatan
- 28) Penyelesaian langsung oleh admin akun belajar BPMP Provinsi Gorontalo atas masalah/kendala terkait akun belajar
- 29) Memberikan bimbingan akses dan explore rapor pendidikan
- 30) BAPPPEDA Provinsi Gorontalo akan menyurat ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk membuka login karena inputan anggaran sudah dikunci
- 31) Akan di lakukan penginputan anggaran masing-masing indikator dan sub kegiatan per jenjang satuan pendidikan
- 32) Advokasi dinas untuk melakukan pendampingan program sekolah penggerak terutama di daerah terpencil , bisa melakukan monitoring secara online
- 33) Memberdayakan pengawas sekolah untuk mendorong satuan pendidikan melakukan aksi nyata dan mengunggah aksi nyata di laman PMM
- 34) Dinas Kab. Gorontalo akan segera menindaklanjuti penyesuaian kalender pendidikan
- 35) Mengadakan pendampingan terhadap Kepala Sekolah dan Guru untuk dapat melakukan belajar mandiri melalui modul di laman PMM Transisi PAUD-SD

B. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN AGUSTUS adalah :

- 1) Memaksimalkan advokasi melalui kegiatan Workshop 6 strategi IKM bagi pengawas sekolah dan penilik di 6 kab/kota dan provinsi untuk menimalisir permasalahan terkait PMM
- 2) Memaksimalkan peralatan tersedia untuk menunjang pelaksanaan Kick Off Kampus Mengajar Angkatan 6
- 3) Penyusunan Program bersama BPMP Prov. Gorontalo dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Gorontalo terkait Program Peningkatan literasi pada satuan pendidikan yang tingkat literasinya rendah ( level 1 dan 2) untuk tahun anggaran 2024
- 4) Mendorong Dinas Pendidikan khususnya bidang PNF untuk selalu berkoordinasi dengan SKB/PKBM dan sebaliknya
- 5) Memberikan rekomendasi ke Kepala Satuan Pendidikan/Ketua PKBM untuk membuat pengumuman melalui grup WA agar yang menjadi peserta AN khususnya pada Jenjang Paket C untuk ikut pada pelaksanaan AN sesuai jadwal
- 6) Proktor agar senantiasa berkoordinasi dengan Tim Teknis Kab/Kota/Provinsi terkait kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan gladi bersih AN
- 7) Kepala Satuan pendidikan berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet untuk kelancaran pelaksanaan gladi bersih AN
- 8) Menyarankan untuk mengikuti penjadwalan ulang
- 9) Perlu adanya Sosialisasi POS bagi Proktor/Teknisi/Pengawas ruang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 10) Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Tim Teknis baik Kab/Kota maupun Provinsi
- 11) Memaksimalkan Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan untuk melakukan tindak lanjut kegiatan pendampingan PBD Penyusunan Rkt & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan
- 12) Karena pengetahuan IT kurang di miliki oleh kepala - kepala sekolah dalam melakukan penyusunan RKT Perencanaan Berbasis Data, maka memaksimalkan peran operator - operator sekolah untuk mendampingi kepala - kepala sekolah dalam penyusunan RKS dan Lembar Kerja ARKAS 4.0
- 13) Karena tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan, maka di lakukan kesepakatan untuk merampungkan hasil kerja tersebut dengan melalui pengawas - pengawas bina dan mengirimkannya di link lembar hasil kerja
- 14) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan di lakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 15) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan untuk segera mendorong sekolah melakukan konversi ke ARKAS 4.0
- 16) Memandu sekolah dalam menyusun lembar kerja RKAS berdasarkan Rapor Pendidikan
- 17) Menginformasikan kepada dinas pendidikan terkait untuk mengatur mekanisme pembiayaan proses pengimbasan oleh sekolah penggerak
- 18) Melakukan koordinasi secara terus menerus dan berkesinambungan baik luring maupun daring dengan Bappeda seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo dalam rangka mengoptimalkan pemetaan indikator dan sub indikator SPM dalam RKPD
- 19) Melakukan pendampingan secara langsung responden yang ada di satuan pendidikan dalam melakukan pengisian asesmen awal program GSS dengan baik dan benar
- 20) Memberikan sosialisasi /pemahaman kepada semua guru dan kepala sekolah tentang transformasi pendidikan khusus agar bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya
- 21) Bermitra dengan pemda atau Dinas Pendidikan membangun sarana yang bisa menunjang anak anak berkebutuhan khusus di sekolah
- 22) Berkoordinasi dengan Bappeda, Biro Hukum Setda dalam mengidentifikasi dokumen kelengkapan penyusunan draf regulasi
- 23) Menghimpun perusahaan lokal guna mendukung peningkatan mutu pendidikan daerah
- 24) Pendampingan secara langsung untuk mengatasi masalah terkait akun belajar id serta mengoptimalkan peran ko kapten dan duta teknologi di daerah

C. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN SEPTEMBER adalah:

- 1) Memaksimalkan Kehadiran Pendamping Pengawas sebagai tim tata kelola Dinas pendidikan untuk melakukan tindak lanjut kegiatan pendampingan Pendampingan PBD Penyusunan RKT & Arkas 4.0 Berdasarkan Rapor Pendidikan Kepada Satuan Pendidikan Jenjang SD/SMP
- 2) Pelaksanaan Kegiatan PBD Pemda Tahap II di Kabupaten Gorontalo Utara sebaiknya teragendakan dalam kegiatan yang wajib dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara
- 3) Penyusunan Program bersama BPMP Prov. Gorontalo dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pohuwato terkait Program Peningkatan literasi pada satuan pendidikan yang tingkat literasinya rendah ( level 1 dan 2) untuk tahun anggaran 2024
- 4) Meningkatkan iklim inklusivitas hasil rapor pendidikan tahun 2022 di satpen umum dan kejuruan melalui pengisian sulinjar lebih berhati hati lagi (sesuai dengan kondisi sebenarnya)
- 5) Meningkatkan kompetensi khusus guru berkebutuhan khusus dengan cara mendiklatkan mereka, magang di sekolah Dikus, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi
- 6) Mengoptimalkan Kebijakan -kebijakan terkait pendidikan inklusif di daerah
- 7) Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lulusan penyandang disabilitas yang kompeten untuk bisa diterima bekerja di instansi pemerintah
- 8) Konsultan & Tim PDM 5 terus berkoordinasi dengan Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kab Gorontalo untuk segera menyelesaikan penyusunan draf regulasi KMB
- 9) Berkoordinasi intensif dengan pegiat literasi dalam rangka memaksimalkan kegiatan Verifikasi dan Validasi Komunitas Pegiat Literasi
- 10) Koordinasi intensif dengan dinas terkait dan satuan pendidikan melalui telp dan WA Group dalam rangka mendapatkan rapor pendidikan satuan pendidikan terkait Analisis rapor Pendidikan Sekolah PSP angkatan 3
- 11) Membagi sekolah mitra berdasarkan tema untuk mendapatkan solusi pelaksanaan pengimbasan PSP angkatan 2 di Kota Gorontalo serta koordinasi intersif dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengimbasan PSP Angkatan 2 di wilayah tersebut
- 12) Karena tidak cukupnya waktu untuk merampungkan hasil kerja RKT dan Lembar Kerja ARKAS selama pendampingan, maka di lakukan kesepakatan untuk merampungkan hasil kerja tersebut dengan melalui pengawas - pengawas bina dan mengirimkannya di link lembar hasil kerja
- 13) Mengotipmalkan peran kapten dan co capten di daerah serta koordinator kecamatan yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya
- 14) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan di lakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 15) Penguatan dan sosialisasi yang berkesinambungan dari Kemeterian terkait (Kemendagri dan Kemenkeu) kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pemenuhan SPM beserta sanksi-sanksinya kepada pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten/Kota
- 16) Mengawal secara bersama-sama program Kemendikbudristek dengan pencapaian untuk menuntaskan target di Grid masing - masing PDM dan melakukan pendekatan ke satuan pendidikan melalui pengawas dan penilik dengan melakukan pendampingan kepada pengawas terkait segala kebijakan/kegiatan yang diamanatkan oleh Kemendikbudristek
- 17) Perlu adanya Sosialisasi POS Asesmen nasional bagi Proktor/Teknisi/Pengawas ruang
- 18) Perlu adanya perhatian khusus dari pihak Dinas Pendidikan pada SKB dan PKBM di masing-masing Kab/Kota terkait adanya data anomali pada beberapa PKBM serta adanya peserta JOKI di SKB dan PKBM
- 19) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan di lakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 20) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait kendala hasil pendampingan Piloting Kampanye Sekolah Sehat
- 21) Menyampaikan ke Dinas Kesehatan terkait Raport Kesehatan Siswa hasil pendampingan Piloting Kampanye Sekolah Sehat
- 22) Menyarankan untuk mengikuti penjadwalan ulang bagi peserta yang belum mengikuti AN jenjang SMP/Paket B
- 23) Melakukan koordinasi lanjutan dengan ketua KKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Optimalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA dan SMK

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 24) Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
- 25) Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Tim Teknis baik Kab/Kota maupun Provinsi serta perlu adanya pendampingan Verval Dapodik dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan AN
- 26) Memaksimalkan peralatan tersedia dalam rangka Pembuatan Konten Pemulihan Pembelajaran ditingkat Kabupaten/Kota
- 27) Mengawal secara bersama-sama program Kemendikbudristek dengan pencapaian untuk menuntaskan target di Grid masing - masing PDM dan melakukan pendekatan ke satuan pendidikan melalui pengawas dan penilik dengan melakukan pendampingan kepada pengawas terkait segala kebijakan/kegiatan yang diamanatkan oleh Kemendikbudristek
- 28) Perlu adanya Sosialisasi POS Asesmen nasional bagi Proktor/Teknisi/Pengawas ruang
- 29) Perlu adanya perhatian khusus dari pihak Dinas Pendidikan pada SKB dan PKBM di masing-masing Kab/Kota terkait adanya data anomali pada beberapa PKBM serta adanya peserta JOKI di SKB dan PKBM
- 30) Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan yang nantinya akan di lakukan melalui pengawas - pengawas bina di satuan pendidikan
- 31) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait kendala hasil pendampingan Piloting Kampanye Sekolah Sehat
- 32) Menyampaikan ke Dinas Kesehatan terkait Raport Kesehatan Siswa hasil pendampingan Piloting Kampanye Sekolah Sehat
- 33) Menyarankan untuk mengikuti penjadwalan ulang bagi peserta yang belum mengikuti AN jenjang SMP/Paket B
- 34) Melakukan koordinasi lanjutan dengan ketua KKKS Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Optimalisasi Chromebook dan belajar id jenjang SMA, SMK, SLB/Kesetaraan
- 35) Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
- 36) Perlu adanya koordinasi yang intensif dengan Tim Teknis baik Kab/Kota maupun Provinsi serta perlu adanya pendampingan Verval Dapodik dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan AN

### C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

#### **Progress / Kegiatan :**

Untuk mendukung tercapainya target nilai SAKIP yang telah ditetapkan, BPMP Gorontalo telah menyusun konsep SAKIP, yang meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan : menyiapkan bahan dokumen perencanaan yang terdiri dari pedoman penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kerja dan rencana aksi
- 2) Pengukuran capaian kinerja : mengukur ketercapaian target triwulan 3 yang telah ditetapkan yang diinput pada aplikasi simproka
- 3) Laporan kinerja : mengidentifikasi unsur-unsur yang harus dimuat dalam laporan kinerja instansi serta melihat bagaimana informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

#### **Kendala / Permasalahan :**

Masih terdapat beberapa dokumen fisik yang belum terdokumentasi dengan baik

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam implementasi SAKIP satuan kerja

### D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

#### **Progress / Kegiatan :**

Capaian IKPA BPMP Provinsi Gorontalo triwulan 3 sebesar 96,80 dan nilai EKA sebesar 81,2

#### **Kendala / Permasalahan :**

Beberapa program/kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Terus melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan perencanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya serta melakukan koordinasi dan pemantauan terkait unsur-unsur yang menjadi penyumbang nilai EKA dan IKPA di satuan kerja

## 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. perlu dilakukan evaluasi bersama semua PDM 1 - PDM 12 dengan memperhatikan objective masing-masing PDM.
2. Kuatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kab/kota untuk percepatan pencapaian progress
3. Buatlah rapat berkala untuk pemantauan progress selanjutnya

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Gorontalo, 30 Oktober 2023

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV  
BPMP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI GORONTALO s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	<b>TW4 : 1,96</b>	<b>TW4 : 0,96</b>
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30.00	<b>TW4 : 30</b>	<b>TW4 : 100</b>
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Predikat	A	<b>TW4 : A</b>	<b>TW4 : A</b>
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo	Nilai	84	<b>TW4 : 84</b>	<b>TW4 : 98,56</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.19.485.070.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Januari 2024 sebesar **Rp. 19.318.325.008** atau **99,14%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Januari 2024 **Rp. 166.744.992**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen**

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

**Progress / Kegiatan :**

A. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 Bulan OKTOBER, adalah :

- 1) Kordinasi untuk Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan
- 2) Monev Persiapan pelaksanaan AN (Gladi Bersih) Jenjang SD/Paket A Sederajat
- 3) Monev Pelaksanaan AN Jenjang SD/Sederajat
- 4) Pendataan TIK Lanjutan
- 5) Pendampingan 1 Desa 1 Paud di KabGor dan Gorut
- 6) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait Percepatan Penggunaan Arkas 4.0
- 7) Rapat Persiapan PMO bulan Oktober 2023
- 8) Pendampingan Satuan Pendidikan PAUD terkait Rapor Pendidikan Satpen
- 9) Pendampingan PBD dan Evaluasi Diri jenjang PAUD di Kota Gorontalo
- 10) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 di kab. Pohuwato
- 11) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kota Gorontalo
- 12) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kabupaten Gorontalo
- 13) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kab. Boalemo
- 14) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kab. Gorut
- 15) Advokasi dan Kemitraan Program transisi PAUD-SD di Kota Gorontalo
- 16) Bimtek Advokasi Rapor Pendidikan dan PBD PKBM Mutiara Lemito Kab. Pohuwato
- 17) Bimtek Advokasi Rapor Pendidikan dan PBD pada program BOP Kinerja Kesetaraan
- 18) Bimtek Advokasi Rapor Pendidikan dan PBD pada program BOP Kinerja Kesetaraan
- 19) Pendampingan PBD Melalui Unduh Lembar PBD Dan Evaluasi Diri Sekolah Rapor Pendidikan Jenjang Paud

B. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 bulan NOVEMBER, adalah :

1. Kordinasi untuk Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan
2. Koordinasi Progres Hasil Pelaksanaan AN dengan Tim Teknis Provinsi dan Kab/Kota
3. Peningkatan Penggunaan ARKAS 4.0 dan SIPLah serta Percepatan Penyaluran Dana BOSP
4. Monev hasil pengimnasan PSP angkatan 1
5. Pendampingan Perencanaan Berbasis Data Pemerintah Daerah

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

6. Pendampingan pada Kegiatan Bimtek Advokasi Rapor Pendidikan dan PBD Program BOP Kinerja Kesetaraan di PKBM wilayah Lemito dan Popayato Barat, Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo
  7. Advokasi dan Kemitraan Program Transisi PAUD-SD Kab/Kota
  8. Advokasi Kebijakan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021
  9. Advokasi Rencana tindak lanjut konsolidasi teknis penguatan TPPKS, Unit Layanan Disabilitas, Penyusunan Juknis PPDB tahun 2024
  10. Pendampingan ke sekolah piloting TKSI
  11. Rapat Pembahasan rancangan peraturan Gubernur Gorontalo
  12. Pendataan TIK Lanjutan
- C. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.1 Bulan DESEMBER, adalah :
1. Coaching Clinic Evaluasi Diri PAUD dan PBD Kesetaraan di Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
  2. Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan BOSP melalui ARKAS di Kota Gorontalo
  3. Koordinasi terkait progres percepatan pelaporan BOSP Satpen
  4. Kegiatan Monev DAK TIK dan Pendampingan Aktivasi Akun Belajar.id

#### **Kendala / Permasalahan :**

- A. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan OKTOBER , adalah:
1. Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan belum optimal
  2. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya melengkapi dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Rapor Pendidikan, untuk di tuangkan ke dalam Lembar Kerja ARKAS 4.0
  3. Kehadiran peserta hari pertama tidak tepat waktu dalam mengikuti setiap season kegiatan
  4. Untuk PAUD Kelompok Bermain Mekar Indah minim APE dalam dan APE Luar
  5. Adanya gangguan pada Server Pusat, Jaringan Internet yang tidak stabil, Terjadi antrian peserta didik yang mengikuti Gladi disebabkan sering logout pada saat pelaksanaan gladi bersih AN jenjang SD/Sederajat
  6. Ketidakterdediaan Buku Bacaan Bermutu untuk Pemodelan dan baca
  7. SN terdaftar di sekolah lainnya, tombol edit tidak muncul dan Hapus tidak berfungsi sehingga menyulitkan sekolah melakukan perbaikan data TIK, Chromebook yang hilang, data ganda dan tidak bisa dihapus, login SSO tidak berfungsi, kendala jaringan internet karena sebagian besar sekolah berada di daerah terpencil pada saat pendataan TIK sekolah penerima Chromebook
  8. Sekolah sasaran kegiatan Pendampingan 1 Desa 1 Paud di KabGor dan Gorut ditemukan bahwa sekolah tersebut belum punya gedung tempat kegiatan belajar mengajar, belum memiliki Ijin Operasional, belum memiliki Akta Pendirian, belum memiliki NPSN
  9. Masih terdapat Proktor yang belum paham teknis pelaksanaan AN
  10. Masih terdapat satuan pendidikan yang tidak mengetahui jadwal pelaksanaan Gladi Bersih AN
  11. Data yang dikeluarkan oleh BPS adalah Angka partisipasi siswa, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi minimum. Sedangkan angka putus sekolah tidak tersedia di BPS. Data yang tersedia tersebut diperoleh melalui survey dengan sampling data. Hasilnya merupakan data prosentase. Hasil survey ini sifatnya angka pendekatan. Terdapat error data yang bisa saja terjadi di lapangan saat survey. Sehingga Dinas Pendidikan perlu mempertimbangkan hal tersebut. Pendataan jumlah sekolah pada setiap desa juga tersedia di BPS
  12. Masih adanya pemahaman bahwa perencanaan dan penganggaran untuk bidang pendidikan hanya menjadi beban bagian perencanaan bukan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak
  13. Kesadaran akan pentingnya tentang hadirnya Rapor Pendidikan sebagai sumber utama dalam menilai capaian mutu pendidikan yang telah diselaraskan dengan SPM Pendidikan harus dimaksimalkan khususnya di internal Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
  14. Masih adanya pemahaman bahwa perencanaan dan penganggaran untuk bidang pendidikan hanya menjadi beban bagian perencanaan bukan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik internal Dinas Pendidikan Gorontalo Utara maupun OPD terkait
  15. Rancangan perundangan Kepala Daerah tentang Merdeka Belajar tidak masuk dalam perencanaan perundangan tahun anggaran 2023
  16. Peserta yang hadir dalam zoom meeting belum optimal karena pelaksanaan rapat dilaksanakan pada malam hari pada kegiatan Rapat Persiapan PMO bulan Oktober 2023
  17. Keterbatasan jumlah pengawas TK/SD didaerah, Kompetensi pengawas yang masih kurang tentang program transisi PAUD-SD ini karena pada awal program diluncurkan mereka tidak dilibatkan, serta Antusias guru - guru untuk belajar mandiri membedah modul - modul pembelajaran masih kurang
  18. Kesibukan stakeholder terkait ( Disdik, Biro Hukum, BPMP) pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo
  19. Pelaksanaan rapat persiapan PMO belum membahas progres IKM dan kebijakan merdeka belajar lainnya yang nantinya bisa didiskusikan dengan PMO Daerah
  20. Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan harmonisasi perancangan perundangan antar pihak terkait (Disdik, Biro Hukum, Kemenkumham)
- B. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan NOVEMBER, adalah:
- 1) Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan belum optimal
  - 2) Koordinasi yang belum maksimal sehingga satuan pendidikan belum paham bahkan belum mengetahui tentang kebijakan penggunaan ARKAS
  - 3) Jumlah sekolah yang menjadi sampel masih kurang , sehingga potret kondisi hasil pengimbasan masih belum optimal
  - 4) Hasil atau produk yang dihasilkan tidak bisa di periksa karena batas kewenangan BPMP
  - 5) Belum semua kegiatan prioritas SPM bidang pendidikan yang sudah teralokasikan anggarannya di RAPBD
  - 6) Masih terdapat dana silpa yang belum bisa digunakan
  - 7) Banyaknya beban Bendahara sekolah yang berimbas pada kinerjanya sebagai guru di satuan pendidikan
  - 8) Inputan data pada aplikasi Dapodik tidak valid dan cenderung hanya mengejar batas akhir sinkronisasi Dapodik
  - 9) Keterbatasan jumlah pengawas TK/SD didaerah untuk menindaklanjuti hasil Advokasi dan Kemitraan Program Transisi PAUD-SD
  - 10) Kompetensi pengawas yang masih kurang tentang program transisi PAUD-SD karena pada awal program diluncurkan mereka tidak dilibatkan
  - 11) Kurangnya informasi terkait program transisi PAUD - SD di satuan pendidikan sehingga proses pembelajaran, terutama pada kelas bawah jenjang sekolah dasar, yang sesuai yang diharapkan pada program ini belum dilaksanakan maksimal
  - 12) Antusias guru - guru untuk belajar mandiri membedah modul - modul pembelajaran masih kurang

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 13) Kurangnya pengetahuan IT yang di miliki oleh Tutor Paket B dan Paket C dalam melakukan login Rapor Pendidikan serta Penyusunan RKT dan ARKAS
  - 14) Adanya ketergantungan Tutor PBD Rapor pendidikan kepada para operator - operator sekolah, melakukan menyusun RKT dan memasukkannya ke dalam lembar kerja ARKAS
  - 15) Kurangnya pemahaman setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen RKT PBD berdasarkan Rapor Pendidikan dan merencanakan program / kegiatan berbasis PBD Rapor Pendidikan
  - 16) Keterbatasan fiskal daerah untuk pemenuhan seluruh sub kegiatan SPM bidang pendidikan tahun 2024
  - 17) Informasi yang kurang dan kurang maksimalnya tentang tatacara pengisian tes kebugaran siswa indonesia (TKSI)
  - 18) Pemahaman guru PJOK tentang pelaksanaan tes kebugaran siswa indonesia tidak maksimal
  - 19) SN terdaftar di sekolah lainnya, tombol edit tidak muncul dan hapus tidak berfungsi sehingga menyulitkan sekolah melakukan perbaikan data TIK, Chromebook yang hilang, data ganda dan tidak bisa dihapus, login SSO tidak berfungsi, terkendala jaringan internet karena sebagian besar sekolah berada di daerah terpencil pada saat pendataan TIK sekolah penerima Chromebook
- C. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan DESEMBER , adalah:
1. Ketidaksiannya Kepala - kepala satuan pendidikan non formal dan para tutur PKBM dalam menyelesaikan penyusunan RKT Rapor Pendidikan
  2. Pengetahuan IT yang di miliki oleh Tutor Paket B dan Paket C yang masih kurang sehingga kesulitan melakukan Penyusunan RKT dan Pengimputan ARKAS 4.1
  3. Adanya ketergantungan Tutor PBD Rapor pendidikan kepada para operator - operator sekolah, melakukan menyusun RKT dan memasukkannya ke dalam lembar kerja ARKAS
  4. Masih banyak Satuan Pendidikan yang membuat perencanaan TAHAP 1 Yang belum sesuai dengan rujukan dari Raport Pendidikan
  5. Masih ada guru yang mengalami kendala dalam pengisian Evadir PAUD karena spesifikasi laptop yang digunakan tidak memadai pada Tahun 2024 jenjang PAUD akan memiliki Rapor Pendidikan
  6. Operator PAUD belum mengisi lembar evaluasi diri sampai ke lembar PBD ke ARKAS 4
  7. Sebagian besar sekolah belum melakukan penyelesaian pelaporan BOS sebagai syarat untuk mendapatkan BOS pada penyaluran tahap 1
  8. Beberapa kendala dalam pendaatan DAK TIK adalah SN terdaftar di sekolah lainnya, terdapat Chromebook yang hilang, terdapat data ganda, kendala jaringan internet dalam pengisian pemanfaatan chromebook jumlah perangkat yang diterima berbeda dengan jumlah tercantum di aplikasi pendataan, bukti yang disampaikan satuan pendidikan sebagai bahan verifikasi masih belum lengkap
  9. Banyak operator jenjang PAUD belum mengetahui cara mengaktifasi akun belajar.id masing-masing karena selama ini yang melakukan aktivasi belajar.id adalah operator Dinas Pendidikan Kab/Kota di wilayahnya

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

- A. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan OKTOBER adalah:
1. Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
  2. Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan melalui pengawas bina tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan yang akan dituangkan dalam ARKAS
  3. Panitia menghubungi peserta agar segera hadir tepat waktu dalam ruangan kegiatan
  4. Pembuatan APE dengan memanfaatkan sumber alam setempat
  5. Satuan Pendidikan/Proktor berkoordinasi dengan Tim Teknis AN baik Provinsi maupun Kab/Kota masing-masing
  6. Mencetak dan menjilid Buku Bacaan Bermutu dan meminjam pada Satuan Pendidikan penerima hibah Buku Bacaan Bermutu untuk di pajang di sudut baca di ruang kelas pelaksanaan Bimtek dan digunakan untuk pemodelan
  7. Berkoordinasi dengan perwalian TIK Gorontalo serta Disdik dan satpen terkait untuk memaksimalkan pendataan TIK lanjutan bagi sekolah-sekolah penerima chromebook
  8. Melakukan pendampingan sekolah-sekolah yang masih mengalami masalah dengan pendataan TIK
  9. Mendorong kolaborasi dan sinergitas BPMP Provinsi Gorontalo, dengan Dinas Pendidikan sebagai wujud penjaminan mutu bagi satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo
  10. Program Puhwato SATU DATA menjadi suatu keharusan untuk segera direalisasikan untuk kebutuhan pemda kabupaten Puhwato
  11. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo akan segera mengagendakan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pemenuhan sub indikator prioritas SPM bidang pendidikan
  12. OPD teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara harus lebih focus / berperan aktif dalam merancang kegiatan yang menunjang SPM bidang pendidikan yang benar-benar berdasarkan hasil capaian Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022
  13. Harmonisasi Rancangan Perundangan Merdeka Belajar dengan pihak terkait
  14. Mengoptimalkan kehadiran peserta rapat persiapan PMO
  15. Memanfaatkan guru - guru yang memiliki kemampuan belajar cepat dan mau belajar mandiri tentang modul - modul transisi PAUD -SD, yang dapat menjadi mitra BPMP di daerah dalam mengawal pelaksanaan program transisi PAUD-SD
  16. Melaksanakan bimtek pengawas tentang program transisi PAUD-SD
  17. Mendorong guru untuk mau merubah mindset dan mau belajar secara mandiri untuk peningkatan kompetensi mereka
  18. Memasukkan agenda selain PSP dalam pembahasan rapat persiapan PMO
  19. Pembentukan Tim Khusus internal Dinas Pendidikan Kabupaten Puhwato yang berfokus pada perencanaan, penganggaran dan monitoring pelaksanaan program - program Dinas Pendidikan Kabupaten Puhwato khususnya pada pemenuhan indeks SPM bidang pendidikan
  20. Koordinasi dan kolaborasi antar semua OPD terkait di Kabupaten Puhwato untuk menyusun strategi penganggaran kegiatan dengan kondisi keterbatasan dana sesuai kondisi fiskal daerah
  21. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo akan segera mengagendakan pertemuan internal untuk membahas tindak lanjut hasil pemetaan Dashboard Metabase sekaligus Reformula inputan alokasi anggaran di SIPD Kemendagri
- B. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan NOVEMBER adalah:
- 1) Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
  - 2) Membentuk WAG untuk memudahkan koordinasi dengan Admin ARKAS
  - 3) Jumlah sekolah yang menjadi sampel masih kurang , sehingga potret kondisi hasil prngimbasan masih belum optimal. Untuk itu BPMP akan menghimpun data lain sebagai data sekunder

- 4) Hasil atau produk yang dihasilkan tidak bisa di periksa karena batas kewenangan BPMP
- 5) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango melalui Kabid Ketenagaan berjanji akan segera rapat internal bersama Kadis Pendidikan Kabupaten Bone Bolango untuk Re-formula penginputan alokasi anggaran sub kegiatan SPM Pendidikan tahun 2023
- 6) Inspektorat sebagai unsur pengawas akan melaksanakan pendampingan yang intensif kepada Tim Manajemen BOS dan satuan pendidikan agar tidak terjadi silpa pada proses pelaksanaan program
- 7) Memanfaatkan guru - guru yang memiliki kemampuan belajar cepat dan mau belajar mandiri tentang modul - modul transisi PAUD -SD, yang dapat menjadi mitra BPMP di daerah dalam mengawal pelaksanaan program transisi PAUD-SD
- 8) Melaksanakan bimtek pengawas tentang program transisi PAUD-SD
- 9) Mendorong guru untuk mau merubah mindset dan mau belajar secara mandiri untuk peningkatan kompetensi mereka
- 10) Mendampingi secara intensif kepada para tutor paket B dan Paket C, yang masih kesulitan menggunakan IT dalam melakukan login Rapor Pendidikan serta Penyusunan RKT dan ARKAS
- 11) Memberikan pemahaman dan mekasimalkan peran para Tutor untuk memahami secara mendalam terkait PBD Rapor pendidikan sehingga tidak lagi bersandar kepada para operator - operator sekolah melakukan menyusun RKT dan memasukkannya ke dalam lembar kerja ARKAS
- 12) Memberikan pemahaman secara intensif kepada setiap Satuan Pendidikan tentang pentingnya dokumen RKT PBD berdasarkan Rapor Pendidikan dan merencanakan program / kegiatan berbasis PBD Rapor Pendidikan
- 13) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango telah mengalokasikan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024 untuk insentif Bendahara dan Admin Dapodik
- 14) Memaksimal waktu yang tersedia dan menyesuaikan dengan waktu penyampaian materi lainnya
- 15) Melaksanakan Pendampingan di satuan pendidikan piloting terkait pengisian TKS
- 16) Berkoordinasi dengan perwalian TIK Gorontalo serta Disdik dan satpen terkait untuk memaksimalkan pendataan TIK lanjutan bagi sekolah-sekolah penerima chromebook

C. Strategi/tindakan lanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan DESEMBER adalah:

1. Membuat komitmen dengan Kepala - kepala satuan pendidikan non formal dan para tutor PKBM untuk segera menyelesaikan penyusunan RKT Rapor Pendidikan
2. Melakukan pendampingan secara intensif kepada kepala sekolah ataupun Tutor Paket B dan Paket C yang masih kurang pengetahuan IT dalam melakukan Penyusunan RKT dan Penginputan ARKAS 4.1
3. Memaksimalkan peran Pengawas Bina dan Operator - operator pendamping untuk melakukan menyusun RKT dan memasukkannya ke dalam lembar kerja ARKAS
4. Menghimbau Operator Dapodik Dinas Pendidikan membantu satpen untuk melakukan aktivasi Aplikasi ARKAS 4.1
5. Mendorong Tim Markas Dinas Pendidikan Kab/kota untuk melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam mengunduh ARKAS versi terbaru, yakni ARKAS 4 karena versi aplikasi ini telah dilengkapi dengan beberapa pembaruan dan penyempurnaan
6. Melakukan koordinasi dengan Disdik dan satpen terkait untuk mendorong sekolah agar segera menyelesaikan pelaporan sesuai dengan yang yang ditentukan
7. Melakukan koordinasi dengan perwalian TIK Gorontalo, Disdik dan satpen terkait dalam rangka pendataan TIK DAK fisik serta mengoptimalkan aktivasi akun belajar di wilayah masing-masing
8. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait cara melakukan aktivasi akun belajar.id di sekolahnya

## B . SK 1.0 Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

### Progress / Kegiatan :

A. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 Bulan Oktober, adalah :

- 1) Koordinasi untuk Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan
- 2) Monev Persiapan pelaksanaan AN (Gladi Bersih) Jenjang SD/Paket A Sederajat
- 3) Monev Pelaksanaan AN Jenjang SD/Sederajat
- 4) Koordinasi dengan Kab/Kota terkait Percepatan Penggunaan Arkas 4.0
- 5) Pembuatan Konten Praktek Baik PSP Angkatan 1 Kota Gorontalo
- 6) Rapat Persiapan PMO bulan Oktober 2023
- 7) Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi
- 8) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 di kab. Pohuwato
- 9) Pendampingan PBD Pemda Tahap 2 Kota Gorontalo
- 10) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kabupaten Gorontalo
- 11) Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi di Grand Q Hotel
- 12) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kab. Boalemo
- 13) Pendampingan PBD Pemda tahap 2 Kab. Gorut
- 14) Advokasi dan Kemitraan Program transisi PAUD-SD di Kota Gorontalo
- 15) Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi di El Madinah Hotel
- 16) Studi Tiru Berbagi Praktek Baik Program dengan UPT Lainnya
- 17) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo
- 18) Rapat koordinasi Tes Kebugaran Rakyat Indonesia (TKSI)
- 19) Pelaksana Teknis akan melaksanakan Sosialisasi terkait percepatan Satuan Pendidikan dalam membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ( TPPK )
- 20) Apresiasi dan Lomba Video Praktek Baik Pemanfaatan Akun Belajar Tingkat Provinsi Gorontalo
- 21) Pendataan TIK Lanjutan

B. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 Bulan NOVEMBER, adalah :

1. Koordinasi untuk Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan
2. Koordinasi Progres Hasil Pelaksanaan AN dengan Tim Teknis Provinsi dan Kab/Kota
3. Peningkatan Penggunaan ARKAS 4.0 dan SIPLah serta Percepatan Penyaluran Dana BOSP
4. Monev hasil pengimnasan PSP angkatan 1

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5. Rapat Pembekalan Pendampingan Komunitas Belajar Antar Sekolah Untuk Penguatan Literasi
6. Pendampingan Perencanaan Berbasis Data Pemerintah Daerah
7. Advokasi dan Kemitraan Program Transisi PAUD-SD Kab/Kota
8. Advokasi Kebijakan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021
9. Advokasi Rencana tindak lanjut konsolidasi teknis penguatan TPPKS, Unit Layanan Disabilitas, Penyusunan Juknis PPDB tahun 2024
10. Pendampingan ke sekolah piloting TKSI
11. Rapat Pembahasan rancangan peraturan Gubernur Gorontalo
12. Pendataan TIK Lanjutan

C. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKK 1.2 Bulan DESEMBER, adalah :

1. Kegiatan Monev DAK TIK dan Pendampingan Aktivasi Akun Belajar.id
2. Rapat Tematik Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan ( satuan pendidikan )
3. Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 tematik Ketahanan Sosial dan Budaya
4. Kegiatan Advokasi RTL Konsolidasi Teknis Penguatan TPPKS, Unit layanan Disabilitas, Penyusunan Juknis PPDB tahun 2024
5. Koordinasi terkait progres percepatan pelaporan BOSP Satpen

#### **Kendala / Permasalahan :**

A. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan Bulan OKTOBER , adalah:

- 1) Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan belum optimal
  - 2) Kehadiran peserta hari pertama tidak tepat waktu dalam mengikuti setiap season kegiatan
  - 3) Masih terdapat Proktor yang belum paham teknis pelaksanaan AN
  - 4) Masih terdapat satuan pendidikan yang tidak mengetahui jadwal pelaksanaan Gladi Bersih
  - 5) Data yang dikeluarkan oleh BPS adalah Angka partisipasi siswa, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi minimum. Sedangkan angka putus sekolah tidak tersedia di BPS. Data yang tersedia tersebut diperoleh melalui survey dengan sampling data. Hasilnya merupakan data prosentase. Hasil survey ini sifatnya angka pendekatan. Terdapat error data yang bisa saja terjadi di lapangan saat survey. Sehingga Dinas Pendidikan perlu mempertimbangkan hal tersebut
  - 6) Masih adanya pemahaman bahwa perencanaan dan penganggaran untuk bidang pendidikan hanya menjadi beban bagian perencanaan bukan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak
  - 7) Kesadaran akan pentingnya tentang hadirnya Rapor Pendidikan sebagai sumber utama dalam menilai capaian mutu pendidikan yang telah diselaraskan dengan SPM Pendidikan harus dimaksimalkan khususnya di internal Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
  - 8) Masih adanya pemahaman bahwa perencanaan dan penganggaran untuk bidang pendidikan hanya menjadi beban bagian perencanaan bukan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik internal Dinas Pendidikan Gorontalo Utara maupun OPD terkait
  - 9) Rancangan perundangan Kepala Daerah tentang Merdeka Belajar tidak masuk dalam perencanaan perundangan tahun anggaran 2023
  - 10) Adanya gangguan pada Server Pusat, Jaringan Internet yang tidak stabil, Terjadi antrian peserta didik yang mengikuti Gladi disebabkan sering logout pada saat pelaksanaan gladi bersih AN jenjang SD/Sederajat
  - 11) Ketidakterediaan Buku Bacaan Bermutu untuk Pemodelan dan baca
  - 12) SN terdaftar di sekolah lainnya, tombol edit tidak muncul dan hapus tidak berfungsi sehingga menyulitkan sekolah melakukan perbaikan data TIK, Chromebook yang hilang, data ganda dan tidak bisa dihapus, login SSO tidak berfungsi, terkendala jaringan internet karena sebagian besar sekolah berada di daerah terpencil pada saat pendataan TIK sekolah penerima Chromebook
  - 13) Kesulitan dalam menemukan jadwal bertemu dengan pimpinan daerah berhubung beliau memiliki kesibukan dan agenda sendiri yang sangat penting
  - 14) Peralatan pembuatan konten masih manual dan perlu untuk di upgrade
  - 15) Tidak semua perwakilan dari satuan pendidikan binaan dapat hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan secara daring dikarenakan kendala jaringan yang tidak stabil dan waktu pelaksanaan yg bertepatan dengan kegiatan lain
  - 16) Selang waktu pendaftaran, seleksi s.d pengumuman lomba sangat singkat sehingga kuota peserta pada beberapa kategori sangat minim pada saat pelaksanaan Apresiasi dan Lomba Vedeo Praktek Baik Pemanfaatan Akun Belajar Tingkat Provinsi Gorontalo
  - 17) Peserta yang hadir dalam zoom meeting belum optimal karena pelaksanaan rapat dilaksanakan pada malam hari
  - 18) Keterbatasan jumlah pengawas TK/SD didaerah
  - 19) Kompetensi pengawas yang masih kurang tentang program transisi PAUD-SD ini karena pada awal program diluncurkan mereka tidak dilibatkan
  - 20) Antusias guru - guru untuk belajar mandiri membedah modul - modul pembelajaran masih kurang
  - 21) Tidak semua Koordinator ada di tempat karena adanya kegiatan yang sama di luar daerah
  - 22) Kesibukan stakeholder terkait ( Disdik, Biro Hukum, BPMP) pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo
  - 23) Fiskal daerah yang terbatas dan harus dibagi di semua OPD di Kabupaten Pohuwato
  - 24) Tahun 2024 adalah tahun pemilu dan program-program prioritas lain yang harus teralokasikan anggarannya
  - 25) Peran Inspektorat sebagai evaluator yang menelaah proses penganggaran dalam meloloskan perencanaan penganggaran yang tidak sesuai dengan SPM khususnya bidang pendidikan tahun 2024 Kota Gorontalo serta pengawalannya sampai pada pelaksanaan kegiatan ditahun berjalan untuk meminimalisir temuan diakhir tahun
  - 26) Tidak tersedianya anggaran pelaksanaan harmonisasi perancangan perundangan antar pihak terkait (Disdik, Biro Hukum, Kemenkumham)
- B. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan bulan NOVEMBER , adalah:
- 1) Penggunaan PMM bagi satuan pendidikan belum optimal
  - 2) Koordinasi yang belum maksimal sehingga satuan pendidikan belum paham bahkan belum mengetahui tentang kebijakan penggunaan ARKAS
  - 3) Jumlah sekolah yang menjadi sampel masih kurang , sehingga potret kondisi hasil prngimbasan masih belum optimal
  - 4) Hasil atau produk yang dihasilkan tidak bisa di periksa karena batas kewenangan BPMP
  - 5) Teknis sarana pelaksanaan rapat dimana mic kurang representatif dan ruangan yang terasa sempit
  - 6) Belum semua kegiatan prioritas SPM bidang pendidikan yang sudah teralokasikan anggarannya di RAPBD
  - 7) Indikator Numerasi baru teralokasikan sebanyak 3 sub kegiatan
  - 8) Dana silpa yang belum bisa digunakan
  - 9) Banyaknya beban Bendahara sekolah yang berimbas pada kinerjanya sebagai guru di satuan pendidikan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 10) Inputan data pada aplikasi Dapodik tidak valid dan cenderung hanya mengejar batas akhir sinkronisasi Dapodik
  - 11) Keterbatasan jumlah pengawas TK/SD di daerah untuk menindaklanjuti hasil Advokasi dan Kemitraan Program Transisi PAUD-SD
  - 12) Kompetensi pengawas yang masih kurang tentang program transisi PAUD-SD ini karena pada awal program diluncurkan mereka tidak dilibatkan
  - 13) Kurangnya informasi terkait program transisi PAUD - SD di satuan pendidikan sehingga proses pembelajaran, terutama pada kelas bawah jenjang sekolah dasar, yang sesuai yang diharapkan pada program ini belum dilaksanakan maksimal
  - 14) Antusias guru - guru untuk belajar mandiri membedah modul - modul pembelajaran masih kurang
  - 15) Keterbatasan fiskal daerah untuk pemenuhan seluruh sub kegiatan SPM bidang pendidikan tahun 2024
  - 16) Indikator untuk APS kesetaraan baru 1 sub kegiatan tersentuh anggaran. Pada proses pengisian sulinjar kemarin banyak kesetaraan yang kesulitan karena tidak memiliki sarpras. Selain itu, akses jalan menuju lokasi juga biasanya sulit dengan medan jalan yang rusak
  - 17) Kehadiran dari peserta ada beberapa kecamatan yang tidak terwakili, tidak hadir dalam pertemuan sehingga informasi tentang pembentukan tim TPPKS tidak tersampaikan
  - 18) Informasi yang kurang dan kurang maksimalnya tentang tatacara pengisian tes kebugaran siswa indonesia(TKSI)
  - 19) Pemahaman guru PJOK tentang pelaksanaan tes kebugaran siswa indonesia tidak maksimal
  - 20) SN terdaftar di sekolah lainnya, tombol edit tidak muncul dan hapus tidak berfungsi sehingga menyulitkan sekolah melakukan perbaikan data TIK, Chromebook yang hilang, data ganda dan tidak bisa dihapus, login SSO tidak berfungsi, terkendala jaringan internet karena sebagian besar sekolah berada di daerah terpencil pada saat pendataan TIK sekolah penerima Chromebook
- C. Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 1.2 kegiatan Bulan DESEMBER , adalah:
1. Beberapa kendala dalam pendataan DAK TIK adalah SN terdaftar di sekolah lainnya, terdapat Chromebook yang hilang, terdapat data ganda, kendala jaringan internet dalam pengisian pemanfaatan chromebook jumlah perangkat yang diterima berbeda dengan jumlah tercantum di aplikasi pendataan, bukti yang disampaikan satuan pendidikan sebagai bahan verifikasi masih belum lengkap
  2. Belum di peroleh formula yang tepat untuk menghitung kebutuhan sarana prasarana, di peroleh kesepakatan untuk perhitungan data pemetaan sebagai pembahasan pada kegiatan selanjutnya menggunakan SNI 03-0733-1989
  3. Beberapa BAPPEDA Kabupaten Kota yang tidak hadir pada saat kegiatan, sehingga informasi mengenai pemetaan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan tidak maksimal
  4. Masih variatif pemahaman terkait TPPKS, Unit layanan Disabilitas, Penyusunan Juknis PPDB tahun 2024, keterbatasan waktu sehingga penyampaian materi harus dibatasi, serta beberapa ketua MKKS tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena terkendala jarak
  5. Sebagian besar sekolah belum melakukan penyelesaian pelaporan BOS sebagai syarat untuk mendapatkan BOS pada penyaluran tahap 1

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

A. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan bulan OKTOBER adalah:

1. Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
2. Peserta yang hadir dalam zoom meeting belum optimal karena pelaksanaan rapat dilaksanakan pada malam hari
3. Mengoptimalkan kehadiran peserta rapat persiapan PMO
4. Memanfaatkan guru - guru yang memiliki kemampuan belajar cepat dan mau belajar mandiri tentang modul - modul transisi PAUD -SD, yang dapat menjadi mitra BPMP di daerah dalam mengawal pelaksanaan program transisi PAUD-SD
5. Melaksanakan bimtek pengawas tentang program transisi PAUD-SD
6. Mendorong guru untuk mau merubah mindset dan mau belajar secara mandiri untuk peningkatan kompetensi mereka
7. Satuan Pendidikan/Proktor berkoordinasi dengan Tim Teknis AN baik Provinsi maupun Kab/Kota masing-masing
8. Mencetak dan menjilid Buku Bacaan Bermutu dan meminjam pada Satuan Pendidikan penerima hibah Buku Bacaan Bermutu untuk di pajang di sudut baca di ruang kelas pelaksanaan Bimtek dan digunakan untuk pemodelan
9. Berkoordinasi dengan perwalian TIK Gorontalo serta Disdik dan satpen terkait untuk memaksimalkan pendataan TIK lanjutan bagi sekolah-sekolah penerima chromebook
10. Memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi kepada setiap Satuan Pendidikan melalui pengawas bina tentang pentingnya dokumen Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan yang akan dituangkan dalam ARKAS
11. Satuan Pendidikan/Proktor berkoordinasi dengan Tim Teknis AN baik Provinsi maupun Kab/Kota masing-masing
12. Program Puhwato SATU DATA menjadi suatu keharusan untuk segera direalisasikan untuk kebutuhan pemda kabupaten Puhwato
13. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo akan segera mengagendakan pertemuan dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pemenuhan sub indikator prioritas SPM bidang pendidikan
14. OPD teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara harus lebih focus / berperan aktif dalam merancang kegiatan yang menunjang SPM bidang pendidikan yang benar-benar berdasarkan hasil capaian Rapor Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022
15. Harmonisasi Rancangan Perundangan MB dengan pihak terkait
16. Pembentukan Tim Khusus internal Dinas Pendidikan Kabupaten Puhwato yang berfokus pada perencanaan, penganggaran dan monitoring pelaksanaan program - program Dinas Pendidikan Kabupaten Puhwato khususnya pada pemenuhan indeks SPM bidang pendidikan
17. Koordinasi dan kolaborasi antar semua OPD terkait di Kabupaten Puhwato untuk menyusun strategi penganggaran kegiatan dengan kondisi keterbatasan dana sesuai kondisi fiskal daerah
18. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo akan segera mengagendakan pertemuan internal untuk membahas tindak lanjut hasil pemetaan Dashboard Metabase sekaligus Reformula inputan alokasi anggaran di SIPD Kemendagri

B. Strategi/tindaklanjutan dalam pencapaian IKK 1.2 kegiatan BULAN NOVEMBER adalah:

- 1) Koordinasi intensif dengan Disdik terkait untuk mendorong penggunaan PMM di satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing
- 2) Membentuk WAG untuk memudahkan koordinasi dengan Admin ARKAS
- 3) Jumlah sekolah yang menjadi sampel masih kurang , sehingga potret kondisi hasil pengimbasan masih belum optimal. Untuk itu BPMP akan menghimpun data lain sebagai data sekunder
- 4) Hasil atau produk yang dihasilkan tidak bisa di periksa karena batas kewenangan BPMP
- 5) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango melalui Kabid Ketenagaan akan segera rapat internal bersama Kadis Pendidikan Kabupaten Bone Bolango untuk Re-formula penginputan alokasi anggaran sub kegiatan SPM Pendidikan tahun 2023
- 6) Inspektorat sebagai unsur pengawas akan melaksanakan pendampingan yang intensif kepada Tim Manajemen BOS dan satuan pendidikan agar tidak terjadi silpa pada proses pelaksanaan program

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- 7) Memanfaatkan guru - guru yang memiliki kemampuan belajar cepat dan mau belajar mandiri tentang modul - modul transisi PAUD -SD, yang dapat menjadi mitra BPMP di daerah dalam mengawal pelaksanaan program transisi PAUD-SD
  - 8) Melaksanakan bimtek pengawas tentang program transisi PAUD-SD
  - 9) Mendorong guru untuk mau merubah mindset dan mau belajar secara mandiri untuk peningkatan kompetensi mereka
  - 10) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango telah mengalokasikan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024 untuk insentif Bendahara dan Admin Dapodik
  - 11) Memaksimal waktu yang tersedia dan menyesuaikan dengan waktu penyampaian materi lainnya
  - 12) Meminta peserta lain untuk dapat meneruskan informasi kepada yang tidak bisa mengikuti kegiatan penguatan TPPKS, Unit Layanan Disabilitas, Penyusunan Juknis PPDB tahun 2024 atau bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau menghubungi langsung PDM 12 BPMP Prov Gorontalo
  - 13) Melaksanakan Pendampingan di satuan pendidikan piloting terkait pengisian TKS
  - 14) Berkoordinasi dengan perwalian TIK Gorontalo serta Disdik dan satpen terkait untuk memaksimalkan pendataan TIK lanjutan bagi sekolah-sekolah penerima chromebook
- C. Strategi/tindaklanjut dalam pencapaian IKK 1.1 kegiatan Bulan DESEMBER adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan perwalian TIK Gorontalo, Disdik dan satpen terkait dalam rangka pendataan TIK DAK fisik serta mengoptimalkan aktivasi akun belajar di wilayah masing-masing
  2. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait cara melakukan aktivasi akun belajar.id di sekolahnya
  3. Melakukan pembahasan lanjutan terkait pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan setiap daerah Kabupaten/kota
  4. Mendorong peserta yang hadir, khususnya ketua MKKS dan korwas untuk dapat meneruskan informasi kepada yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini atau bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikan, membagikan salinan materi kepada peserta atau menghubungi langsung PDM 12 BPMP Prov Gorontalo
  5. Melakukan koordinasi dengan Disdik dan satpen terkait untuk mendorong sekolah agar segera menyelesaikan pelaporan sesuai dengan yang yang ditentukan

### C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

#### **Progress / Kegiatan :**

Progres/kegiatan dalam proses pencapaian IKK 2.1 adalah melaksanakan revidi atas kelengkapan dokumen pendukung SAKIP di unit kerja. Pada triwulan 4 ini hasil SAKIP BPMP Provinsi Gorontalo sudah terbit dengan predikat A dengan score 83,95, dimana score mengalami kenaikan 1,15 poin dari tahun sebelumnya

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala/permasalahan dalam proses pencapaian IKK 2.1 adalah belum semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan melalui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi/tindaklanjut dalam mengatasi kendala/masalah pencapaian 2.1 adalah melakukan koordinasi dengan dengan pimpinan satker terkait beberapa catatan dan rekomendasi pada lembar hasil evaluasi untuk menjadi prioritas utama dan ditindaklanjuti pada tahun 2024

### D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo

#### **Progress / Kegiatan :**

Progres/kegiatan dalam pencapaian IKK 2.2 adalah unit kerja selalu melaksanakan pemantauan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pimpinan maupun unit terkait dalam proses pencapaian nilai kerja anggaran. Nilai kerja anggaran BPMP Provinsi Gorontalo sebesar 98,82 terdiri dari capaian EKA 99,84 dan capaian IKPA 97,28

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kendala/permasalahan dalam pencapaian IKK 2.2 adalah belum maksimalnya capaian beberapa indikator nilai EKA dan IKPA, yaitu:

1. Terjadinya deviasi halaman III DIPA yang melebihi ambang rata-rata deviasi bulanan sebesar 5% akibat ketidakakuratan perencanaan RPD karena penundaan kegiatan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya
2. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena adanya Keterlambatan/penundaan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya
3. Pengelolaan UP kurang optimal karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit terkait yang menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan pelaksanaan kegiatan

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Strategi/tindaklanjut untuk mengatasi kendala yang timbul adalah:

- 1) Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana perjenis belanja per bulan
- 2) Mendorong akselerasi belanja berdasarkan pola penyerapan per jenis belanja per triwulan
- 3) Meningkatkan ketepatan pertanggungjawaban UP dan optimalisasi penggunaan UP
- 4) Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar unit terkait untuk mengantisipasi perubahan kebijakan atau kondisi yang tidak terduga

### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Perlu melakukan refleksi bersama terhadap semua program
2. Perlu melaksanakan lesson learn selama tahun anggaran 2023 untuk perbaikan program di tahun 2024
3. Perkuat komunikasi untuk menghadirkan koordinasi sehingga bisa menghasilkan kolaborasi yang baik bersama pemerintah daerah
4. Memaksimalkan pembagian peran dan tugas tim kerja 1 s.d 5 maupun PDM 1 s.d 14 dalam mengawal program prioritas
5. Monitoring dan evaluasi selalu dilakukan untuk mengetahui capaian setiap program
6. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan melalui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menjadi prioritas utama dan ditindaklanjuti pada tahun 2024
7. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap kebutuhan dan kondisi riil

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Gorontalo, 16 Januari 2024

**Kepala BPMP Provinsi Gorontalo**



**Rudi Syaifullah, S.Si., M.M.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI GORONTALO**

Jalan dr. Zainal Umar Sidiki, Tilongkabila, Bone Bolango, Gorontalo  
Telepon 085242700045 Po. Box :1024 Kode Pos 96554  
Laman [www.pmpgorontalo.kemdikbud.go.id](http://www.pmpgorontalo.kemdikbud.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

**BPMP PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI GORONTALO untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen BPMP PROVINSI GORONTALO.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

BPMP Gorontalo, 26 Januari 2024  
Ketua Tim Reviu  
  
DONT PUNU  
196001172009121002